



Katalog BPS : 4104001.

# STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2007



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**STATISTIK  
PENDUDUK LANJUT USIA**

**2007**

<http://www.bps.go.id>

# **STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2007**

**ISBN.**

**No Publikasi : 04220.**

**Katalog BPS :**

**Ukuran Buku : 21 Cm x 28 Cm**

**Jumlah Halaman : 155**

**Naskah :**

**Subdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial**

**Gambar Kulit :**

**Subdit Publikasi Statistik**

**Diterbitkan oleh :**

**Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia**

**Dicetak oleh :**

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

## KATA PENGANTAR

Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan derajat kesehatan penduduk lansia yang pada umumnya berbeda dengan penduduk pada kelompok umur yang lebih muda, kebijakan pembangunan seyogianya memberikan perhatian khusus bagi penduduk lansia.

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2007 ini menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, kegiatan sosial ekonomi dan derajat kesehatan. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2007 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2007. Publikasi lansia tahun 2007 dilengkapi juga dengan laporan hasil studi mendalam lansia di lima provinsi yaitu Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan sebagai informasi kualitatif yang memperkaya data kuantitatif yang dihasilkan Susenas dan Sakernas 2007.

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Nopember 2007  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan  
NIP. 340003999

# Ringkasan Eksekutif

Suatu negara disebut berstruktur tua (*ageing population*) apabila mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen. Bila dilihat dari persentase penduduk lansia yang telah mencapai 8,42 persen dari keseluruhan penduduk, Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Ada sebelas provinsi yang memasuki struktur penduduk tua pada tahun 2007, yaitu D.I. Yogyakarta (14,04 persen), Jawa Tengah (11,16 persen), Jawa Timur (11,14 persen), Bali (11,02 persen), Sulawesi Selatan (9,05 persen), Sumatera Barat (8,74 persen), Sulawesi Utara (8,62 persen), Nusa Tenggara Barat (8,21 persen), Jawa Barat (8,08 persen), Lampung (7,78 persen) dan Nusa Tenggara Timur (7,68 persen). Struktur penduduk yang menua merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia karena adanya perbaikan usia harapan hidup dan kualitas kesehatan serta kondisi sosial masyarakat yang meningkat.

Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun. Hasil Susenas menunjukkan jumlah lansia sekitar 16,02 juta orang pada tahun 2003 naik menjadi sekitar 16,80 juta orang pada tahun 2005 dan naik lagi menjadi sekitar 18,96 juta orang pada tahun 2007.

Pertambahan penduduk lansia berdampak pada angka rasio ketergantungan penduduk tua. Angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 11,87 pada tahun 2003 menjadi sebesar 12,12 pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi sebesar 13,52 pada tahun 2007. Angka rasio sebesar 13,52 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang penduduk lansia.

Hasil Susenas 2007 menunjukkan persentase penduduk lansia yang berpendidikan hanya sampai SD relatif tinggi yaitu sebesar 20,86 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi persentasenya yaitu 65,70 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada SLTP ke atas hanya sekitar 5 persen. Data tersebut menunjukkan secara umum tingkat pendidikan lansia masih sangat rendah. Salah satu faktor penyebab adalah keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan. Kondisi ini hampir berlaku di semua provinsi. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,44 persen), sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,68 persen).

Rendahnya tingkat pendidikan lansia juga terlihat dari masih banyaknya penduduk lansia yang belum mampu membaca dan menulis. Dari keseluruhan lansia sekitar 30,62 persen diantaranya masih buta huruf. Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, persentase penduduk lansia buta huruf tertinggi (45,71 persen) berada pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah. Angka buta huruf lansia tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,03 persen) dan terendah berada di Provinsi Gorontalo (7,70 persen).

Bila dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, secara umum derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Pada tahun 2003 sebesar 46,95 persen penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan, naik pada tahun 2005 menjadi 48,94 persen dan pada tahun 2007 menjadi sebesar 54,25 persen. Provinsi dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (71,63 persen) dan yang terendah di Provinsi Jambi (47,81 persen). Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami lansia adalah jenis keluhan kesehatan lainnya (32,99 persen). Jenis keluhan kesehatan tersebut diantaranya adalah penyakit kronis yang umumnya diderita lansia seperti asam urat, darah tinggi, rematik, sesak nafas/asma, darah rendah, diabetes, kencing batu, dan ambeien (Hasil Studi Lansia 2007). Jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia berturut-turut adalah batuk (20,09 persen), pilek (14,25 persen), panas (12,20 persen) dan sakit kepala berulang (11,95

persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Angka kesakitan lansia pada tahun 2007 sebesar 31,11 persen. Dari seluruh penduduk lansia yang sakit, sebagian besar mengalami sakit tidak lebih dari seminggu, yaitu 34,19 persen penduduk lansia menderita sakit selama 4-7 hari dan 30,57 persen lansia sakit selama 1-3 hari. Penduduk lansia yang sakit dan melakukan cara penyembuhan dengan berobat sendiri sebagian besar (55,08 persen) menggunakan jenis obat modern, sedangkan mereka yang memakai obat tradisional sekitar 12,32 persen.

Di sisi lain, penduduk lansia yang sakit juga ada yang melakukan penyembuhan dengan berobat jalan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas/puskesmas pembantu (pustu) sebesar 33,66 persen, kemudian tempat praktek tenaga kesehatan (nakes) sebesar 31,74 persen dan praktek dokter sebesar 29,26 persen.

Banyaknya lansia yang masih produktif tercermin dari hasil Sakernas 2007, yaitu dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 47,83 persen diantaranya masih bekerja. Kondisi yang sama terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu masing-masing 37,14 persen dan 54,35 persen. Mayoritas penduduk lansia yang bekerja terutama terlihat pada lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga.

Perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK penduduk lansia pada tahun 2007 adalah sebesar 48,51 persen. TPAK penduduk lansia tertinggi terdapat di Provinsi Papua (59,09 persen) dan terendah terdapat di DKI Jakarta (31,67 persen).

Dari seluruh penduduk lansia yang bekerja, sebesar 66,75 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan penduduk lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa dan sektor industri masing-masing hanya sebesar 25,22 persen dan 8,03 persen. Pada jenjang pendidikan yang semakin rendah, persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung semakin besar. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, penduduk lansia yang berhasil

menamatkan pendidikannya sampai SMA ke atas hanya sekitar 2,33 persen yang bekerja di sektor pertanian.

Pada umumnya lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 44,73 persen, sedangkan lansia yang berusaha sendiri sebesar 22,69 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,00 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas pertanian (7,07 persen), buruh/karyawan (5,91 persen), berusaha dibantu buruh tetap (3,76 persen) dan pekerja bebas non pertanian (1,83 persen).

Lansia cenderung masih mempunyai produktifitas yang tinggi dalam bekerja. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu yaitu sebesar 48,49 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 36,83 persen dan sisanya adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu yaitu sebesar 14,68 persen. Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh hampir terjadi di semua provinsi, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL LAMPIRAN</b>	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	4
<b>BAB II     METODOLOGI</b>	<b>9</b>
2.1 Sumber Data	9
2.1.1 Ruang Lingkup	10
2.1.2 Kerangka Sampel	11
2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel	11
2.1.4 Metode Pengumpulan Data	12
2.1.5 Petugas Lapangan	13
2.2 Konsep dan Definisi	13
2.2.1 Tipe Daerah	13
2.2.2 Blok Sensus	15
2.2.3 Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	16
2.3 Keterbatasan Data	20
2.4 Metode Analisis	20

	<b>Halaman</b>
<b>BAB III STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA</b>	<b>23</b>
3.1 Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia	25
3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Tua	26
3.3 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	27
3.4 Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	31
<b>BAB IV PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA</b>	<b>37</b>
4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	39
4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis	42
<b>BAB V KESEHATAN PENDUDUK LANSIA</b>	<b>49</b>
5.1 Keluhan Kesehatan	51
5.2 Angka Kesakitan	54
5.3 Lama Sakit	55
5.4 Cara Berobat	57
<b>BAB VI KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA</b>	<b>65</b>
6.1 Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Lansia	67
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia	70
6.3 Lapangan Usaha	71
6.4 Status Pekerjaan	74
6.5 Jumlah Jam Kerja	76
<b>BAB VII HASIL STUDI LANSIA</b>	<b>81</b>
7.1 Metodologi	82
7.1.1 Cakupan Wilayah Pencacahan	82
7.1.2 Cara Pemilihan Responden	82
7.1.3 Metode Pengumpulan Data	82

	<b>Halaman</b>
7.2 Hasil Studi Lansia	83
<b>TABEL LAMPIRAN</b>	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Persentase Penduduk Lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007	32
4.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007	41
4.2	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007	44
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2007	45
5.1	Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007	52
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah Tahun 2003, 2005 dan 2007	54
6.1	TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	70
6.2	TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah Tahun 2003, 2005, dan 2007	71
6.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007	77

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.a	Persentase Penduduk Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2007	25
3.b	Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua Menurut Tipe Daerah Tahun 2003, 2005, dan 2007	27
3.c	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007	28
3.d	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2007	30
3.e	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia Menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2007	33
4.a	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2003, 2005, dan 2007	40
4.b	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	43
5.a	Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Tahun 2007	53
5.b	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah Tahun 2007	56
5.c	Persentase Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah Tahun 2007	58
5.d	Proporsi Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah Tahun 2007	59

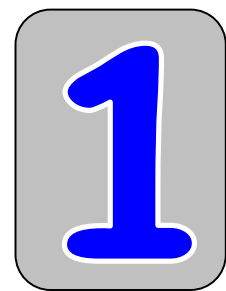
<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
6.a	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Tahun 2007	68
6.b	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah Tahun 2007	72
6.c	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2007	74
6.d	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Tahun 2007	75
6.e	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2007	78

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1 - 3.1.3	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2007	89 – 91
3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	92
3.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2007	93
3.4	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Tahun 2007	94
4.1.1 – 4.1.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007	95 – 97
4.2.1 – 4.2.9	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007	98 – 106
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Golongan Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2007	107
5.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	108
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	109
5.3.1 – 5.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit (hari) Tahun 2007	110 – 112
5.4	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	113
5.5.1 – 5.5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan Tahun 2007	114 – 116
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	117



<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
5.7.1 – 5.7.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan Tahun 2007	118 – 120
6.1	TPAK Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2007	121
6.2.1 – 6.2.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Tahun 2007	122 – 124
6.3.1 – 6.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2007	125 – 127
6.4.1 – 6.4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007	128 – 130



# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perjalanan hidup seorang manusia dimulai dari janin dalam tubuh seorang wanita hingga usia senja. Sebagai suatu siklus hidup, proses memasuki usia senja atau menjadi tua adalah hal yang tidak dapat dihindari dan harus dipersiapkan sedini mungkin, sehingga dengan memiliki usia panjang diharapkan dapat hidup sejahtera, sehat sentosa dan bahagia di masa tua. Meskipun wajah keriput dan rambut memutih, seseorang yang sudah memasuki masa tua atau dalam terminologi umum disebut sebagai lanjut usia (lansia), dikatakan sebagai suatu tahap kematangan pribadi dan kekayaan pengalaman dalam perjalanan hidupnya yang dapat disumbangkan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, di sisi lain lansia memiliki berbagai keterbatasan baik fisik maupun non fisik, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya.

Perhatian dan perlindungan terhadap lansia penting dilakukan seiring dengan kenyataan bahwa populasi lansia setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan lansia ini disebabkan karena semakin membaiknya kualitas kesehatan yang berujung pada meningkatnya usia harapan hidup penduduk.

Di Indonesia sejak 1980-2000 telah terjadi penambahan usia harapan hidup dari rata-rata 52,2 tahun pada tahun 1980 menjadi rata-rata 64,5 tahun pada tahun 2000 bahkan diprediksikan menjadi rata-rata 67,4 tahun pada tahun 2010 dan rata-rata 71,1 tahun pada tahun 2020. Dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia, tentu akan terjadi pertambahan jumlah penduduk lansia di Indonesia. Diperkirakan jumlah lansia Indonesia pada tahun 2020 sekitar 40 juta jiwa atau 13,2 persen dari total penduduk. Sementara itu, menjelang 2050 diperkirakan satu dari empat penduduk di Asia dan Amerika Latin merupakan lansia (Media Indonesia, Desember 2007).

Fenomena bertambahnya jumlah lansia menggugah perhatian khusus dunia internasional. Salah satu bentuk kepedulian internasional terhadap lansia adalah adanya resolusi PBB No. 045/206 tahun 1991 mengenai penetapan 1 Oktober sebagai "*International Day for the Elderly*". Hal ini merupakan tindak lanjut *Vienna Plan of Action on Aging* tahun 1982 yang melahirkan kesepakatan untuk mengundang bangsa-bangsa (negara) yang belum menetapkan hari bagi lanjut usia. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan hari lansia di Indonesia pada setiap tanggal 29 Mei. Dengan penetapan itu maka setiap tahun Hari Lanjut Usia Nasional diperingati dengan berbagai acara yang intinya adalah mengingatkan semua pihak untuk memberikan perhatian kepada para usia lanjut, memperhatikan peninggalan mereka dan memperingatkan diri sendiri agar mulai mempersiapkan diri secara dini untuk menyongsong hari lanjut usia yang pasti akan tiba. Pemerintah mencanangkan hari lanjut usia pertama kali pada tanggal 29 Mei 1996. Pencanangan ini sebagai wujud kepedulian dan penghargaan pemerintah dan masyarakat bagi lansia Indonesia.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap lansia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Di dalam UU tersebut Pasal 1 ayat 2 dinyatakan pengertian lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan

pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan. Tujuan dari semua ini adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan antara lain meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; dan bantuan sosial. Lansia punya kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti yang tertuang dalam UU tersebut Pasal 6 ayat 1. Kewajiban lansia diantaranya membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan; mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus (<http://www.menkokesra.go.id>).

Penjabaran dari UU mengenai kesejahteraan lansia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia.

Undang-Undang mengenai lansia yang dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun keputusan presiden tersebut merupakan landasan hukum yang kuat sekaligus sebagai arahan aparatur Pemerintah maupun masyarakat, agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, diperlukan

penanganan dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun LSM dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat secara aktif, karena hal ini merupakan tanggungjawab bersama guna tercapainya cita-cita lansia yang produktif, sehat dan mandiri.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut di atas, diperlukan arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan penduduk lansia secara terpadu dan lintas sektor. Sejalan dengan itu, diperlukan data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting. Publikasi Statistik Lansia menyajikan data dan informasi lansia dilihat dari sisi demografis, pendidikan, ekonomi dan kesehatan, baik pada level nasional maupun provinsi. Diharapkan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan dan pemberdayaan penduduk lansia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan situasi penduduk lansia Indonesia yang dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu disajikan pula gambaran mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk lansia berdasarkan hasil studi lapangan.

Gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini dapat berguna terutama bagi para peneliti, perencana dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

## **1.3 Sistematika Penyajian**

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2007 ini disajikan dalam tujuh bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena-fenomena

yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; keterbatasan data; serta konsep dan definisi.

Lima bagian berikutnya menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) adalah mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan serta jam kerja penduduk lansia yang bekerja. Pada bagian terakhir publikasi ini (Bab VII) disajikan laporan hasil studi lapangan di beberapa daerah.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>



## Metodologi

### 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan publikasi ini mencakup dua jenis data sebagai berikut.

- a. Data Kor Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lanjut usia (lansia) yang dilihat dari aspek demografis, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2007, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan lansia.

BPS setiap tahun menyelenggarakan Susenas. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. Karena luasnya cakupan data

yang harus dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Kor dan Modul. Kor hanya dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok namun mencakup keseluruhan aspek sosial ekonomi (diselenggarakan setiap tahun), sedangkan modul Susenas mencakup pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci dari salah satu aspek sosial ekonomi. Secara keseluruhan, Susenas mempunyai tiga modul yaitu Modul Konsumsi/Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Pengumpulan data modul dilakukan secara bergiliran setiap tiga tahun sekali.

Sesuai gilirannya, Modul Susenas untuk tahun 2007 adalah perumahan dan kesehatan. Namun, dengan adanya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, dan sebagian besar data yang dikumpulkan merupakan data kesehatan yang selalu dikumpulkan melalui Susenas Modul Perumahan dan Kesehatan, maka modul Susenas 2007 hanya Modul Perumahan. Modul Perumahan Susenas 2007 meliputi data rinci mengenai perumahan dan permukiman yang memuat beberapa keterangan, diantaranya keterangan penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan bangunan dan kondisi lingkungan. Berikut ini adalah ruang lingkup survei, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, dan petugas lapangan sehubungan dengan kegiatan Susenas 2007.

### **2.1.1 Ruang Lingkup**

Susenas 2007 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 285.904 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217.104 rumah tangga dicacah dengan kuesioner kor (VSEN2007.K) saja dan selebihnya yaitu sebanyak 68.800 rumah tangga selain dicacah dengan kuesioner kor, juga dicacah dengan kuesioner modul perumahan dan permukiman (VSEN2007.MP). Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Data yang dihasilkan dari sampel kor representatif disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota asal tidak dibedakan menurut tipe daerah, sedangkan data dari

sampel modul representatif sampai dengan tingkat provinsi dan dapat dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan/perdesaan).

### 2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2007 terdiri dari 3 jenis, yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga atau blok sensus yang telah dibuat sub-blok sensusnya pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus adalah daftar sub-blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga yang terdapat dalam Daftar VSEN2007.L Blok IV, hasil pendaftaran rumah tangga di lapangan.

### 2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel

#### **Kor**

Sampel **Kor** Susenas 2007 didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2007 adalah rancangan sampel bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Prosedur penarikan sampel Susenas 2007 untuk suatu kabupaten/kota sebagai berikut.

- 1 **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih  $n_h$  blok sensus ( $h = 1$ , untuk perkotaan;  $h = 2$ , untuk perdesaan) secara *PPS* – sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Pendaftaran rumah tangga/*listing* dilakukan pada setiap blok sensus terpilih.
- 2 **Tahap kedua**, memilih  $\bar{m} = 16$  rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis.

Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan satu sub blok sensus secara *PPS* – sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B.

### **Modul Perumahan dan Permukiman**

Sampel modul ini merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsampel) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena di samping dicacah dengan kuesioner modul, juga dicacah dengan kuesioner kor. Dengan kata lain, blok sensus yang akan digunakan untuk estimasi di tingkat provinsi (blok sensus kor-modul) dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota (blok sensus kor). Blok sensus yang tidak terpilih kor-modul 2007 disebut blok sensus kor.

#### **2.1.4 Metode Pengumpulan Data**

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan lapangan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu para petugas ini dilatih oleh instruktur (pelatih) tentang tata cara pengisian kuesioner dan

pemakaian konsep/definisi yang digunakan dalam kegiatan survei. Hal ini dimaksud untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh salah satu faktor *non-sampling error*.

### **2.1.5 Petugas Lapangan**

Dalam kegiatan survei-survei BPS yang berskala besar seperti Susenas, staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilibatkan sebagai pengawas (PMS), sedangkan yang menjadi petugas pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Seperti halnya untuk KSK, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi mitra statistik untuk dapat menjadi PCL dalam kegiatan survei minimal adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

## **2.2 Konsep dan Definisi**

### **2.2.1 Tipe Daerah**

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau perdesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas umum. Penentuan skor suatu desa/kelurahan adalah seperti pada Tabel A. Kolom (1) menunjukkan variabel/klasifikasi yang digunakan, dan Kolom (2) menunjukkan nilai skor untuk setiap variabel.

**Tabel A. Variabel, Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000**

Variabel/Klasifikasi	Skor	Variabel/Klasifikasi	Skor
(1)	(2)	(1)	(2)
Total Skor			
● Skor Minimum	2	B) Sekolah Menengah Pertama	
● Skor Maksimum	26	● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1
		● $> 2,5$ Km	0
1. Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>		C) Sekolah Menengah Umum	
< 500	1	● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1
500 - 1 249	2	● $> 2,5$ Km	0
1 250 - 2 499	3		
2 500 - 3 999	4	D) Pasar	
4 000 - 5 999	5	● Ada atau $\leq 2$ Km	1
6 000 - 7 499	6	● $> 2$ Km	0
7 500 - 8 499	7		
8 500 +	8	E) Bioskop	
		● Ada atau $\leq 5$ Km	1
		● $> 5$ Km	0
2. Persentase Rumah Tangga Pertanian			
70,00 +	1	F) Pertokoan	
50,00 – 69,99	2	● Ada atau $\leq 2$ Km	1
30,00 – 49,99	3	● $> 2$ Km	0
20,00 – 29,99	4		
15,00 – 19,99	5	G) Rumah Sakit	
10,00 – 14,99	6	● Ada atau $\leq 5$ Km	1
5,00 – 9,99	7	● $> 5$ Km	0
< 5,00	8		
3. Akses Fasilitas Umum	0,1,2,.....10	H) Hotel/Bilyard/Diskotek/Panti pijat/Salon	
		● Ada	1
		● Tidak ada	0
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)		I) Persentase Rumah Tangga Telepon	
● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1	● $\geq 8,00$	1
● $> 2,5$ Km	0	● $< 8,00$	0
		J) Persentase Rumah Tangga Listrik	
		● $\geq 90,00$	1
		● $< 90,00$	0

Cara perhitungan skor adalah sebagai berikut.

- Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km<sup>2</sup>, dua bagi desa dengan kepadatan kurang dari

- 500 – 1 249 orang per km<sup>2</sup> dan seterusnya sampai dengan 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8 500 orang per km<sup>2</sup>.
- b. Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1 – 8, satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50 – 69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, bila desa mempunyai 5 persen atau kurang.
  - c. Variabel akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan.
  - d. Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan pertimbangan mudahnya akses kepada perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.
  - e. Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa perdesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.

Dalam pelaksanaannya penentuan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk 2000.

### **2.2.2 Blok Sensus**

Blok sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel, blok sensus terpilih Susenas 2007 sudah ditentukan oleh BPS pusat segera setelah rancangan sampel selesai. Setiap blok sensus harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Seluruh blok sensus dalam setiap desa/kelurahan membagi habis wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).



3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

**Blok sensus biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

**Blok sensus khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali lembaga pemasyarakatan yang muatannya tidak dibatasi. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus, antara lain:

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

**Blok sensus persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

**Blok sensus khusus dan blok sensus persiapan bukan merupakan bagian dari kerangka sampel Susenas**

### 2.2.3 Rumah tangga dan Anggota Rumah Tangga

**Penduduk Lanjut Usia** adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas.

**Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

**Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

**Tidak termasuk anggota rumah tangga** yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

**Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

**Cerai hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

**Cerai mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

**Angka Harapan Hidup** adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang dicapai oleh sekelompok penduduk, mulai lahir sampai meninggal.

**Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang.

**Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

**Belum tamat SD** adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

**SD** Meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

**SMP** meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

**SM** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

**Dapat Membaca dan Menulis** adalah dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

**Buta Huruf** adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

**Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

**Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

**Kondisi kesehatan** adalah keadaan kesehatan responden saat ini termasuk keadaan fisik ataupun mental.

**Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

**Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). Termasuk pula yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan seperti cuti, nunggu panen, mogok dan sebagainya.

**Pengangguran** adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

**Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebaskan tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dsb.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \text{ persen}$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur terbatas 60 tahun ke atas.

**Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

**Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

**Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja terhadap angkatan kerja.

### **2.3 Keterbatasan Data**

Disadari ada keterbatasan data yang digunakan dalam penyajian publikasi ini. Penjelasan berikut diharapkan dapat lebih memperjelas dan mempermudah bagi pengguna dan pembaca publikasi ini dalam menafsirkan data yang disajikan.

- a. Data Susenas 2007 tidak termasuk dua kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- b. Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Lansia yang tinggal di panti jompo tidak dicakup.

### **2.4 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan sosial ekonomi lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



## Struktur Demografis Penduduk Lansia

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional atau *human capital*. Sebagai modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada penduduknya terlebih lagi jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan berkualitas yang akan menjadi sumber potensi yang kuat dalam pembangunan. Sejak lama Indonesia mempunyai potensi penduduk yang termasuk empat besar di dunia setelah Republik Rakyat China, India dan Amerika Serikat. Namun, potensi jumlah penduduk yang besar tersebut tidak akan menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Sejalan dengan itu, diperlukan data-data kependudukan yang dapat mendukung setiap kegiatan perencanaan



pembangunan khususnya kegiatan perencanaan input dan output pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan.

Data dasar mengenai kependudukan yang banyak digunakan terutama adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pada kegiatan perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografis. Sebagai contoh adalah data komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia 0–4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Pada penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7–12, 13–15 dan 16–18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun ke atas atau penduduk lansia. Sejalan dengan itu, kegiatan perumusan arah dan kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Oleh karena itu dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Analisis pada bagian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia menurut beberapa karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan struktur dalam rumah tangga serta perkembangannya.

### 3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia

Negara yang mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen maka negara itu disebut negara berstruktur tua (*ageing population*). Kecenderungan demografi di Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia termasuk negara berstruktur tua dilihat dari persentase penduduk lansia yang telah mencapai 8,42 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.a. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan usia harapan hidup dan kualitas kesehatan serta kondisi sosial masyarakat yang meningkat.

**Tabel 3.a**  
**Persentase Penduduk Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2007**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)				Total
	< 15	15-35	36-59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan (K)</b>					
Laki-laki	30,36	35,12	27,79	6,73	100,00
Perempuan	28,47	36,26	27,47	7,79	100,00
L+P	29,41	35,69	27,63	7,27	100,00
<b>Perdesaan (D)</b>					
Laki-laki	33,57	30,95	26,86	8,62	100,00
Perempuan	31,59	31,49	26,91	10,01	100,00
L+P	32,58	31,22	26,88	9,32	100,00
<b>K + D</b>					
Laki-laki	32,17	32,76	27,27	7,80	100,00
Perempuan	30,22	33,59	27,16	9,04	100,00
L+P	31,19	33,18	27,21	8,42	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2007

Bila dibandingkan dengan persentase penduduk pada kelompok umur muda maupun dewasa, persentase kelompok umur lansia masih 4 kali lipat lebih rendah. Persentase penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 31,19 persen, pada kelompok umur pemuda (15-35 tahun) sebesar 33,18 persen dan kelompok umur dewasa (36-59 tahun) sebesar 27,21 persen. Meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, namun kita tidak boleh mengesampingkan keberadaan

lansia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Peran lansia dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan masih diperlukan. Bahkan lansia dengan profesionalisme yang spesifik masih diperlukan untuk mengisi pembangunan dalam skala lokal maupun nasional, bahkan di internasional. Sesuai UUD 1945 pasal 28 H, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Begitu pula dengan UU No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia mengamanatkan, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Jika dilihat per provinsi, beberapa provinsi telah mengalami proses penuaan penduduk seperti yang terjadi secara nasional. Pada Tabel Lampiran 3.1.3 dapat dilihat ada sebelas provinsi yang memasuki struktur penduduk tua pada tahun 2007, yaitu D.I. Yogyakarta (14,04 persen), Jawa Tengah (11,16 persen), Jawa Timur (11,14 persen), Bali (11,02 persen), Sulawesi Selatan (9,05 persen), Sumatera Barat (8,74 persen), Sulawesi Utara (8,62 persen), Nusa Tenggara Barat (8,21 persen), Jawa Barat (8,08 persen), Lampung (7,78 persen) dan Nusa Tenggara Timur (7,68 persen).

### **3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua**

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan. Salah satunya adalah angka beban ketergantungan tua. Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, jumlah penduduk yang berusia tua pun menjadi relatif besar, yang berarti angka ketergantungan tua juga telah meningkat. Rasio ketergantungan penduduk tua (*old dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk tua.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk tua dalam kurun waktu 2003, 2005 dan 2007 mengalami kenaikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.b. Angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 11,87

pada tahun 2003 menjadi sebesar 12,12 pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi sebesar 13,52 pada tahun 2007. Angka rasio sebesar 13,52 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang penduduk lansia. Angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan tingginya angka rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia.

**Tabel 3.b**  
**Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua Menurut Tipe Daerah**  
**Tahun 2003, 2005, dan 2007**

Tipe Daerah	Rasio Ketergantungan		
	2003	2005	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,25	10,32	11,16
Perdesaan	13,14	14,03	15,51
Perkotaan +Perdesaan	11,87	12,12	13,52

Sumber: BPS - Susenas 2003, 2005, dan 2007

Pada tabel tersebut juga ditunjukkan bahwa peningkatan rasio ketergantungan penduduk tua terhadap penduduk usia produktif terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rasio penduduk tua di daerah perkotaan cenderung lebih rendah daripada penduduk tua di daerah perdesaan. Pada tahun 2007, angka rasio penduduk tua di perkotaan tercatat sebesar 11,16, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 15,51.

### 3.3 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Pada Tabel 3.c ditampilkan perkiraan jumlah dan proporsi penduduk lansia pada tahun 2003, 2005 dan 2007. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk lansia Indonesia telah mencapai 18,96 juta orang. Angka ini diperkirakan mencapai 8,42 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia. Pada tahun 2003 jumlah penduduk lansia sekitar 16,02 juta orang naik menjadi sekitar 16,80 juta orang pada tahun 2005 dan naik lagi menjadi sekitar 18,96 juta orang pada tahun 2007. Peningkatan lansia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya keberhasilan

pembangunan dalam bidang kesehatan terutama meningkatnya angka rata-rata harapan hidup yang membawa konsekuensi makin bertambahnya jumlah penduduk lansia.

**Tabel 3.c**  
**Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007**

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Proporsi (Perkiraan Jumlah)		
	2003	2005	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tipe Daerah</b>			
Perkotaan	6,72 (6 067 866)	6,77 (6 444 169)	7,27 (7 155 987)
Perdesaan	8,03 (9 955 880)	8,58 (10 361 125)	9,32 (11 801 202)
Perkotaan + Perdesaan	7,47 (16 023 746)	7,78 (16 805 294)	8,42 (18 957 189)
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	7,31 (7 880 002)	7,41 (8 014 706)	7,80 (8 766 557)
Perempuan	7,64 (8 143 744)	8,15 (8 790 588)	9,04 (10 190 632)
Laki-laki + Perempuan	7,47 (16 023 746)	7,78 (16 805 294)	8,42 (18 957 189)

Sumber: BPS - Susenas 2003, 2005, dan 2007

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia, terjadi juga peningkatan proporsi penduduk lansia terhadap jumlah penduduk keseluruhan selama kurun waktu 2003-2007. Proporsi penduduk lansia pada tahun 2003 sebesar 7,47 persen naik menjadi 7,78 persen pada tahun 2005 dan naik menjadi 8,42 persen pada tahun 2007.

Dari Tabel 3.c juga dapat dilihat jumlah dan proporsi penduduk lansia menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Pada tahun 2007, jumlah penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan sebanyak 7,16 juta orang atau proporsinya sebesar 7,27 persen dari keseluruhan penduduk perkotaan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan terlihat lebih besar jumlahnya yaitu 11,80 juta orang atau 9,32 persen dari keseluruhan penduduk perdesaan. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah lansia perempuan adalah 10,19 juta orang (9,04 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada laki-

laki yang hanya 8,77 juta orang (7,80 persen dari seluruh penduduk laki-laki). Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki penyebabnya karena usia harapan hidup kaum perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup kaum laki-laki.

Bila dilihat antar provinsi di Indonesia, proporsi penduduk lansia sangat bervariasi seperti yang terlihat pada Tabel Lampiran 3.1.3. Pada tabel tersebut nampak bahwa proporsi penduduk lansia berkisar antara 2,15 persen s.d 14,04 persen. Provinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya berturut-turut adalah Provinsi DI Yogyakarta (14,04 persen), Jawa Tengah (11,16 persen) dan Jawa Timur (11,14 persen). Sementara provinsi yang proporsi penduduk lansianya paling rendah adalah Provinsi Papua (2,15 persen), Irian Jaya Barat (2,92 persen) dan Kepulauan Riau (3,78 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki maupun perempuan.

Pada Tabel 3.d disajikan distribusi penduduk lansia menurut status perkawinan. Hampir 60 persen penduduk lansia berstatus kawin. Mereka yang berstatus cerai mati juga relatif cukup besar yaitu sekitar 36,71 persen, sedangkan yang berstatus cerai hidup dan belum kawin masing-masing hanya 2,58 persen dan 0,91 persen. Struktur perkawinan lansia di daerah perkotaan maupun perdesaan mengikuti pola secara keseluruhan. Di daerah perkotaan, penduduk lansia yang berstatus kawin sebesar 58,73 persen dan yang berstatus cerai mati sebesar 37,68 persen. Sisanya mereka yang cerai hidup (2,46 persen) dan belum kawin (1,13 persen). Sementara itu, penduduk lansia yang tinggal di perdesaan 60,45 persen berstatus kawin dan 36,12 persen berstatus cerai mati. Sementara itu, mereka yang berstatus cerai hidup sebesar 2,66 persen dan belum kawin 0,78 persen.

Struktur perkawinan penduduk lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan penduduk lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.3, kecuali untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. Kelima provinsi tersebut mempunyai pola persentase penduduk lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

**Tabel 3.d**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan**  
**Status Perkawinan Tahun 2007**

<b>Tipe Daerah/ Jenis Kelamin</b>	<b>Belum Kawin</b>	<b>Kawin</b>	<b>Cerai Hidup</b>	<b>Cerai Mati</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan (K)</b>					
Laki-laki	0,78	84,65	1,24	13,33	100,00
Perempuan	1,42	36,60	3,50	58,48	100,00
L+P	1,13	58,73	2,46	37,68	100,00
<b>Perdesaan (D)</b>					
Laki-laki	0,58	85,34	1,19	12,88	100,00
Perempuan	0,95	38,93	3,92	56,20	100,00
L+P	0,78	60,45	2,66	36,12	100,00
<b>K + D</b>					
Laki-laki	0,66	85,08	1,21	13,05	100,00
Perempuan	1,13	38,05	3,76	57,06	100,00
L+P	0,91	59,80	2,58	36,71	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2007

Bila dilihat menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan penduduk lansia perempuan. Sesuai dengan kenyataan bahwa usia harapan hidup kaum perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup kaum laki-laki, hal ini menimbulkan dugaan penyebab jumlah lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.d, penduduk lansia laki-laki lebih banyak yang berstatus kawin (85,08 persen) dibandingkan yang berstatus cerai mati (13,05 persen). Sebaliknya, penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati (57,06 persen) daripada yang berstatus kawin (38,05 persen). Pola status perkawinan yang berbeda antara penduduk lansia menurut gender ini juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah

bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penduduk lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi. Kondisi ini mengakibatkan persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sangat kecil, sebaliknya proporsi mereka yang berstatus kawin cenderung tinggi.

### **3.4 Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga**

Satu rumah tangga dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting perannya dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung-jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mampu mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan aktif sebagai pengambil keputusan.

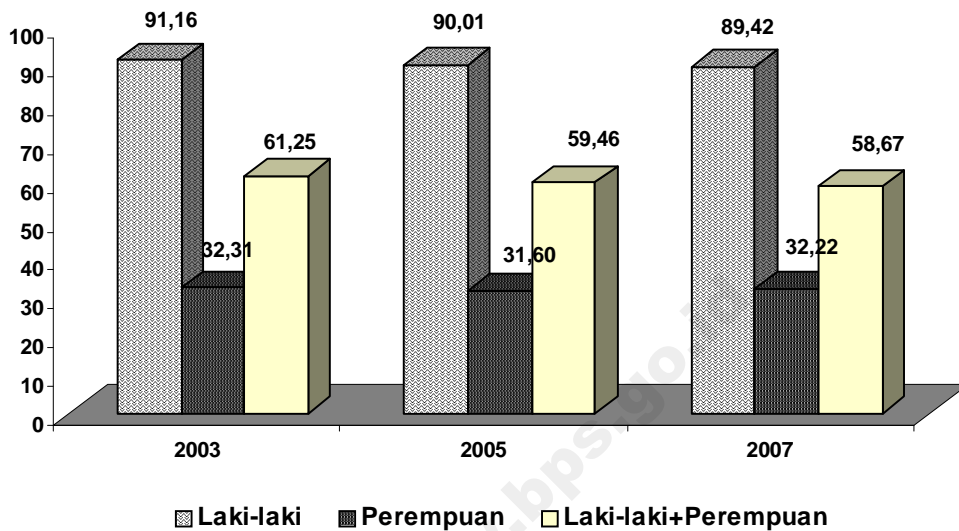
Meskipun tanggung jawab seorang kepala rumah tangga sangat besar baik dilihat dari segi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak peran tersebut dipegang oleh penduduk lansia yang seharusnya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Hasil studi lansia tahun 2007 menyatakan bahwa tingginya lansia sebagai kepala rumah tangga karena: 1) lansia masih menjadi tulang punggung keluarga dan 2) rumah yang ditempati milik lansia (lihat hasil temuan lapangan pada Bab 7). Gambar 3.3, pada tahun 2007 sebagian besar (58,67 persen) penduduk lansia masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga atau berstatus sebagai kepala rumah tangga. Gambaran tingginya penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar 61,25 persen dan tahun 2005 sebesar 59,46 persen. Meskipun angkanya cukup tinggi namun trendnya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama pada rumah tangga yang dikepalai lansia laki-laki.

Besarnya persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga perlu mendapat perhatian serius karena mereka dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi untuk anggota rumah tangga. Hal ini didukung pula oleh tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu). Di sisi lain, lansia juga perlu menikmati masa lansianya. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998



tentang kesejahteraan lansia perlu disosialisasikan terutama kepada penduduk usia produktif.

**Gambar 3.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007**



Sumber: BPS - Susenas 2003, 2005, dan 2007

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2007, persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 89,42 persen, sedangkan penduduk lansia perempuan hanya sebesar 32,22 persen.

Pada Tabel 3.e ditampilkan peran keanggotaan dalam rumah tangga penduduk pada umumnya (berumur 10 tahun ke atas) dan penduduk lansia. Seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa sebagian besar lansia berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Pola tersebut berbeda dengan pola umum penduduk berumur 10 tahun ke atas. Sebagian besar (68,75 persen) penduduk berumur 10 tahun ke atas berkedudukan sebagai anggota rumah tangga. Keadaan ini berlaku di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk perkotaan berumur 10 tahun ke atas yang berkedudukan sebagai anggota rumah tangga sebesar 69,54 persen dan di perdesaan sebesar 68,12 persen.

**Tabel 3.e**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia Menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah Tahun 2007**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk 10 Tahun Ke atas		Penduduk Lansia	
	KRT	ART	KRT	ART
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan (K)</b>				
Laki-laki	53,11	46,89	90,27	9,73
Perempuan	8,41	91,59	33,01	66,99
L+P	30,46	69,54	59,38	40,62
<b>Perdesaan (D)</b>				
Laki-laki	55,51	44,49	88,91	11,09
Perempuan	8,48	91,52	31,73	68,27
L+P	31,88	68,12	58,24	41,76
<b>K + D</b>				
Laki-laki	54,46	45,54	89,42	10,58
Perempuan	8,45	91,55	32,22	67,78
L+P	31,25	68,75	58,67	41,33

Sumber: BPS - Susenas 2007

Sementara itu, bila dilihat menurut jenis kelamin, berlaku pola yang sama antara penduduk berumur 10 tahun ke atas dan penduduk lansia. Laki-laki lebih banyak yang menjadi kepala rumah tangga dibandingkan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan budaya masyarakat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



## Pendidikan Penduduk Lansia

Undang-Undang 1945 mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk untuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan penduduk merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) atau produktivitas penduduk suatu negara. Suatu negara dikatakan makin maju apabila SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan (RPJP 2005-2025).

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan selain merupakan sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan, juga merupakan sarana untuk membentuk watak dan peradaban yang sesuai dengan bangsa yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa output/keluaran yang merupakan hasil proses pembelajaran lembaga pendidikan adalah SDM yang terampil, berilmu, handal, kreatif dan berakhlak mulia.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Penduduk yang berusia tua pun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2) tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan ketrampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah.

#### 4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan suatu penduduk mencerminkan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang ditamatkan. Namun, pendidikan akan semakin meningkat sejalan dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua di jamannya seperti pada masa kemerdekaan.

Hasil Susenas 2007 menunjukkan persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi. Mereka yang berpendidikan hanya sampai SD sebesar 20,86 persen. Bahkan mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi lagi persentasenya yaitu 65,70 persen. Di sisi lain, persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif rendah. Tabel 4.a menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan, sampai jenjang SMP hanya sebesar 5,75 persen, SM sebesar 5,56 persen dan Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 2,13 persen. Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia secara umum masih rendah.

Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan lansia yang masih sangat rendah. Hal ini juga sesuai dengan hasil studi lansia yang menerangkan bahwa mereka berada di usia sekolah pada masa penjajahan/kemerdekaan, sehingga tidak ada biaya untuk sekolah karena perekonomian masih sulit, fasilitas sekolah masih jarang dan jauh dari tempat tinggal.

Tabel 4.a juga menggambarkan bahwa budaya patriarkhi masih kental di dunia pendidikan dalam keluarga di era tahun 45-an, dimana orang tua mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kesenjangan terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 20,61 persen,



sedangkan untuk penduduk lansia perempuan melebihi dua kali lipatnya yaitu sebesar 49,47 persen. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi persentase penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Sebuah fenomena yang menarik dari indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu. Ini merupakan gambaran/pola pendidikan di masa Indonesia baru merdeka di tahun '45-an.

**Tabel 4.a**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2003, 2005, dan 2007**

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2003			2005			2007		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	29,45	32,07	29,45	24,62	51,21	38,53	20,61	49,47	36,12
Tdk tamat SD	32,17	34,40	32,17	33,27	27,49	30,25	32,27	27,27	29,58
SD	16,91	16,21	16,91	25,96	14,76	20,10	27,48	15,16	20,86
SMP	13,04	11,23	13,04	6,50	3,30	4,83	7,78	4,01	5,75
SM	4,65	3,14	4,65	7,10	2,69	4,79	8,20	3,29	5,56
PT	3,77	2,95	3,77	2,55	0,54	1,50	3,66	0,81	2,13
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS - Susenas 2003, 2005, dan 2007

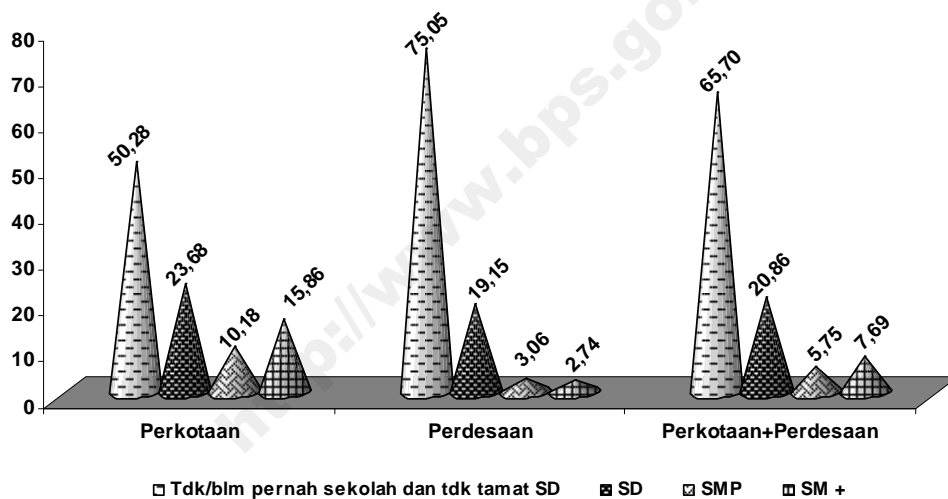
Bila dibandingkan dengan tahun 2005, tingkat pendidikan penduduk lansia menunjukkan kemajuan meskipun angkanya masih terlihat tinggi. Proporsi penduduk lansia dengan pendidikan rendah (di bawah SD) persentasenya mengalami penurunan yaitu dari 68,78 persen pada tahun 2005 menjadi 65,70 persen pada tahun 2007, sedangkan proporsi penduduk lansia dengan pendidikan SD ke atas mengalami kenaikan di semua jenjang pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.a.

Tingkat pendidikan lansia yang secara umum masih relatif rendah, hampir terdapat di semua provinsi. Pada Tabel Lampiran 4.3.3. dapat dilihat bahwa lebih dari 36 persen diantaranya tidak/belum pernah sekolah dan hampir 30 persen pernah sekolah tetapi tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah

terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,44 persen), Bali (50,78 persen) dan Kalimantan Barat (48,81 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,68 persen), Gorontalo (8,03 persen) dan DKI Jakarta (10,82 persen).

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia bila ditinjau berdasarkan tipe daerah berlaku pola yang sama dengan nasional, yaitu masih tingginya persentase penduduk lansia yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD tersebut terus menurun seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan, seperti yang disajikan pada Tabel 4.a.

**Gambar 4.1**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007**



Sumber: BPS - Susenas 2007

Fenomena yang dapat dilihat dari Gambar 4.1 adalah bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD ke atas cenderung lebih tinggi (49,72 persen) dari penduduk lansia di daerah perdesaan (24,95 persen). Sebaliknya, penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan (75,05 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (50,28 persen).

Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi akar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

#### **4.2 Kemampuan membaca dan menulis**

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) yang diajarkan pertama kali pada siswa adalah kemampuan dasar membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana. Dengan menguasai baca tulis huruf latin dan berhitung sederhana, diharapkan setiap orang dapat mempelajari ketrampilan dan keahlian lainnya.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut buta huruf merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta huruf menunjukkan proporsi penduduk buta huruf terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertujuan untuk pemberantasan buta huruf. Prioritas program KF adalah penduduk buta huruf usia 15--44 tahun. Namun dalam kenyataan hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan kemajuan untuk membaca dan menulis lansia masih cukup besar (Laporan Ringkas SBA 2006).

Pada Tabel 4.b. disajikan persentase buta huruf penduduk 15 tahun ke atas dan penduduk lansia pada tahun 2007. Tingkat buta huruf penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,13 persen, sebagian besar merupakan penduduk usia 45 tahun ke atas termasuk di dalamnya penduduk lansia. Sementara itu, angka buta huruf penduduk lansia relatif cukup tinggi yang mencapai dua digit yaitu sebesar 30,62 persen dari total keseluruhan penduduk lansia.

Angka buta huruf lansia yang cukup tinggi ini sejalan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru

melepaskan diri dari belenggu penajahan sehingga pembangunan infra struktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan pembangunan masa kini yang mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik sehingga angka buta huruf penduduk 15 tahun ke atas jauh lebih kecil.

**Tabel 4.b**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Persentase Buta Huruf	
	Penduduk 15 Tahun Ke atas	Penduduk Lansia
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
Laki-laki	2,02	9,86
Perempuan	6,51	31,56
Laki-laki+Perempuan	4,31	21,57
<b>Perdesaan</b>		
Laki-laki	7,01	21,81
Perempuan	15,37	48,47
Laki-laki+Perempuan	11,23	36,11
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>		
Laki-laki	4,78	17,32
Perempuan	11,38	42,07
Laki-laki+Perempuan	8,13	30,62

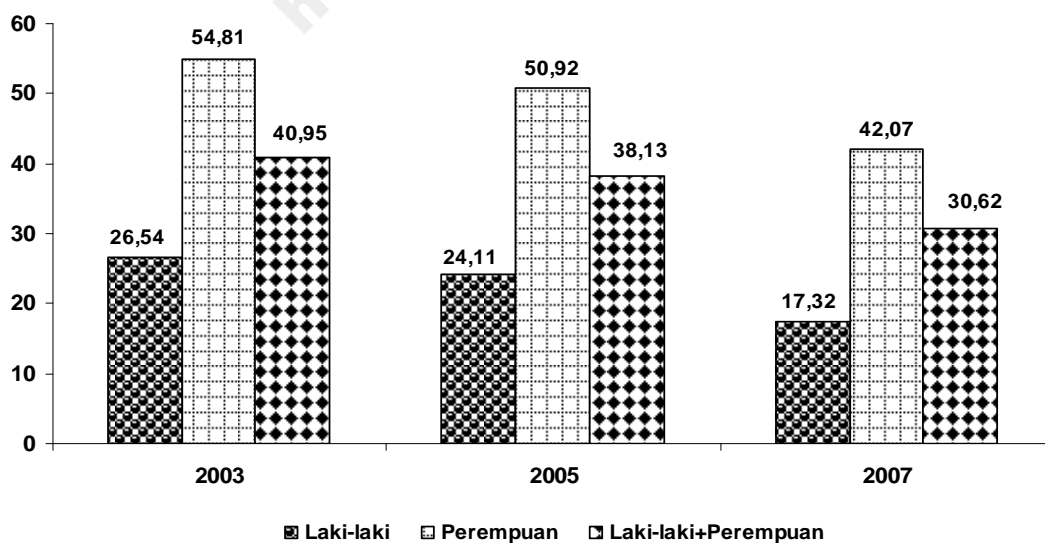
Sumber: BPS - Susenas 2007

Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu cenderung lebih banyak dirasakan oleh penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini tercermin dari angka buta huruf penduduk lansia di daerah perdesaan yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Angka buta huruf penduduk lansia di daerah perdesaan mencapai sebesar 36,11, sedangkan di daerah perkotaan 21,57 persen. Pola tersebut berlaku pula untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang angkanya banyak dipengaruhi oleh penduduk lansia. Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang buta huruf mencapai 11,23 persen, sebaliknya di daerah perkotaan hanya 4,31 persen.

Gambar 4.2. menyajikan angka buta huruf penduduk lansia menurut gender pada tahun 2003, 2005 dan 2007. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan angka buta huruf lansia dari 40,95 persen pada tahun 2003 menjadi 38,13 persen pada tahun 2005 dan turun menjadi 30,62 persen pada tahun 2007. Penurunan angka buta huruf lansia tersebut menunjukkan adanya kemajuan/peningkatan kualitas penduduk lansia dalam hal kemampuan membaca dan menulis, meskipun angkanya relatif masih cukup tinggi.

Bila dilihat menurut gender, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah karena adanya sistem budaya patriarkhi masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih mengutamakan kaum laki-laki (lihat antara lain Iriantono et al, 2002). Pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, persentase penduduk lansia perempuan yang buta huruf dua kali lipat/lebih dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki (42,07 persen berbanding 17,32 persen). Hal yang sama terjadi pada tahun 2003 untuk lansia yang buta huruf (lansia perempuan 54,81 persen dan lansia laki-laki 26,54 persen) dan tahun 2005 untuk lansia yang buta huruf (lansia perempuan 50,92 persen dan lansia laki-laki 24,11 persen).

**Gambar 4.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2003, 2005, dan 2007**

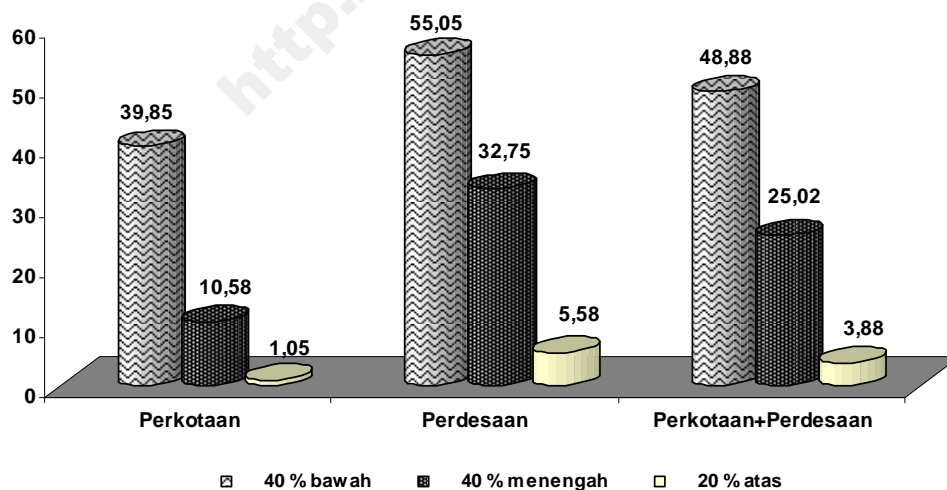


Sumber: BPS - Susenas 2003, 2005 dan 2007

Tabel Lampiran 4.2.9 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta huruf antar provinsi sangat bervariasi antara 2,70 – 56,03 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,03 persen), Bali (48,29 persen) dan D.I. Yogyakarta (47,36 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang buta huruf terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara (2,70 persen), DKI Jakarta (6,26 persen) dan Gorontalo (7,70 persen).

Gambar 4.3. menyajikan angka buta huruf lansia berdasarkan status ekonomi rumah tangga. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk lansia buta huruf yang paling tinggi yaitu sebesar 48,86 persen berada pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah. Sebaliknya, persentase penduduk lansia buta huruf yang paling rendah yaitu sebesar 3,88 persen berada pada kelompok 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa tinggi rendahnya persentase penduduk lansia yang buta huruf cenderung mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga lansia tersebut. Semakin tinggi angka buta huruf lansia maka semakin menurun status ekonomi rumah tangga mereka.

**Gambar 4.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2007**



Sumber: BPS - Susenas 2007

Kesenjangan angka buta huruf penduduk lansia yang sangat jauh antara mereka yang berada pada kelompok 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah dan

kelompok 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tertinggi juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Angka yang relatif lebih menonjol terutama terdapat di daerah perkotaan dimana pada kelompok 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tertinggi hanya terdapat sekitar 1 persen penduduk lansia yang mengalami buta huruf, sedangkan mereka yang buta huruf pada kelompok 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah persentasenya hampir 40 persen. Di daerah perdesaan angka buta huruf nampak lebih tinggi dimana pada kelompok 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tertinggi hampir 6 persen penduduk lansia yang buta huruf dan pada kelompok 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah persentasenya lebih dari 55 persen.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>



## Kesehatan Penduduk Lansia

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan). Derajat kesehatan penduduk yang meningkat merupakan salah satu cerminan dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal itu menjadi penting sebab SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam rangka membangun kualitas SDM, berbagai program pemerintah senantiasa memperhatikan dan memberikan prioritas pada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan

bila kesehatan sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

Kondisi kesehatan seseorang berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan tubuhnya. Semakin bertambah umur maka semakin menurun kekuatan dan daya tahan tubuh orang tersebut. Penurunan daya tahan tubuh hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Hal ini terutama dirasakan oleh orang yang berusia lanjut. Lansia merupakan kelompok yang paling banyak menghadapi masalah kesehatan. Penyebab penyakit pada golongan lansia disebabkan karena menurunnya fungsi berbagai alat tubuh karena proses menjadi tua. Sel-sel banyak diganti, produksi hormon menurun dan produksi zat-zat untuk daya tahan tubuh seorang lansia akan mundur. Sejalan dengan itu, aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena tanpa memiliki kesehatan yang prima maka para lansia akan kesulitan melanjutkan aktifitas kehidupannya.

Wujud nyata pemerintah dalam menangani kesehatan lansia tercantum dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil studi lansia ditemukan bahwa di beberapa daerah telah tersedia pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah khusus untuk lansia yaitu posyandu lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama lansia.

Salah satu faktor yang dapat dilakukan oleh penduduk lansia agar dapat melangsungkan kehidupannya tanpa dihadapi dengan masalah kesehatan adalah harus dapat menjaga pola hidup sehat. Namun, kondisi kesehatan penduduk lansia sekarang ini tidak saja hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, namun juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak berupa janin dalam rahim. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

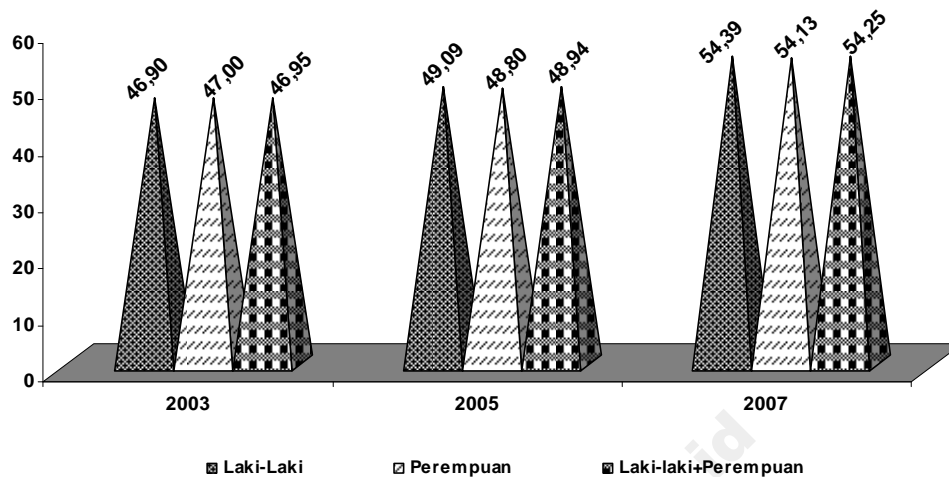
Gambaran secara makro mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dibahas pada bagian ini secara garis besar, gambaran mengenai derajat kesehatan penduduk lansia dilihat dari beberapa indikator kesehatan yang meliputi angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat penduduk lansia.

## **5.1 Keluhan Kesehatan**

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Secara umum digambarkan bahwa derajat kesehatan penduduk lansia cenderung masih rendah. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 bahwa bila dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, penduduk lansia yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir terus mengalami peningkatan dan angkanya masih relatif tinggi. Pada tahun 2003 sebesar 46,95 persen penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan, naik pada tahun 2005 menjadi 48,94 persen dan pada tahun 2007 menjadi sebesar 54,25 persen. Ini berarti dari jumlah keseluruhan penduduk lansia, lebih dari separuhnya mempunyai kondisi kesehatan yang kurang prima selama sebulan terakhir. Keluhan kesehatan ini dialami baik oleh penduduk lansia laki-laki maupun perempuan dan persentase keduanya relatif sama yaitu berturut-turut 54,39 persen dan 54,13 persen pada tahun 2007.

**Gambar 5.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003, 2005, dan 2007**



Sumber: BPS – Susenas 2003, 2005, dan 2007

Tingginya persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi dengan persentase yang bervariasi antara 47,81 – 71,63 persen (Tabel Lampiran 5.1). Tiga provinsi dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi berturut-turut adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (71,63 persen), Nusa Tenggara Timur (69,49 persen) dan Gorontalo (69,20 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Jambi (47,81 persen), Jawa Tengah (48,61 persen) dan Jawa Timur (49,29 persen).

Pola hidup yang dijalani seseorang dari usia balita hingga lansia mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh. Pola hidup yang kurang sehat membawa akibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga akan timbul berbagai keluhan kesehatan terutama pada masa tua. Penyakit atau keluhan kesehatan yang dialami penduduk lansia bermacam-macam, diantaranya yang umum diderita oleh mereka adalah penyakit kronis seperti rheumatik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes mellitus, jatuh, lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, kanker dan kekurangan gizi (Prosiding

Semiloka, "Pengembangan Pusat Pelayanan Lanjut Usia – PKBI"). Hal ini juga sesuai dengan hasil temuan lapangan "Studi Lansia 2007" (lihat Bab 7).

**Tabel 5.a**  
**Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Tahun 2007**

<b>Tipe Daerah/ Jenis Kelamin</b>	<b>Panas</b>	<b>Batuk</b>	<b>Pilek</b>	<b>Asma</b>	<b>Diare</b>	<b>Sakit Kepala Berulang</b>	<b>Sakit Gigi</b>	<b>Lainnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Perkotaan (K)</b>								
Laki-laki	10,53	19,94	14,11	6,45	2,45	8,75	1,59	30,04
Perempuan	9,95	16,91	12,34	4,74	2,05	11,25	1,27	34,54
L+P	10,22	18,31	13,15	5,53	2,23	10,10	1,42	32,47
<b>Perdesaan (D)</b>								
Laki-laki	13,83	23,44	16,35	9,48	2,90	11,55	2,17	32,04
Perempuan	13,02	19,23	13,67	6,38	2,67	14,40	1,80	34,41
L+P	13,40	21,18	14,91	7,81	2,77	13,08	1,97	33,31
<b>K + D</b>								
Laki-laki	12,59	22,12	15,51	8,34	2,73	10,50	1,95	31,29
Perempuan	11,86	18,35	13,16	5,76	2,43	13,20	1,60	34,46
L+P	12,20	20,09	14,25	6,95	2,57	11,95	1,76	32,99

**Sumber: BPS – Susenas 2007**

Gambaran penyakit/keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk lansia tersebut tersaji pada Tabel 5.a. Sebesar 32,99 persen lansia mengalami jenis keluhan kesehatan lainnya yaitu diantaranya yang telah disebutkan di atas. Jenis keluhan yang juga banyak dialami lansia berturut-turut adalah batuk dengan persentase sebesar 20,09 persen, pilek sebesar 14,25 persen, panas sebesar 12,20 persen dan sakit kepala berulang 11,95 persen. Sementara itu, proporsi penduduk lansia yang mengalami jenis keluhan asma, diare dan sakit gigi relatif hanya sedikit yaitu berturut-turut 6,95 persen, 2,57 persen dan 1,76 persen. Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun pada setiap jenis keluhan proporsi penduduk lansia di daerah perdesaan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perkotaan.

Bila dilihat menurut gender, pada umumnya semua jenis keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh penduduk lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan, kecuali

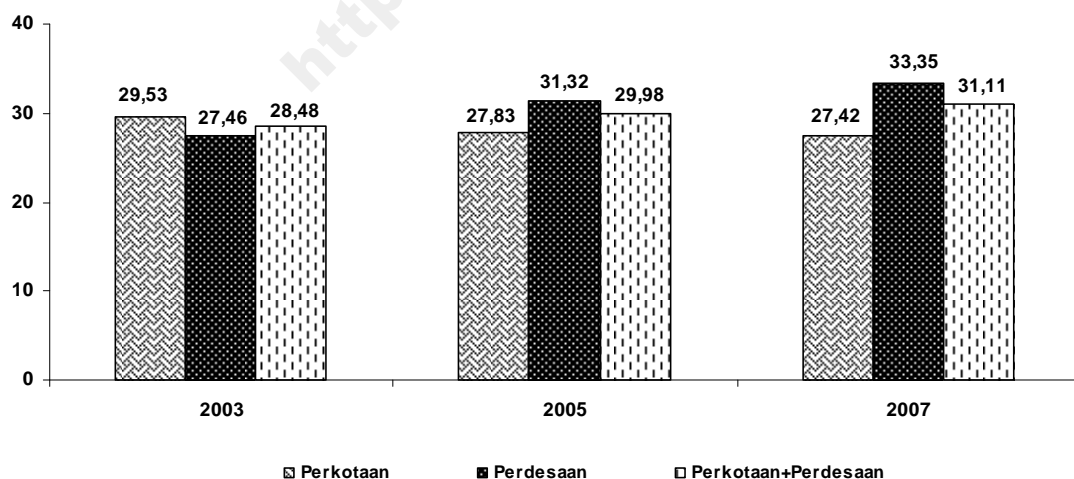
untuk keluhan sakit kepala berulang dan penyakit lainnya. Keadaan ini berlaku pula baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

## 5.2 Angka Kesakitan

Salah satu indikator yang juga digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Seseorang mengalami sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktifitas sehari-harinya yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Kondisi ini dapat terjadi pula pada penduduk lansia. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

**Gambar 5.2**  
**Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah**  
**Tahun 2003, 2005, dan 2007**



Sumber: BPS – Susenas 2003, 2005 dan 2007

Angka kesakitan penduduk lansia yang cenderung meningkat meskipun relatif sedikit selama kurun waktu 2003-2007, merupakan indikasi derajat kesehatan masyarakat

yang memburuk. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2003 sebesar 28,48 persen, meningkat menjadi 29,98 persen pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 31,11 persen pada tahun 2007. Angka kesakitan lansia sebesar 31,11 persen tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 31 orang diantaranya mengalami sakit. Daya tahan tubuh yang menurun sehingga rentan terhadap penyakit merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk lansia yang mengalami sakit.

Kecenderungan meningkatnya angka kesakitan penduduk lansia terlihat nyata di daerah perdesaan, yaitu dari 27,46 persen pada tahun 2003 menjadi 31,32 persen pada tahun 2005 dan naik menjadi 33,35 persen tahun 2007. Sementara itu, di daerah perkotaan berlaku sebaliknya. Angka kesakitan lansia perkotaan pada tahun 2003 sebesar 29,53 persen turun pada tahun 2005 menjadi 27,83 persen dan pada tahun 2007 menjadi 27,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan cenderung masih lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk lansia di perdesaan. Gambaran tersebut ditunjang pula adanya kondisi bahwa angka kesakitan lansia perkotaan lebih rendah dibandingkan lansia perdesaan.

Pada Tabel Lampiran 5.2 dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk lansia bervariasi pada masing-masing provinsi dengan persentase berkisar antara 21,92 – 48,41 persen. Angka kesakitan penduduk lansia dari yang paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (48,40 persen), Gorontalo (47,51 persen) dan Sulawesi Tengah (47,39 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta (21,92 persen), DKI Jakarta (24,12 persen) dan Jawa Tengah (25,57 persen).

### **5.3 Lama Sakit**

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan sehingga terganggu kegiatan (sakit) dapat berakibat tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari. Lama seseorang menderita sakit secara umum mencerminkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Pada sisi lain, lama seseorang menderita sakit juga mencerminkan kualitas kesehatan fisik seseorang yang direfleksikan



melalui daya tahan tubuh. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya.

Dari Tabel 5.b dapat diketahui persentase penduduk lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit. Sebesar 34,19 persen penduduk lansia menderita sakit selama 4-7 hari dan 30,57 persen lansia sakit selama 1-3 hari. Data tersebut memberikan gambaran bahwa dari seluruh penduduk lansia yang sakit, sebagian besar mengalami sakit tidak lebih dari seminggu. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (sekitar 8 sampai dengan 30 hari).

**Tabel 5.b**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah Tahun 2007**

<b>Lama Sakit (Hari)</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 3	33,63	29,05	30,57
4 – 7	31,39	35,59	34,19
8 – 14	9,39	9,45	9,43
15 – 21	5,47	6,43	6,11
22 – 30	20,12	19,48	19,70
<b>T o t a l</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS – Susenas 2007

Bila dilihat menurut tipe daerah, baik daerah perkotaan maupun perdesaan terdapat kesamaan pola dengan pola pada umumnya yaitu penduduk lansia yang mengalami sakit tidak lebih dari satu minggu. Persentase penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan dengan lama hari sakit selama 1--3 hari dan 4--7 hari masing-masing mencapai sebesar 33,63 persen dan 31,39 persen, sedangkan di daerah perdesaan masing-masing tercatat sebesar 29,05 persen dan 35,59 persen. Selain itu juga nampak bahwa secara rata-rata lama hari sakit yang diderita penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan tidak jauh berbeda dengan penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan.

Pada Tabel Lampiran 5.3.3 dapat dilihat lama hari sakit penduduk lansia menurut provinsi. Pada masing-masing provinsi angkanya cukup bervariasi untuk masing-masing kelompok lama hari sakit namun tetap dominan antara 1--3 hari dan 4--7 hari. Pada kelompok lama sakit 1--3 hari, persentasenya berkisar antara 20,13-- 47,62 persen dan pada kelompok lama sakit 4--7 hari persentasenya antara 24,29--43,10 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1--3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi Bali (47,62 persen), DKI Jakarta (41,91 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (38,31 persen). Sebaliknya, pada kelompok lama sakit yang sama, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Maluku (20,13 persen), Nusa Tenggara Barat (20,93 persen) dan Nusa Tenggara Timur (21,08 persen).

#### **5.4 Cara Berobat**

Tidak ada seorangpun yang ingin aktifitasnya terganggu karena menderita sakit. Untuk itu, seseorang yang mengalami sakit biasanya melakukan berbagai cara agar kesehatannya cepat kembali pulih dan dapat melakukan berbagai aktifitas seperti semula. Berobat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan agar tubuh kembali sehat. Kebiasaan serta cara berobat yang dilakukan seseorang, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat.

Seseorang yang peduli terhadap kesehatan akan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya atau meringankan keluhan kesehatannya dengan berbagai cara pengobatan, karena pada dasarnya apabila seseorang menderita sakit maka ia harus segera mendapatkan perawatan dan pengobatan agar cepat sembuh. Berobat atau pengobatan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka mengobati sendiri adalah dengan menggunakan berbagai jenis obat baik obat tradisional, modern, lainnya (selain obat modern dan tradisional) maupun obat campuran (lebih dari satu jenis obat). Tabel 5.c menyajikan persentase penduduk semua umur dan penduduk lansia yang melakukan

cara mengobati sendiri dengan menggunakan berbagai jenis obat. Pada tabel tersebut nampak bahwa penduduk lansia yang melakukan cara penyembuhan dengan berobat sendiri sebagian besar menggunakan jenis obat modern yaitu sebesar 55,08 persen. Urutan selanjutnya yang juga digunakan penduduk lansia dalam rangka berobat sendiri adalah dengan menggunakan obat campuran sebesar 31,36 persen, obat tradisional 12,32 persen dan obat lainnya 1,23 persen.

**Tabel 5.c**  
**Persentase Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah Tahun 2007**

Jenis Obat yang Digunakan	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	7,06	9,08	8,26	11,62	12,71	12,32
Modern	73,11	64,25	67,84	58,99	52,91	55,08
Lainnya	1,21	1,14	1,16	1,42	1,13	1,23
Campuran	18,63	25,53	22,74	27,96	33,25	31,36
<b>T o t a l</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS – Susenas 2007

Penggunaan obat modern tidak saja diminati oleh penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan (58,99 persen) melainkan juga banyak diminati oleh lansia yang tinggal di daerah perdesaan (52,91 persen). Di samping itu, untuk penggunaan jenis obat lainnya (selain obat tradisional, modern dan campuran) berlaku pola yang sama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Pada Tabel 5.c juga dapat dilihat penggunaan berbagai jenis obat dalam rangka mengobati sendiri oleh penduduk semua umur. Seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk lansia, penduduk pada umumnya sebagian besar (67,84 persen) menggunakan obat modern untuk mengobati sakitnya. Urutan selanjutnya yang juga digunakan penduduk semua umur dalam rangka berobat sendiri mempunyai pola yang sama dengan lansia yaitu dengan menggunakan obat campuran sebesar 22,74 persen, obat tradisional 8,26 persen dan obat lainnya 1,16 persen.

Banyaknya penduduk lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern berada hampir di semua provinsi dengan persentase berkisar antara 33,73 – 69,71 persen. Tiga provinsi yang mempunyai persentase tertinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Utara (69,71 persen), Kalimantan Selatan (65,49 persen) dan Jawa Barat (63,94 persen). Sebaliknya, tiga provinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Provinsi Bali (33,73 persen), Papua Barat (40,89 persen) dan Sumatera Barat (44,36 persen).

Cara lain yang dapat dilakukan seseorang untuk mengobati sakit yang dideritanya selain dengan berobat sendiri adalah dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah yang bersangkutan. Tabel 5.d menampilkan proporsi penduduk semua umur dan penduduk lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak didatangi oleh penduduk lansia untuk berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas/puskesmas pembantu (pustu) sebesar 33,66 persen, kemudian tempat praktek tenaga kesehatan (nakes) sebesar 31,74 persen dan praktek dokter sebesar 29,26 persen.

**Tabel 5.d**  
**Proporsi Penduduk Semua Umur dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan**  
**Menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah Tahun 2007**

Tempat Berobat	Penduduk Semua Umur			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit pemerintah	7,61	4,52	5,84	12,26	5,22	7,92
Rumah sakit swasta	6,32	1,92	3,80	6,90	2,24	4,03
Praktek Dokter	39,01	20,92	28,67	37,90	23,88	29,26
Puskesmas/Pustu	33,19	39,54	36,82	30,43	35,67	33,66
Praktek tenaga kesehatan	17,85	37,03	28,82	18,54	39,95	31,74
Pengobatan tradisional	1,50	1,92	1,74	1,71	1,93	1,85
Lainnya	2,84	3,34	3,12	3,26	3,41	3,35

**Sumber : BPS – Susenas 2007**

Banyaknya penduduk lansia yang berobat ke puskesmas/pustu diduga karena tempat berobat ini umumnya mudah diakses karena lebih dekat dengan rumah, memberikan pelayanan gratis (Askeskin) dan Askes, lebih murah dan tenaga kesehatan selalu memberi fasilitas serta mementingkan/mendahulukan lansia dalam pelayanan kesehatan (Studi Profil dan Perlindungan Lansia Perempuan di Jawa Timur, Meneg Pemberdayaan Perempuan).

Bila ditinjau berdasarkan tipe daerah terdapat pola yang berbeda dalam memilih jenis fasilitas/tempat berobat untuk berobat jalan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dengan penduduk lansia di daerah perdesaan. Jenis fasilitas/tempat berobat jalan yang paling diminati oleh penduduk lansia di daerah perkotaan berturut-turut adalah praktek dokter (37,90 persen), puskesmas/pustu (30,43 persen) dan praktek tenaga kesehatan (18,54 persen). Sementara itu, penduduk lansia di daerah perdesaan lebih banyak berobat jalan pada praktek tenaga kesehatan (39,95 persen), kemudian puskesmas/pustu (35,67 persen) dan praktek dokter (23,88 persen). Preferensi ini menunjukkan bahwa tempat berobat di praktek dokter lebih diminati oleh penduduk lansia di daerah perkotaan dibandingkan mereka yang berada di perdesaan karena umumnya berobat di praktek dokter memerlukan biaya yang lebih mahal dan lebih mudah diakses oleh penduduk yang berada di daerah perkotaan. Di sisi lain, penduduk lansia yang berada di perdesaan lebih mudah mengakses tenaga kesehatan atau puskesmas karena fasilitas tersebut sudah sampai ke pelosok desa dan biayanya lebih terjangkau.

Selanjutnya pada Tabel 5.d juga dapat dilihat bahwa fasilitas berobat puskesmas/pustu tidak hanya diminati oleh penduduk lansia saja melainkan juga oleh penduduk pada umumnya (penduduk semua umur). Proporsi penduduk semua umur yang berobat jalan ke puskesmas/pustu sebesar 36,82 persen. Begitu pula dengan fasilitas tenaga kesehatan dan praktek dokter yaitu berturut-turut 28,82 persen dan 28,67 persen.

Penduduk lansia yang sakit dan melakukan usaha penyembuhan dengan berobat ke puskesmas/pustu terjadi pada sebagian besar provinsi di Indonesia kecuali provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Provinsi Bali, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 5.7.3. Penduduk lansia yang berdomisili di tujuh provinsi tersebut lebih banyak yang berobat jalan ke praktek dokter. Provinsi yang lansianya berobat ke puskesmas/pustu dengan proporsi paling tinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Irian Jaya Barat

(75,14 persen), Papua (70,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (65,91 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah secara berturut-turut adalah Provinsi Sumatera Utara (24,53 persen), Lampung (24,28 persen) dan DKI Jakarta (22,63 persen).

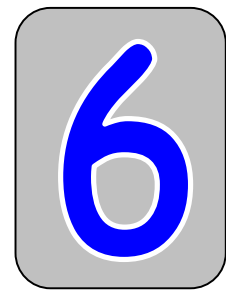
<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>



## Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan pada bidang ketenagakerjaan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penduduk muda yang produktif, melainkan juga diarahkan bagi mereka yang sudah memasuki masa lansia namun masih potensial yaitu masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Memberdayakan penduduk lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya menunjang kemandirian lansia, tidak saja dari aspek ekonomis, tetapi sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya

dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU Lansia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Sejalan dengan itu, penduduk lansia juga diberikan hak mendapatkan pelayanan kesempatan kerja seperti yang tercantum dalam UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2) c.

Selanjutnya pada UU tersebut Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Selain lansia potensial ada pula lansia yang tidak potensial yaitu lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Wirakartakusumah, 1994 bahwa secara ekonomis, penduduk lansia dapat diklasifikasikan atas tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam kaitan ini penduduk lansia dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu (i) kelompok lansia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (ii) kelompok lansia yang produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain; (iii) kelompok lansia yang miskin (*destitute*), yaitu termasuk mereka yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan kehidupannya.

Pada kenyataannya dari ketiga kelompok tersebut masih cukup banyak penduduk lansia yang tetap bekerja keras untuk mendapatkan hidup secara layak meskipun sudah uzur. Padahal, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyogianya tinggal menikmati hasil dari segenap upaya dan jerih payah yang dilakukannya semasa mereka masih muda.

Pada bagian ini akan dilihat gambaran secara makro mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Gambaran tersebut secara rinci akan dilihat dari berbagai indikator ketenagakerjaan yang mencakup tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja.

## **6.1 Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Lansia**

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan dan termasuk mereka yang putus asa mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, yaitu mereka yang memiliki kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti tidak mampu bekerja, pensiun, dsb.

Penduduk lansia yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan lansia potensial. Mereka tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian tidaklah sepenuhnya benar jika dikatakan lansia tidak produktif (e-psikologi, 2006).

Banyaknya lansia yang masih produktif tercermin dari hasil Sakernas 2007, yaitu dari keseluruhan penduduk lansia sekitar 47,83 persen diantaranya masih bekerja (Tabel 6.a). Kondisi yang sama terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu masing-masing 37,14 persen dan 54,35 persen. Mayoritas penduduk lansia yang bekerja terutama terlihat pada lansia laki-laki, sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga. Tingginya partisipasi penduduk lansia yang bekerja menunjukkan bahwa peran penerimaan dari bekerja (pendapatan) merupakan sumber yang sangat penting dalam menunjang kehidupan mereka. Hasil studi lansia juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia masih bekerja. Alasan mereka bekerja antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan.

**Tabel 6.a**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Tahun 2007**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Bekerja	Penganggur	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>- Penduduk 15 Tahun Ke atas</b>					
<b>Perkotaan</b>					
Laki-laki	70,92	8,92	1,89	18,26	100,00
Perempuan	39,50	6,68	39,41	14,42	100,00
Laki-laki+Perempuan	55,11	7,79	20,77	16,33	100,00
<b>Perdesaan</b>					
Laki-laki	81,60	5,14	1,28	11,98	100,00
Perempuan	49,08	4,40	35,88	10,64	100,00
Laki-laki+Perempuan	65,43	4,77	18,48	11,31	100,00
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>					
Laki-laki	76,94	6,79	1,55	14,73	100,00
Perempuan	44,84	5,41	37,44	12,31	100,00
Laki-laki+Perempuan	60,89	6,10	19,49	13,52	100,00
<b>- Penduduk Lansia</b>					
<b>Perkotaan</b>					
Laki-laki	50,07	1,53	10,01	38,39	100,00
Perempuan	25,12	0,40	50,26	24,22	100,00
Laki-laki+Perempuan	37,14	0,94	30,87	31,04	100,00
<b>Perdesaan</b>					
Laki-laki	71,62	0,64	4,53	23,21	100,00
Perempuan	37,42	0,41	38,63	23,54	100,00
Laki-laki+Perempuan	54,35	0,53	21,75	23,38	100,00
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>					
Laki-laki	63,59	0,97	6,57	28,86	100,00
Perempuan	32,68	0,41	43,11	23,80	100,00
Laki-laki+Perempuan	47,83	0,68	25,21	26,28	100,00

Sumber: BPS - Sakernas 2007

Penduduk lansia yang bekerja lebih kecil proporsinya bila dibandingkan dengan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Hal ini wajar mengingat penduduk 15 tahun ke atas termasuk penduduk yang tergolong usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar mereka bekerja karena lebih bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.

Tabel 6.a juga menyajikan gambaran mengenai penduduk lansia yang menganggur yaitu lansia yang saat ini masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, tetapi tidak termasuk yang putus asa mencari pekerjaan. Hanya sekitar 0,68 persen lansia yang menganggur. Rendahnya persentase lansia yang menganggur sesuai juga dengan hasil studi lansia yang mengatakan bahwa umumnya lansia tidak suka menganggur. Lebih baik mereka bekerja, sedangkan bagi lansia yang sudah lemah fisiknya hanya melakukan kegiatan lainnya yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja.

Bila dilihat penganggur pada penduduk 15 tahun ke atas proporsinya lebih besar (6,10 persen) dibandingkan penduduk lansia. Definisi penganggur pada penduduk 15 tahun ke atas adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah dapat pekerjaan namun belum mulai bekerja termasuk yang putus asa mencari pekerjaan.

Di sisi lain, Tabel 6.a juga menampilkan gambaran mengenai kegiatan penduduk lansia yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja. Bila dibandingkan antara penduduk lansia yang mengurus rumah tangga dengan kegiatan lainnya, lebih banyak lansia yang melakukan kegiatan lainnya yaitu sebesar 26,28 persen, sedangkan mengurus rumah tangga sebesar 25,21 persen. Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya pada lansia mencakup antara lain kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Sementara itu, persentase kegiatan lainnya pada penduduk 15 tahun ke atas sebesar 13,52 persen, meliputi kegiatan lainnya seperti olahraga, kursus, hiburan dan sejenisnya termasuk kegiatan bersekolah. Proporsi penduduk lansia yang melakukan kegiatan lainnya lebih besar daripada penduduk 15 tahun ke atas karena sebagian besar lansia termasuk kelompok penduduk non produktif. Secara fisik kondisi lansia juga sudah

melemah sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan lainnya dibandingkan penduduk pada umumnya.

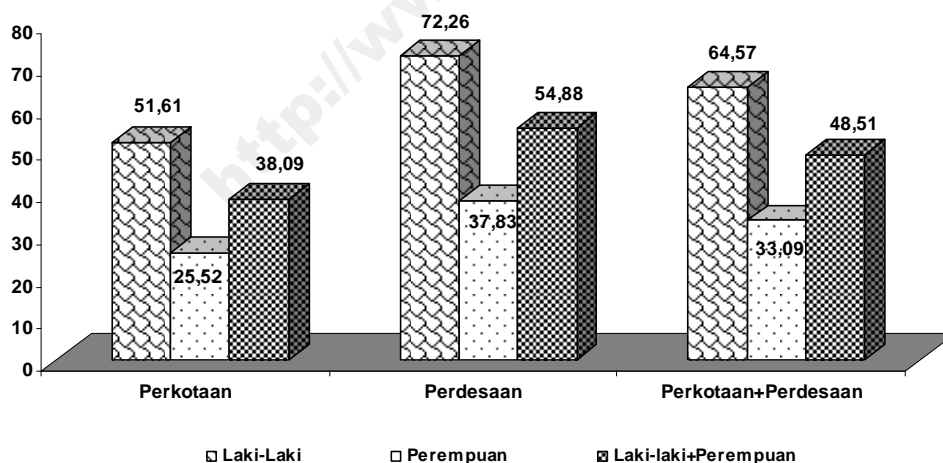
## 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok lansia, TPAK merupakan penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi, yaitu proporsi lansia yang bekerja dan lansia yang mencari kerja terhadap penduduk lansia itu sendiri.

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa TPAK penduduk lansia pada tahun 2007 adalah sebesar 48,51 persen. TPAK penduduk lansia di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan (54,88 persen berbanding 38,09 persen). Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK penduduk lansia laki-laki jauh lebih tinggi (64,57 persen) dibanding dengan penduduk lansia perempuan (33,09 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

**Gambar 6.1**

### TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007

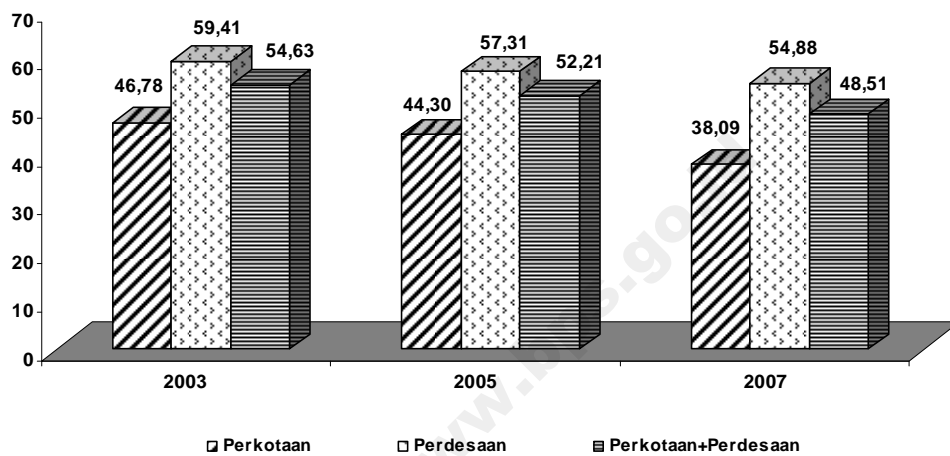


Sumber: BPS - Sakernas 2007

Tabel Lampiran 6.1 menunjukkan bahwa TPAK untuk penduduk lansia pada masing-masing provinsi nampak bervariasi dengan persentase berkisar antara 31,67–59,09 persen. TPAK penduduk lansia paling tinggi berturut-turut terdapat di Provinsi Papua (59,09 persen), Nusa Tenggara Timur (59,06 persen) dan Irian Jaya Barat (58,56

persen). Sementara itu, TPAK paling rendah berturut-turut terdapat di DKI Jakarta (31,67 persen), Kalimantan Timur (35,21 persen) dan Kepulauan Riau (36,15 persen). Di daerah perkotaan, TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi berkisar antara 22,11–53,76 persen, sedangkan di daerah perdesaan angka tersebut lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 41,33–68,09 persen.

**Gambar 6.2**  
**TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah Tahun 2003, 2005, dan 2007**



Sumber: BPS - Sakernas 2003, 2005, dan 2007

Perkembangan TPAK penduduk lansia dalam kurun waktu 2003, 2005 dan 2007 dapat dilihat pada Gambar 6.2. Selama kurun waktu tersebut, TPAK lansia terus mengalami penurunan. TPAK penduduk lansia sebesar 54,63 persen pada tahun 2003, turun menjadi 52,21 persen pada tahun 2005 dan turun lagi menjadi 48,51 persen pada tahun 2007.

### 6.3 Lapangan Usaha

Lapangan usaha dalam ulasan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalan, industri, listrik/gas/air dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya.



Ketiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Tabel 6.c menampilkan persentase pekerja penduduk 15 tahun ke atas dan pekerja lansia berdasarkan kelompok lapangan usaha. Dari tabel tersebut tercermin bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar pekerja lansia untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Dari seluruh penduduk lansia yang bekerja, sebesar 66,75 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan penduduk lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa dan sektor industri masing-masing sebesar 25,22 persen dan 8,03 persen.

Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Disamping itu, keadaan ini juga sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memang merupakan pekerja di sektor pertanian. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.b, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian lebih dari 40 persen dan sisanya bekerja pada sektor jasa-jasa (39,96 persen) dan industri (18,80 persen).

**Tabel 6.b**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja**  
**Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah Tahun 2007**

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk 15 Tahun Ke atas			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	11,00	61,23	41,24	34,34	80,27	66,75
Industri (M)	25,53	14,36	18,80	12,15	6,31	8,03
Jasa – Jasa (S)	63,47	24,41	39,96	53,51	13,43	25,22
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS - Sakernas 2007

Bila dilihat menurut tipe daerah, terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia di daerah perkotaan dengan perdesaan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.b. Sama halnya dengan penduduk pada umumnya (penduduk 15 tahun ke atas), mayoritas para lansia di perkotaan bekerja di kelompok sektor jasa (53,51 persen), kemudian diikuti oleh sektor pertanian (34,34 persen) dan industri (12,15 persen). Sementara itu, lebih dari 80 persen lansia yang berada di perdesaan bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sektor jasa-jasa (13,43 persen) dan industri (6,31 persen).

Tabel Lampiran 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi. Semua provinsi kecuali di DKI Jakarta menunjukkan pola yang serupa dengan pola secara nasional dengan sektor pertanian (berkisar antara 34,89–85,07 persen), jasa-jasa (6,57–47,64 persen) dan industri (3,30–17,81 persen) berturut-turut merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia. Sementara itu, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk lansia di DKI Jakarta adalah jasa-jasa sebesar 89,01 persen, dan sisanya berturut-turut sektor industri (8,94 persen) dan pertanian (2,05 persen).

Pola struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan secara nasional sejalan dengan sektor yang diandalkan oleh penduduk lansia di daerah perkotaan pada masing-masing provinsi, yaitu terbesar pada sektor jasa, setelah itu disusul oleh sektor pertanian dan industri, kecuali di Provinsi Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Penduduk lansia perkotaan di lima provinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 6.2.1. Sementara itu, pada Tabel Lampiran 6.2.2 nampak bahwa sektor pertanian masih merupakan andalan utama penduduk lansia di daerah perdesaan pada semua provinsi, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri.

Salah satu faktor yang menentukan struktur pekerjaan penduduk lansia adalah pendidikan yang ditamatkan. Pada bab terdahulu (bab 4) dijelaskan bahwa persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi. Sebagian besar penduduk lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka harus bersaing dengan penduduk muda yang baru masuk ke pasar kerja. Sejalan dengan itu, sebagian besar lansia hanya dapat bekerja pada pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian.

Tabel 6.c menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin rendah, persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung semakin besar. Lebih dari 90 persen penduduk lansia yang berpendidikan SD ke bawah bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SMA ke atas hanya sekitar 2,33 persen yang bekerja di sektor pertanian. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini

yang jauh lebih mudah (bahkan tanpa syarat pendidikan) dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi/tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

**Tabel 6.c**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja**  
**Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha**  
**Tahun 2007**

Pendidikan yang Ditamatkan	Penduduk 15 Tahun Ke atas			Penduduk Lansia		
	Pertanian	Industri	Jasa-jasa	Pertanian	Industri	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/blm pernah sekolah	9,56	2,65	2,40	25,73	24,09	16,78
Tdk tamat SD	20,11	8,93	7,63	30,31	24,31	22,79
SD	46,88	37,86	28,87	34,17	35,58	33,48
SMP	16,03	23,29	19,66	7,45	9,90	14,70
SM	7,03	23,42	28,15	1,95	4,80	8,74
PT	0,39	3,84	13,30	0,38	1,32	3,51
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS - Sakernas 2007

Pada Tabel 6.c juga ditampilkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelompok lapangan usaha. Secara umum, sebagian besar penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian berpendidikan tamat SD.

#### 6.4 Status Pekerjaan

Status pekerjaan menunjukkan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Dari keseluruhan jumlah penduduk lansia yang bekerja, pada umumnya lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 44,73 persen, sedangkan lansia yang berusaha sendiri sebesar 22,69 persen dan yang bekerja dengan tidak dibayar sebesar 14,00 persen (Tabel 6.d). Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih dibawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas pertanian (7,07 persen), buruh/karyawan (5,91 persen), berusaha dibantu buruh tetap (3,76 persen) dan pekerja bebas non pertanian (1,83 persen).

Bila dilihat menurut tipe daerah terdapat perbedaan pola status pekerjaan antara penduduk lansia perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, penduduk lansia yang bekerja dengan berusaha sendiri lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap (33,56 persen berbanding 30,17 persen), sedangkan di perdesaan berlaku sebaliknya. Selain itu, banyak pula penduduk lansia perkotaan yang menjadi buruh/karyawan, sedangkan di perdesaan lebih banyak yang menjadi pekerja tidak dibayar.

**Tabel 6.d**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Tahun 2007**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Ber- usaha sendiri	Ber- usaha dibantu buruh tdk tetap	Ber- usaha dibantu buruh tetap	Buruh/ karya- wan	Pekerja bebas pertani- an	Pekerja bebas non per- tanian	Pekerja tidak di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Perkotaan</b>								
Laki-laki	30,43	36,00	6,87	14,43	5,00	3,38	3,89	100,00
Perempuan	39,37	19,36	3,33	8,53	6,14	2,37	20,91	100,00
Laki-laki+Perempuan	33,56	30,17	5,63	12,36	5,40	3,02	9,86	100,00
<b>Perdesaan</b>								
Laki-laki	15,86	64,28	3,81	3,63	6,94	1,61	3,88	100,00
Perempuan	22,46	25,50	1,44	2,46	9,33	0,82	37,98	100,00
Laki-laki+Perempuan	18,15	50,80	2,99	3,23	7,77	1,33	15,73	100,00
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>								
Laki-laki	20,13	55,98	4,71	6,80	6,37	2,13	3,88	100,00
Perempuan	27,47	23,68	2,00	4,26	8,39	1,28	32,93	100,00
Laki-laki+Perempuan	22,69	44,73	3,76	5,91	7,07	1,83	14,00	100,00

**Sumber: BPS - Sakernas 2007**

Di sisi lain bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk lansia laki-laki lebih banyak bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu sebesar 55,98 persen. Umumnya mereka bekerja dibantu oleh anggota keluarga seperti istri atau anak mereka. Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki yang tinggal di daerah perdesaan (64,28 persen) maupun mereka yang tinggal di daerah perkotaan (36,00 persen). Sementara itu, penduduk lansia perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar yaitu sebesar 32,93 persen. Sifat pekerjaan ini cenderung adalah membantu keluarga di sawah/kebun atau pada usaha keluarga lainnya, seperti

yang banyak terjadi di daerah perdesaan (37,98 persen), sedangkan di daerah perkotaan lebih banyak lansia perempuan yang bekerja dengan berusaha sendiri (39,37 persen).

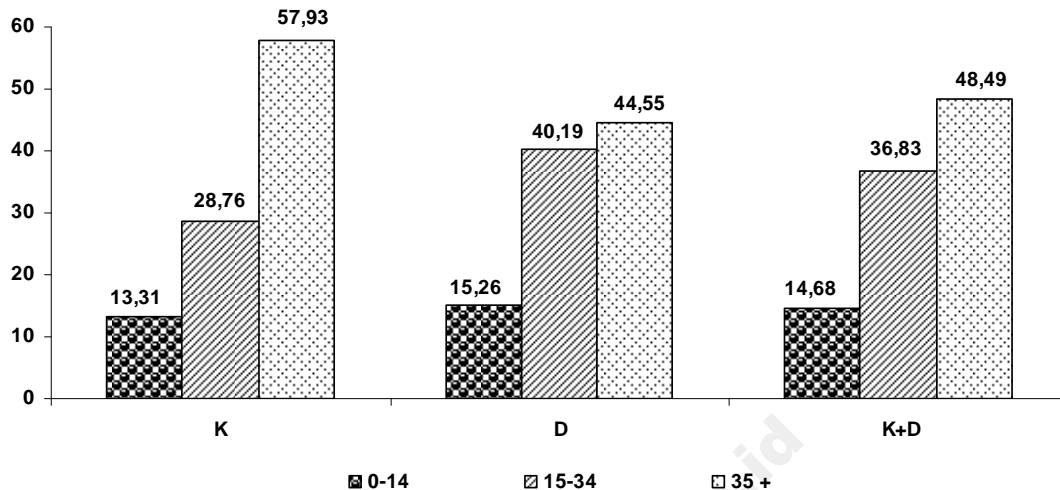
Bila dilihat menurut provinsi, sebagian besar provinsi mempunyai struktur status pekerjaan yang sama dengan nasional, yaitu mayoritas penduduk lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh seperti yang ditunjukkan pada Tabel Lampiran 6.3.3.

## **6.5 Jumlah Jam Kerja**

Produktifitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyogianya, penduduk lansia yang bekerja dapat bekerja dengan jam kerja hanya paruh waktu mengingat kondisi tubuhnya yang mulai melemah. Namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu. Hal ini menggambarkan lansia cenderung masih mempunyai produktifitas yang tinggi dalam bekerja demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.3, dari seluruh penduduk lansia yang bekerja, sekitar 48,49 persen diantaranya bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 36,83 persen dan sisanya adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu yaitu sebesar 14,68 persen.

**Gambar 6.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah**  
**dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007**



Sumber: BPS - Sakernas 2007

Gambar 6.3 juga menunjukkan bahwa penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun proporsinya lebih besar di perkotaan (57,93 persen) dibandingkan perdesaan (44,55 persen). Sebaliknya, persentase lansia di daerah perdesaan yang bekerja selama 0 – 14 jam dan 15 – 34 jam relatif lebih tinggi dibanding dengan mereka yang berada di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan sektor dominan di perdesaan adalah pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor formal (jasa dan industri).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Tabel 6.e menunjukkan bahwa, pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai 53,45 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 39,21 persen.

**Tabel 6.e**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja**  
**Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2007**

Jumlah Jam Kerja	Penduduk 15 Thn Ke atas			Penduduk Lansia		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	5,52	11,11	7,58	11,99	19,71	14,68
15 – 34	20,78	32,70	25,17	34,56	41,07	36,83
35 +	73,70	56,19	67,26	53,45	39,21	48,49
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS - Sakernas 2007

Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dan 15-34 jam proporsinya lebih tinggi dari lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam sebesar 19,71 persen persen dan jumlah jam kerja 15-34 jam sebesar 41,07 persen. Sementara itu, lansia laki-laki yang bekerja 0-14 jam sebesar 11,99 persen dan yang bekerja 15-34 jam sebesar 34,56 persen. Untuk penduduk 15 tahun ke atas, baik penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai pola yang sama dalam bekerja yaitu sebagian besar dari mereka bekerja dengan jam kerja penuh yaitu masing-masing 73,70 persen dan 56,19 persen. Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh hampir terjadi di semua provinsi, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat (Tabel lampiran 6.4.3).

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>



## Hasil Studi Lansia

Secara umum tujuan studi mendalam lansia adalah ingin melihat gambaran lebih rinci mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk lansia dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Adapun secara khusus studi ini dimaksudkan untuk memperkaya informasi yang bersifat kualitatif, menjawab fenomena dari data lansia yang dihasilkan Susenas dan Sakernas yang bersifat kuantitatif dan sebagai pendukung informasi dari data-data tersebut.

Studi ini diharapkan akan dapat membantu memperluas gambaran lansia sehingga program pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan lansia dapat mengenai sasaran.

## 7.1 Metodologi

### 7.1.1 Cakupan Wilayah Pencacahan

Pelaksanaan studi mendalam lansia mencakup 100 rumah tangga sampel yang tersebar di 5 (lima) provinsi, dengan rincian 20 rumah tangga sampel per provinsi. Rumah tangga sampel yang diambil adalah yang mempunyai anggota rumah tangga berumur 60 tahun ke atas (lansia). Adapun kelima provinsi tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumatera Selatan	Palembang	Ilir Timur I	20 Ilir DI
2.	DI Yogyakarta	Sleman	Minggir	Sendang Sari
			Moyudan	Sumber Rahayu
3.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Batu Layar	Sandik
4.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Banjar Tengah	Seberang Mesjid
5.	Sulawesi Selatan	Gowa	Bantonmpo Selatan	Sengka

### 7.1.2 Cara Pemilihan Responden

Pemilihan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan berdasarkan pada banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas berdasarkan data Susenas 2007. Prosedur pemilihan rumah tangga dalam studi ini menggunakan metode purposive. Petugas bersama dengan penunjuk jalan yang ditunjuk mendatangi ketua RT di desa terpilih untuk menanyakan rumah tangga yang ada penduduk berumur 60 tahun ke atasnya. Berdasarkan informasi dari ketua RT ini, petugas mendatangi sebanyak 20 rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara terhadap seluruh responden yang merupakan penduduk berumur 60 tahun ke atas di rumah tangga terpilih dengan menggunakan daftar yang telah disediakan.

### 7.1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara petugas lapangan mendatangi setiap rumah tangga yang terpilih dalam studi lansia dan mewawancarai langsung

responden yang bersangkutan (anggota rumah tangga berumur 60 tahun ke atas) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

## **7.2 Hasil Studi Lansia**

1. Berdasarkan hasil studi lansia, dari 20 rumah tangga terpilih terdapat jumlah lansia sekitar 23–33 orang. Dari jumlah lansia tersebut sekitar 12–19 orang lansia berperan sebagai kepala rumah tangga. Beberapa alasan mereka berperan sebagai kepala keluarga adalah karena masih menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, rumah yang ditempati milik lansia, dan masih ada anak yang belum berkeluarga (mandiri).
2. Tingkat pendidikan lansia masih rendah. Sebagian besar lansia yang diwawancarai mengatakan tidak pernah sekolah, dengan alasan pada saat mereka berada di usia sekolah adalah pada masa penjajahan Belanda/Jepang. Saat itu kehidupan mereka sangat kekurangan sehingga tidak ada biaya untuk sekolah dan akhirnya banyak dari mereka yang bekerja membantu orang tua. Alasan lain adalah fasilitas sekolah masih jarang dan jauh dari tempat tinggal. Selain itu banyak orang tua yang melarang anak mereka bersekolah (terutama untuk anak perempuan) karena takut diculik atau dibunuh oleh penjajah. Walaupun mereka sekolah, rata-rata pendidikan yang ditamatkan hanya sampai jenjang pendidikan dasar bahkan banyak yang tidak tamat. Sedikit sekali lansia yang menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan menengah dan atas. Bagi lansia yang tidak pernah sekolah umumnya tidak bisa membaca dan menulis, beberapa dari mereka ada yang pernah ikut kejar paket tetapi tidak sampai selesai.
3. Umumnya para lansia menderita penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, sesak nafas/asma, darah rendah, diabetes, kencing batu, dan ambeien. Sementara itu, penyakit yang sering diderita oleh lansia adalah nyeri tulang, pegal-pegal, maag, pusing, batuk, pilek, flu, dan panas. Jenis obat yang banyak digunakan oleh lansia adalah obat modern. Fasilitas pengobatan yang biasa didatangi oleh lansia untuk mengobati penyakitnya beragam. Ada yang berobat ke rumah sakit, puskesmas, pusku, dokter praktek, dan mantri kesehatan.

4. Kegiatan sehari-hari para lansia umumnya relatif sama. Kegiatan dimulai pada waktu subuh untuk melakukan sholat subuh, kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga, sarapan dan bagi lansia yang bekerja pada jam 7 pagi sudah siap-siap untuk berangkat kerja ke sawah. Sementara itu, bagi lansia yang tidak bekerja hanya tidur-tiduran (istirahat santai) atau mengobrol dengan keluarga/tetangga, karena pada umumnya mereka yang tidak bekerja adalah lansia yang sudah lemah, tidak bertenaga dan sakit-sakitan. Siang hari mereka sholat dan makan siang. Di beberapa daerah, sebagian besar lansia melakukan sholat lima waktu berjamaah di mesjid. Setelah itu, sampai sore lansia hanya duduk-duduk santai sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang lain atau menjaga cucu. Kegiatan sehari-hari lansia laki-laki dan perempuan relatif sama. Perbedaannya hanyalah pada lansia perempuan yang tidak bekerja, kegiatan mereka dari bangun pagi adalah mengurus rumah tangga, memasak, menjaga/mengasuh cucu, dan menonton televisi. Tidur malam dilakukan lansia antara jam 9 sampai 10 malam. Pada umumnya lansia masih melakukan kebiasaan rutin tanpa bantuan orang lain seperti makan, mandi bahkan ada yang masih memasak sendiri. Mereka umumnya tidak merokok, namun jarang sekali yang melakukan olahraga.
5. Saat ini sebagian besar lansia masih bekerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, menjaga kesehatan badan, dan mengisi waktu luang. Pada dasarnya mereka tidak suka berdiam diri tanpa ada yang dikerjakan. Walaupun hanya mengisi waktu luang, namun penghasilan yang diperoleh mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar lansia bekerja di sektor pertanian, demikian juga riwayat pekerjaan mereka dahulunya adalah petani. Jenis pekerjaan yang dilakukan pada umumnya adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat dengan jam kerja yang hanya separuh waktu karena mereka menyadari sudah kurang tenaganya. Ada juga lansia yang saat ini tidak bekerja karena kondisi kesehatan. Untuk lansia yang tidak bekerja, pada umumnya dulu mereka bekerja sebagai buruh tani, tukang bangunan dan buruh serabutan, namun ada pula yang dulunya pedagang, pegawai negeri dan lain-lain.

6. Kebersamaan para lansia dengan anggota rumah tangga sangat baik dan dekat. Sebagian besar lansia memiliki kebersamaan yang cukup erat dengan art lainnya. Setiap hari mereka makan bersama, menonton televisi, dan mengobrol. Kebanyakan lansia memiliki aktifitas di luar rumah seperti berkumpul dengan tetangga, mengikuti kegiatan pengajian, arisan, ronda, dan gotong royong.
7. Sebagian besar lansia tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan perlindungan sosial khusus untuk lansia seperti pelayanan prioritas dalam penggunaan fasilitas umum di puskesmas atau rumah sakit, jalan raya, kendaraan umum (diskon kereta api, pesawat terbang, dll). Bantuan sosial dari pemerintah yang pernah diterima oleh rumah tangga lansia adalah raskin, askeskin dan BLT.
8. Sebagian besar lansia tidak mengetahui keberadaan panti jompo/panti werdha, namun setelah dijelaskan barulah mereka mengerti tentang panti jompo. Ketika lansia ditanya apakah ada keinginan untuk tinggal di panti, semua lansia menolak. Alasannya mereka lebih baik tinggal di rumah sendiri dan berkumpul dengan anak cucu/sanak saudara meskipun dengan hidup yang serba kekurangan. Begitu pula dengan tanggapan art lain seperti anak cucu/sanak saudara, mereka bereaksi keras menolak bila orang tua mereka tinggal di panti jompo karena mereka ingin mengurus sendiri orang tua mereka. Mereka menganggap bahwa menempatkan lansia di panti jompo sama dengan menelantarkannya.
9. Lansia umumnya bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri, terutama bagi mereka yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga dan masih bekerja. Namun, bila ada kesulitan mereka minta tolong dan curhat kepada anak mereka. Walaupun tidak tinggal dalam satu rumah namun umumnya rumah mereka berdekatan dalam satu desa. Ada juga lansia yang seluruh hidupnya menjadi tanggung jawab anaknya termasuk biaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi lansia yang tinggal sebatangkara mendapatkan pertolongan dari tetangga terdekat.
10. Salah satu program pemerintah yang merupakan wujud kepedulian terhadap lansia adalah posyandu lansia. Kegiatan posyandu lansia setiap bulan sekali berupa cek kesehatan (pengukuran tensi darah dan timbang badan), pemberian obat, pemberian makanan tambahan dan pemberian kartu menuju sehat (KMS) lansia untuk rekap

kesehatan. Program ini disambut baik oleh lansia, karena selain cek kesehatan dan pengobatan gratis juga sebagai ajang pertemuan (curhat) antar lansia. Peserta posyandu lansia dimulai pada usia pra lansia yaitu 40--54 tahun dan lansia 55 tahun ke atas.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 3.1.1**  
**Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2007**

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Laki - Laki	
	< 15	15-35	36-59	60+	Jumlah	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	35,43	35,61	22,70	6,27	100,00	2.079.985
Sumatera Utara	37,28	32,25	24,86	5,61	100,00	6.388.728
Sumatera Barat	36,09	31,00	25,18	7,73	100,00	2.297.505
R i a u	35,49	36,13	23,61	4,77	100,00	2.612.382
J a m b i	33,48	35,93	24,75	5,84	100,00	1.386.922
Sumatera Selatan	32,16	35,72	25,62	6,50	100,00	3.568.321
Bengkulu	33,79	35,20	24,33	6,68	100,00	815.025
Lampung	32,85	33,68	25,98	7,49	100,00	3.743.322
Bangka Belitung	31,16	38,29	24,70	5,85	100,00	567.044
Kepulauan Riau	33,10	38,10	24,64	4,16	100,00	671.801
DKI Jakarta	26,57	39,71	27,74	5,97	100,00	4.517.514
Jawa Barat	32,19	32,68	27,31	7,83	100,00	20.353.242
Jawa Tengah	30,19	29,76	29,78	10,28	100,00	16.118.383
DI Yogyakarta	24,03	33,78	29,56	12,62	100,00	1.699.402
Jawa Timur	28,16	30,44	31,58	9,83	100,00	17.989.773
Banten	33,53	36,28	25,26	4,93	100,00	4.726.267
B a l i	28,67	31,47	29,61	10,24	100,00	1.732.693
Nusa Tenggara Barat	36,25	32,39	23,84	7,51	100,00	2.040.919
Nusa Tenggara Timur	41,63	28,84	22,11	7,42	100,00	2.212.359
Kalimantan Barat	34,65	34,24	24,77	6,35	100,00	2.141.978
Kalimantan Tengah	33,22	36,20	24,87	5,70	100,00	1.038.559
Kalimantan Selatan	32,65	35,04	26,67	5,64	100,00	1.685.996
Kalimantan Timur	32,31	36,71	26,49	4,48	100,00	1.575.655
Sulawesi Utara	29,93	31,43	30,80	7,84	100,00	1.108.954
Sulawesi Tengah	35,76	33,71	24,82	5,71	100,00	1.206.734
Sulawesi Selatan	34,90	33,26	23,68	8,16	100,00	3.717.194
Sulawesi Tenggara	39,44	33,05	21,50	6,01	100,00	1.009.858
Gorontalo	36,52	33,07	24,88	5,53	100,00	479.225
Sulawesi Barat	40,26	32,28	21,42	6,03	100,00	505.628
Maluku	39,04	32,01	22,50	6,45	100,00	648.891
Maluku Utara	39,19	33,81	21,76	5,23	100,00	480.744
Irian Jaya Barat	40,03	32,98	23,93	3,07	100,00	363.743
Papua	39,62	33,80	24,23	2,35	100,00	932.433
<b>INDONESIA</b>	<b>32,17</b>	<b>32,76</b>	<b>27,27</b>	<b>7,80</b>	<b>100,00</b>	<b>112.417.179</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007



**Tabel 3.1.2**  
**Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2007**

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perempuan	
	< 15	15-35	36-59	60+	Jumlah	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	31,72	38,34	22,83	7,12	100,00	2.136.297
Sumatera Utara	34,98	32,83	25,05	7,15	100,00	6.424.147
Sumatera Barat	32,71	31,65	25,92	9,72	100,00	2.384.337
R i a u	34,23	37,35	23,46	4,96	100,00	2.455.011
J a m b i	31,90	37,87	24,56	5,68	100,00	1.343.997
Sumatera Selatan	31,08	36,01	25,59	7,31	100,00	3.445.894
Bengkulu	32,65	36,71	23,98	6,66	100,00	790.570
Lampung	32,88	33,48	25,55	8,09	100,00	3.535.675
Bangka Belitung	30,75	37,29	25,31	6,66	100,00	537.473
Kepulauan Riau	28,08	48,97	19,52	3,43	100,00	717.218
DKI Jakarta	25,02	42,16	27,19	5,63	100,00	4.540.479
Jawa Barat	31,10	33,37	27,18	8,34	100,00	20.003.696
Jawa Tengah	27,64	30,26	30,06	12,05	100,00	16.227.504
DI Yogyakarta	21,69	31,36	31,52	15,43	100,00	1.732.185
Jawa Timur	25,86	30,51	31,24	12,39	100,00	18.883.673
Banten	32,63	38,01	23,60	5,76	100,00	4.703.944
B a l i	26,84	31,43	29,93	11,80	100,00	1.738.272
Nusa Tenggara Barat	31,98	35,43	23,76	8,84	100,00	2.245.919
Nusa Tenggara Timur	37,77	31,14	23,17	7,93	100,00	2.233.748
Kalimantan Barat	33,68	34,73	24,97	6,63	100,00	2.029.799
Kalimantan Tengah	33,88	37,56	23,52	5,03	100,00	977.057
Kalimantan Selatan	30,48	36,26	25,85	7,41	100,00	1.699.776
Kalimantan Timur	32,47	38,63	24,32	4,57	100,00	1.441.064
Sulawesi Utara	29,01	31,57	30,00	9,42	100,00	1.075.111
Sulawesi Tengah	35,02	35,30	23,59	6,08	100,00	1.178.260
Sulawesi Selatan	31,18	33,86	25,06	9,89	100,00	3.958.699
Sulawesi Tenggara	36,87	35,13	21,41	6,59	100,00	1.019.798
Gorontalo	34,64	34,25	25,27	5,83	100,00	482.263
Sulawesi Barat	37,70	34,64	20,83	6,82	100,00	504.611
Maluku	37,72	32,99	22,94	6,35	100,00	645.199
Maluku Utara	37,40	36,30	21,18	5,12	100,00	457.484
Irian Jaya Barat	40,24	36,32	20,68	2,77	100,00	349.155
Papua	38,37	37,50	22,21	1,93	100,00	861.964
<b>INDONESIA</b>	<b>30,22</b>	<b>33,59</b>	<b>27,16</b>	<b>9,04</b>	<b>100,00</b>	<b>112.760.279</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 3.1.3**  
**Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2007**

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Laki-laki+Perempuan	
					Jumlah	Jumlah Penduduk
	< 15	15-35	36-59	60+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	33,55	36,99	22,76	6,70	100,00	4.216.282
Sumatera Utara	36,12	32,54	24,96	6,38	100,00	12.812.875
Sumatera Barat	34,37	31,33	25,56	8,74	100,00	4.681.842
R i a u	34,88	36,72	23,54	4,86	100,00	5.067.393
J a m b i	32,70	36,88	24,66	5,76	100,00	2.730.919
Sumatera Selatan	31,63	35,86	25,61	6,90	100,00	7.014.215
Bengkulu	33,23	35,95	24,16	6,67	100,00	1.605.595
Lampung	32,86	33,58	25,77	7,78	100,00	7.278.997
Bangka Belitung	30,96	37,80	25,00	6,24	100,00	1.104.517
Kepulauan Riau	30,51	43,71	21,99	3,78	100,00	1.389.019
DKI Jakarta	25,80	40,94	27,46	5,80	100,00	9.057.993
Jawa Barat	31,65	33,02	27,24	8,08	100,00	40.356.938
Jawa Tengah	28,91	30,01	29,92	11,16	100,00	32.345.887
DI Yogyakarta	22,85	32,56	30,55	14,04	100,00	3.431.587
Jawa Timur	26,98	30,48	31,41	11,14	100,00	36.873.446
Banten	33,08	37,14	24,43	5,34	100,00	9.430.211
B a l i	27,76	31,45	29,77	11,02	100,00	3.470.965
Nusa Tenggara Barat	34,01	33,98	23,80	8,21	100,00	4.286.838
Nusa Tenggara Timur	39,69	29,99	22,64	7,68	100,00	4.446.107
Kalimantan Barat	34,18	34,48	24,86	6,48	100,00	4.171.777
Kalimantan Tengah	33,54	36,86	24,22	5,38	100,00	2.015.616
Kalimantan Selatan	31,56	35,65	26,26	6,53	100,00	3.385.772
Kalimantan Timur	32,39	37,63	25,45	4,53	100,00	3.016.719
Sulawesi Utara	29,48	31,50	30,41	8,62	100,00	2.184.065
Sulawesi Tengah	35,40	34,50	24,21	5,89	100,00	2.384.994
Sulawesi Selatan	32,98	33,57	24,39	9,05	100,00	7.675.893
Sulawesi Tenggara	38,15	34,09	21,45	6,30	100,00	2.029.656
Gorontalo	35,58	33,66	25,08	5,68	100,00	961.488
Sulawesi Barat	38,99	33,46	21,13	6,43	100,00	1.010.239
Maluku	38,38	32,50	22,72	6,40	100,00	1.294.090
Maluku Utara	38,32	35,03	21,48	5,18	100,00	938.228
Irian Jaya Barat	40,13	34,61	22,34	2,92	100,00	712.898
Papua	39,02	35,58	23,26	2,15	100,00	1.794.397
<b>INDONESIA</b>	<b>31,19</b>	<b>33,18</b>	<b>27,21</b>	<b>8,42</b>	<b>100,00</b>	<b>225.177.458</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 3.2**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	4,95	5,39	5,17	6,67	7,64	7,16	6,27	7,12	6,70
Sumatera Utara	5,23	6,25	5,74	5,92	7,86	6,89	5,61	7,15	6,38
Sumatera Barat	6,26	8,25	7,28	8,38	10,38	9,40	7,73	9,72	8,74
R i a u	4,12	4,63	4,37	5,12	5,14	5,13	4,77	4,96	4,86
J a m b i	5,54	5,02	5,28	5,95	5,94	5,95	5,84	5,68	5,76
Sumatera Selatan	5,37	6,55	5,96	7,09	7,73	7,40	6,50	7,31	6,90
Bengkulu	5,13	4,77	4,95	7,26	7,41	7,33	6,68	6,66	6,67
Lampung	5,99	6,64	6,31	7,91	8,52	8,20	7,49	8,09	7,78
Bangka Belitung	6,44	7,46	6,94	5,44	6,09	5,75	5,85	6,66	6,24
Kepulauan Riau	3,45	2,87	3,15	6,78	5,83	6,32	4,16	3,43	3,78
DKI Jakarta	5,97	5,63	5,80	-	-	-	5,97	5,63	5,80
Jawa Barat	6,75	7,28	7,01	9,03	9,56	9,29	7,83	8,34	8,08
Jawa Tengah	8,83	10,85	9,85	11,32	12,92	12,12	10,28	12,05	11,16
DI Yogyakarta	9,67	12,14	10,92	17,15	20,55	18,86	12,62	15,43	14,04
Jawa Timur	8,32	10,35	9,36	10,93	13,89	12,44	9,83	12,39	11,14
Banten	4,24	4,86	4,55	5,76	6,90	6,32	4,93	5,76	5,34
B a l i	8,62	9,69	9,16	12,04	14,17	13,10	10,24	11,80	11,02
Nusa Tenggara Barat	6,64	7,83	7,25	8,06	9,44	8,79	7,51	8,84	8,21
Nusa Tenggara Timur	4,63	4,73	4,68	7,97	8,58	8,28	7,42	7,93	7,68
Kalimantan Barat	6,22	6,96	6,59	6,39	6,50	6,44	6,35	6,63	6,48
Kalimantan Tengah	4,78	4,18	4,49	6,08	5,39	5,75	5,70	5,03	5,38
Kalimantan Selatan	5,41	6,96	6,19	5,77	7,69	6,74	5,64	7,41	6,53
Kalimantan Timur	4,02	4,78	4,39	5,01	4,31	4,69	4,48	4,57	4,53
Sulawesi Utara	6,56	8,22	7,39	8,56	10,13	9,33	7,84	9,42	8,62
Sulawesi Tengah	4,25	5,39	4,83	6,08	6,27	6,17	5,71	6,08	5,89
Sulawesi Selatan	6,40	7,81	7,13	8,98	10,87	9,96	8,16	9,89	9,05
Sulawesi Tenggara	4,10	4,71	4,42	6,54	7,14	6,84	6,01	6,59	6,30
Sulawesi Barat	5,90	5,91	5,91	5,39	5,80	5,60	5,53	5,83	5,68
Gorontalo	5,15	7,71	6,44	6,19	6,66	6,43	6,03	6,82	6,43
Maluku	5,12	4,90	5,01	6,98	6,95	6,97	6,45	6,35	6,40
Maluku Utara	5,15	4,37	4,76	5,26	5,39	5,32	5,23	5,12	5,18
Irian Jaya Barat	3,36	2,95	3,15	2,93	2,68	2,81	3,07	2,77	2,92
Papua	2,99	2,74	2,87	2,10	1,62	1,87	2,35	1,93	2,15
<b>INDONESIA</b>	<b>6,73</b>	<b>7,79</b>	<b>7,27</b>	<b>8,62</b>	<b>10,01</b>	<b>9,32</b>	<b>7,80</b>	<b>9,04</b>	<b>8,42</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 3.3**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Status Perkawinan Tahun 2007**

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,74	56,17	1,95	41,14	100,00
Sumatera Utara	0,98	58,12	1,66	39,24	100,00
Sumatera Barat	0,46	55,85	4,55	39,14	100,00
R i a u	0,57	61,00	2,48	35,94	100,00
J a m b i	1,02	60,99	2,63	35,36	100,00
Sumatera Selatan	0,63	61,08	1,94	36,35	100,00
Bengkulu	0,23	67,88	2,52	29,37	100,00
Lampung	0,29	64,40	1,76	33,55	100,00
Bangka Belitung	2,03	57,99	2,17	37,81	100,00
Kepulauan Riau	1,15	64,83	2,29	31,73	100,00
DKI Jakarta	1,01	64,51	2,83	31,65	100,00
Jawa Barat	0,35	63,83	2,88	32,94	100,00
Jawa Tengah	0,45	61,23	2,01	36,31	100,00
DI Yogyakarta	1,56	61,57	2,86	34,02	100,00
Jawa Timur	0,75	54,94	2,81	41,51	100,00
Banten	0,52	61,52	2,27	35,69	100,00
B a l i	3,52	63,49	1,61	31,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,46	56,96	4,48	37,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,21	59,22	2,21	35,36	100,00
Kalimantan Barat	2,57	60,57	1,70	35,16	100,00
Kalimantan Tengah	0,32	63,83	3,16	32,69	100,00
Kalimantan Selatan	1,37	51,15	3,63	43,84	100,00
Kalimantan Timur	0,86	61,55	3,25	34,35	100,00
Sulawesi Utara	2,89	62,56	2,31	32,24	100,00
Sulawesi Tengah	2,61	58,69	2,64	36,07	100,00
Sulawesi Selatan	2,80	55,02	3,60	38,58	100,00
Sulawesi Tenggara	1,00	61,10	2,72	35,18	100,00
Sulawesi Barat	2,31	62,87	1,82	33,00	100,00
Gorontalo	2,89	54,70	4,98	37,42	100,00
Maluku	2,76	62,41	2,18	32,66	100,00
Maluku Utara	0,93	59,50	2,55	37,01	100,00
Irian Jaya Barat	0,55	64,75	1,19	33,51	100,00
Papua	0,59	65,41	2,36	31,64	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>0,91</b>	<b>59,80</b>	<b>2,58</b>	<b>36,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 3.4**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Hubungan**  
**dengan Kepala Rumah Tangga Tahun 2007**

Provinsi	Kepala Rt	Istri/Suami	Mertua/ Orangtua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	72,05	14,03	12,66	1,27	100,00
Sumatera Utara	61,24	19,21	17,65	1,89	100,00
Sumatera Barat	56,26	16,38	24,42	2,94	100,00
R i a u	60,12	14,34	22,97	2,58	100,00
J a m b i	61,81	15,29	20,20	2,69	100,00
Sumatera Selatan	53,86	17,57	25,68	2,89	100,00
Bengkulu	56,98	20,33	21,38	1,32	100,00
Lampung	55,99	18,20	23,41	2,41	100,00
Bangka Belitung	64,62	17,82	15,44	2,12	100,00
Kepulauan Riau	60,62	17,06	19,97	2,35	100,00
DKI Jakarta	63,74	18,50	14,79	2,97	100,00
Jawa Barat	63,96	19,65	14,35	2,05	100,00
Jawa Tengah	57,29	20,08	20,07	2,56	100,00
DI Yogyakarta	59,22	23,07	15,11	2,61	100,00
Jawa Timur	56,67	16,06	22,75	4,52	100,00
Banten	64,96	17,82	15,48	1,74	100,00
B a l i	40,26	18,77	33,18	7,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,37	18,74	15,73	3,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,28	16,58	24,10	6,05	100,00
Kalimantan Barat	55,87	16,28	23,42	4,43	100,00
Kalimantan Tengah	61,77	16,16	20,00	2,07	100,00
Kalimantan Selatan	61,22	13,68	20,46	4,63	100,00
Kalimantan Timur	58,77	15,65	22,83	2,74	100,00
Sulawesi Utara	53,56	21,70	21,74	3,00	100,00
Sulawesi Tengah	53,17	16,00	26,16	4,66	100,00
Sulawesi Selatan	55,19	17,91	21,62	5,28	100,00
Sulawesi Tenggara	57,85	16,92	22,11	3,12	100,00
Gorontalo	57,42	19,93	18,39	4,26	100,00
Sulawesi Barat	58,81	13,91	22,21	5,07	100,00
Maluku	49,46	18,52	27,38	4,63	100,00
Maluku Utara	51,93	16,15	28,78	3,14	100,00
Irian Jaya Barat	63,39	16,52	16,07	4,01	100,00
Papua	67,26	13,76	15,28	3,70	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>58,67</b>	<b>18,18</b>	<b>19,93</b>	<b>3,22</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.1.1**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007**

							Perkotaan
Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	11,23	19,92	29,37	14,87	16,28	8,33	100,00
Sumatera Utara	10,22	23,23	25,40	17,89	18,65	4,60	100,00
Sumatera Barat	5,67	26,63	23,26	18,78	18,72	6,92	100,00
R i a u	15,72	27,11	25,32	13,20	13,60	5,05	100,00
J a m b i	22,52	20,05	26,30	11,74	15,67	3,72	100,00
Sumatera Selatan	15,14	29,56	25,54	14,60	11,74	3,42	100,00
Bengkulu	13,20	29,41	30,98	12,60	8,01	5,80	100,00
Lampung	22,25	30,42	23,06	10,27	10,82	3,17	100,00
Bangka Belitung	18,32	31,60	28,98	10,73	7,51	2,85	100,00
Kepulauan Riau	25,60	21,98	29,76	10,63	9,97	2,07	100,00
DKI Jakarta	10,82	18,56	21,12	14,27	22,28	12,95	100,00
Jawa Barat	18,48	28,19	28,92	9,33	10,82	4,26	100,00
Jawa Tengah	36,71	24,68	20,65	7,89	7,13	2,94	100,00
DI Yogyakarta	39,19	15,69	18,36	9,69	9,53	7,54	100,00
Jawa Timur	33,65	21,69	23,59	9,32	8,32	3,41	100,00
Banten	35,18	20,91	16,58	8,34	10,36	8,63	100,00
B a l i	42,01	21,59	21,52	5,68	5,85	3,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,59	26,09	11,12	4,26	4,43	2,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,30	25,36	21,64	9,18	16,34	11,18	100,00
Kalimantan Barat	33,96	20,10	22,52	10,38	9,81	3,22	100,00
Kalimantan Tengah	14,50	16,57	40,08	13,09	10,62	5,14	100,00
Kalimantan Selatan	18,94	30,46	26,62	8,75	12,47	2,77	100,00
Kalimantan Timur	16,52	27,94	27,29	13,60	11,75	2,91	100,00
Sulawesi Utara	1,01	32,08	23,71	18,27	20,07	4,87	100,00
Sulawesi Tengah	7,07	24,69	28,06	18,83	12,93	8,42	100,00
Sulawesi Selatan	31,34	20,54	18,26	8,83	14,47	6,55	100,00
Sulawesi Tenggara	20,60	20,74	27,16	11,56	15,02	4,93	100,00
Gorontalo	3,40	33,56	33,64	12,93	11,98	4,49	100,00
Sulawesi Barat	32,28	15,00	34,86	6,32	7,16	4,37	100,00
Maluku	7,34	11,11	38,25	12,70	22,36	8,24	100,00
Maluku Utara	20,89	31,88	15,57	7,15	19,51	5,00	100,00
Irian Jaya Barat	10,44	29,66	29,71	8,33	19,39	2,46	100,00
Papua	10,16	12,63	33,49	14,98	22,71	6,02	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>26,31</b>	<b>23,97</b>	<b>23,68</b>	<b>10,18</b>	<b>11,04</b>	<b>4,81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.1.2**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007**

							Perdesaan
Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	31,33	36,29	23,54	4,40	3,41	1,01	100,00
Sumatera Utara	21,49	43,50	20,98	8,86	4,40	0,78	100,00
Sumatera Barat	13,91	44,30	25,96	8,31	5,96	1,55	100,00
R i a u	21,82	49,48	20,62	4,18	3,05	0,85	100,00
J a m b i	35,86	33,39	23,11	4,32	2,92	0,40	100,00
Sumatera Selatan	27,06	43,20	23,44	3,45	2,55	0,30	100,00
Bengkulu	37,34	35,02	22,11	3,22	2,18	0,13	100,00
Lampung	36,64	43,58	14,17	3,47	1,77	0,38	100,00
Bangka Belitung	40,63	34,65	20,98	2,04	1,70	-	100,00
Kepulauan Riau	46,70	34,97	15,09	2,50	0,50	0,24	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	32,70	38,08	24,70	1,97	2,18	0,37	100,00
Jawa Tengah	47,26	31,11	17,34	2,02	1,80	0,46	100,00
DI Yogyakarta	55,94	17,56	17,66	4,92	3,02	0,90	100,00
Jawa Timur	53,65	26,18	16,89	1,93	1,04	0,30	100,00
Banten	47,00	31,20	18,31	1,29	1,81	0,38	100,00
B a l i	57,64	21,03	17,05	2,27	1,51	0,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	58,87	25,20	12,09	2,35	1,42	0,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,71	37,30	15,88	2,09	2,58	0,44	100,00
Kalimantan Barat	54,49	28,95	11,79	2,58	1,92	0,26	100,00
Kalimantan Tengah	22,59	33,56	36,00	5,25	2,45	0,15	100,00
Kalimantan Selatan	36,42	39,01	17,33	3,23	2,96	1,05	100,00
Kalimantan Timur	35,80	35,28	21,88	3,27	3,72	0,05	100,00
Sulawesi Utara	3,45	48,68	25,04	13,70	7,83	1,31	100,00
Sulawesi Tengah	26,32	37,91	25,08	6,18	3,86	0,65	100,00
Sulawesi Selatan	53,23	26,53	12,61	3,59	3,05	0,99	100,00
Sulawesi Tenggara	45,58	31,30	15,40	4,35	2,58	0,78	100,00
Gorontalo	9,82	57,16	25,02	4,18	3,48	0,35	100,00
Sulawesi Barat	43,89	28,32	19,64	3,68	3,56	0,92	100,00
Maluku	14,49	29,35	46,45	5,19	3,24	1,28	100,00
Maluku Utara	30,92	41,85	19,39	4,17	3,24	0,43	100,00
Irian Jaya Barat	29,02	27,72	34,44	4,71	3,58	0,53	100,00
Papua	38,23	24,23	26,41	3,89	6,83	0,41	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>42,07</b>	<b>32,98</b>	<b>19,15</b>	<b>3,06</b>	<b>2,24</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.1.3**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007**

Perkotaan + Perdesaan							
Provinsi	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	27,69	33,33	24,60	6,30	5,74	2,34	100,00
Sumatera Utara	17,00	35,42	22,74	12,46	10,08	2,30	100,00
Sumatera Barat	11,79	39,74	25,27	11,02	9,25	2,94	100,00
R i a u	19,89	42,42	22,10	7,03	6,38	2,18	100,00
J a m b i	32,35	29,89	23,95	6,27	6,27	1,27	100,00
Sumatera Selatan	23,50	39,12	24,07	6,78	5,30	1,23	100,00
Bengkulu	32,35	33,86	23,94	5,16	3,38	1,30	100,00
Lampung	34,03	41,19	15,78	4,70	3,41	0,89	100,00
Bangka Belitung	30,43	33,26	24,64	6,01	4,35	1,30	100,00
Kepulauan Riau	32,68	26,34	24,83	7,90	6,79	1,46	100,00
DKI Jakarta	10,82	18,56	21,12	14,27	22,28	12,95	100,00
Jawa Barat	26,15	33,53	26,64	5,36	6,16	2,16	100,00
Jawa Tengah	43,35	28,73	18,56	4,20	3,78	1,38	100,00
DI Yogyakarta	48,03	16,68	17,99	7,17	6,09	4,04	100,00
Jawa Timur	46,53	24,59	19,28	4,56	3,63	1,41	100,00
Banten	41,45	26,37	17,50	4,60	5,83	4,26	100,00
B a l i	50,78	21,27	19,01	3,77	3,41	1,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,44	25,50	11,76	2,99	2,42	0,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,12	36,08	16,47	2,81	3,98	1,54	100,00
Kalimantan Barat	48,81	26,50	14,76	4,74	4,11	1,08	100,00
Kalimantan Tengah	20,60	29,39	37,00	7,17	4,45	1,37	100,00
Kalimantan Selatan	30,12	35,93	20,68	5,22	6,39	1,67	100,00
Kalimantan Timur	25,63	31,41	24,73	8,72	7,96	1,56	100,00
Sulawesi Utara	2,68	43,45	24,62	15,14	11,68	2,43	100,00
Sulawesi Tengah	23,08	35,68	25,58	8,31	5,39	1,96	100,00
Sulawesi Selatan	47,72	25,02	14,03	4,91	5,93	2,39	100,00
Sulawesi Tenggara	41,72	29,67	17,22	5,47	4,50	1,42	100,00
Gorontalo	8,03	50,59	27,42	6,61	5,84	1,50	100,00
Sulawesi Barat	42,13	26,30	21,94	4,08	4,10	1,44	100,00
Maluku	12,87	25,23	44,60	6,89	7,56	2,86	100,00
Maluku Utara	28,58	39,52	18,50	4,86	7,03	1,50	100,00
Irian Jaya Barat	22,68	28,38	32,83	5,95	8,98	1,19	100,00
Papua	27,95	19,98	29,01	7,95	12,65	2,47	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>36,12</b>	<b>29,58</b>	<b>20,86</b>	<b>5,75</b>	<b>5,56</b>	<b>2,13</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007



**Tabel 4.2.1**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan - Laki-Laki					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	41,33	2,47	50,75	5,45	100,00
Sumatera Utara	73,96	1,20	23,39	1,44	100,00
Sumatera Barat	66,87	1,62	25,79	5,71	100,00
R i a u	46,96	2,05	49,16	1,83	100,00
J a m b i	70,94	2,69	22,84	3,52	100,00
Sumatera Selatan	41,56	1,58	51,58	5,29	100,00
Bengkulu	76,15	-	20,06	3,79	100,00
Lampung	68,71	0,64	22,36	8,29	100,00
Bangka Belitung	60,47	-	33,57	5,95	100,00
Kepulauan Riau	42,21	1,76	42,97	13,07	100,00
DKI Jakarta	56,96	1,24	41,14	0,66	100,00
Jawa Barat	54,40	2,58	38,51	4,51	100,00
Jawa Tengah	60,38	1,84	23,25	14,52	100,00
DI Yogyakarta	55,43	2,16	29,57	12,84	100,00
Jawa Timur	56,63	2,09	25,50	15,77	100,00
Banten	49,12	2,53	34,17	14,17	100,00
B a l i	40,94	0,23	37,56	21,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,08	1,10	12,94	32,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	86,87	0,47	2,96	9,70	100,00
Kalimantan Barat	51,40	7,95	21,48	19,17	100,00
Kalimantan Tengah	71,22	1,57	23,13	4,07	100,00
Kalimantan Selatan	47,49	1,78	44,69	6,04	100,00
Kalimantan Timur	48,23	0,80	44,73	6,24	100,00
Sulawesi Utara	95,91	0,29	3,55	0,25	100,00
Sulawesi Tengah	53,27	3,26	38,26	5,21	100,00
Sulawesi Selatan	58,59	0,67	31,15	9,60	100,00
Sulawesi Tenggara	52,33	4,86	34,83	7,97	100,00
Gorontalo	52,77	-	43,07	4,16	100,00
Sulawesi Barat	72,82	1,17	10,33	15,67	100,00
Maluku	82,85	-	15,35	1,80	100,00
Maluku Utara	73,11	1,01	22,07	3,81	100,00
Irian Jaya Barat	57,20	-	41,35	1,45	100,00
Papua	71,40	-	26,30	2,29	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>57,27</b>	<b>1,93</b>	<b>30,94</b>	<b>9,86</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.2**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan - Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	42,25	6,36	38,84	12,54	100,00
Sumatera Utara	70,46	1,82	14,47	13,26	100,00
Sumatera Barat	65,46	2,12	23,56	8,86	100,00
R i a u	51,13	3,72	37,89	7,26	100,00
J a m b i	68,81	5,53	11,72	13,93	100,00
Sumatera Selatan	42,21	6,05	39,65	12,09	100,00
Bengkulu	56,50	0,69	15,75	27,06	100,00
Lampung	51,79	1,99	15,09	31,13	100,00
Bangka Belitung	60,36	3,51	16,07	20,06	100,00
Kepulauan Riau	31,04	3,58	29,85	35,53	100,00
DKI Jakarta	56,76	3,54	27,54	12,16	100,00
Jawa Barat	45,73	4,80	30,37	19,11	100,00
Jawa Tengah	39,85	2,80	12,33	45,03	100,00
DI Yogyakarta	31,76	1,63	11,85	54,77	100,00
Jawa Timur	39,94	4,46	13,84	41,76	100,00
Banten	40,68	6,25	20,61	32,46	100,00
B a l i	25,90	1,05	15,75	57,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,86	1,10	3,75	62,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,01	1,98	1,38	25,63	100,00
Kalimantan Barat	40,84	5,57	15,81	37,79	100,00
Kalimantan Tengah	71,71	3,00	9,71	15,57	100,00
Kalimantan Selatan	46,54	4,00	31,78	17,68	100,00
Kalimantan Timur	37,73	4,78	34,56	22,93	100,00
Sulawesi Utara	92,15	0,20	5,27	2,38	100,00
Sulawesi Tengah	42,75	4,19	41,98	11,08	100,00
Sulawesi Selatan	53,81	3,14	12,53	30,53	100,00
Sulawesi Tenggara	33,41	3,67	32,96	29,97	100,00
Gorontalo	53,72	0,80	42,63	2,85	100,00
Sulawesi Barat	60,25	1,55	6,42	31,78	100,00
Maluku	88,92	-	4,98	6,10	100,00
Maluku Utara	67,83	-	8,62	23,55	100,00
Irian Jaya Barat	56,87	-	23,64	19,49	100,00
Papua	73,16	-	14,21	12,62	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>45,28</b>	<b>3,69</b>	<b>19,47</b>	<b>31,56</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.3**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan - Laki-laki+Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	41,81	4,51	44,50	9,17	100,00
Sumatera Utara	72,06	1,54	18,54	7,87	100,00
Sumatera Barat	66,05	1,91	24,50	7,53	100,00
R i a u	49,12	2,91	43,34	4,63	100,00
J a m b i	69,94	4,03	17,61	8,42	100,00
Sumatera Selatan	41,91	4,03	45,04	9,02	100,00
Bengkulu	66,64	0,33	17,97	15,05	100,00
Lampung	59,86	1,35	18,55	20,24	100,00
Bangka Belitung	60,41	1,85	24,35	13,39	100,00
Kepulauan Riau	36,88	2,63	36,71	23,78	100,00
DKI Jakarta	56,86	2,36	34,53	6,26	100,00
Jawa Barat	49,92	3,72	34,31	12,04	100,00
Jawa Tengah	48,97	2,37	17,18	31,48	100,00
DI Yogyakarta	42,10	1,86	19,59	36,45	100,00
Jawa Timur	47,18	3,43	18,89	30,49	100,00
Banten	44,59	4,53	26,89	24,00	100,00
B a l i	32,95	0,67	25,97	40,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,85	1,10	7,84	49,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	78,68	1,25	2,14	17,92	100,00
Kalimantan Barat	45,91	6,71	18,53	28,84	100,00
Kalimantan Tengah	71,44	2,22	17,06	9,27	100,00
Kalimantan Selatan	46,95	3,03	37,43	12,59	100,00
Kalimantan Timur	42,67	2,91	39,34	15,09	100,00
Sulawesi Utara	93,82	0,24	4,50	1,44	100,00
Sulawesi Tengah	47,30	3,79	40,37	8,54	100,00
Sulawesi Selatan	55,88	2,07	20,60	21,45	100,00
Sulawesi Tenggara	42,02	4,21	33,81	19,96	100,00
Gorontalo	53,25	0,41	42,85	3,49	100,00
Sulawesi Barat	65,26	1,40	7,98	25,36	100,00
Maluku	85,87	-	10,20	3,94	100,00
Maluku Utara	70,64	0,54	15,79	13,03	100,00
Irian Jaya Barat	57,04	-	33,08	9,88	100,00
Papua	72,21	-	20,75	7,04	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>50,80</b>	<b>2,88</b>	<b>24,75</b>	<b>21,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.4**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perdesaan - Laki-laki					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	34,20	8,47	41,63	15,71	100,00
Sumatera Utara	73,03	1,26	17,72	7,99	100,00
Sumatera Barat	54,39	1,35	35,36	8,90	100,00
R i a u	45,57	3,74	42,90	7,78	100,00
J a m b i	59,10	2,68	23,53	14,70	100,00
Sumatera Selatan	60,74	2,49	29,49	7,28	100,00
Bengkulu	65,89	1,23	13,76	19,12	100,00
Lampung	68,29	2,01	14,54	15,16	100,00
Bangka Belitung	55,43	5,22	27,03	12,32	100,00
Kepulauan Riau	23,93	1,39	44,74	29,94	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	45,91	3,15	37,72	13,21	100,00
Jawa Tengah	50,85	2,18	18,13	28,83	100,00
DI Yogyakarta	48,62	2,04	13,78	35,55	100,00
Jawa Timur	50,85	3,00	18,14	28,01	100,00
Banten	50,57	4,97	31,86	12,61	100,00
B a l i	31,84	0,97	32,75	34,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,54	0,81	17,71	40,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,98	0,41	1,07	27,54	100,00
Kalimantan Barat	62,12	3,38	11,37	23,13	100,00
Kalimantan Tengah	73,13	2,06	15,03	9,78	100,00
Kalimantan Selatan	47,76	3,39	31,01	17,84	100,00
Kalimantan Timur	59,40	2,26	19,48	18,87	100,00
Sulawesi Utara	90,72	0,48	7,06	1,75	100,00
Sulawesi Tengah	68,26	2,03	18,65	11,06	100,00
Sulawesi Selatan	44,26	3,54	18,59	33,61	100,00
Sulawesi Tenggara	60,01	1,14	17,40	21,45	100,00
Gorontalo	68,58	0,94	24,66	5,83	100,00
Sulawesi Barat	53,12	1,94	13,26	31,68	100,00
Maluku	74,85	0,80	17,20	7,14	100,00
Maluku Utara	60,07	2,58	18,77	18,58	100,00
Irian Jaya Barat	64,86	2,32	13,42	19,41	100,00
Papua	59,04	0,66	10,38	29,92	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>52,91</b>	<b>2,62</b>	<b>22,66</b>	<b>21,81</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.5**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perdesaan - Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	24,34	15,28	25,29	35,09	100,00
Sumatera Utara	62,15	2,70	9,47	25,69	100,00
Sumatera Barat	49,10	2,76	29,22	18,93	100,00
R i a u	40,46	6,15	33,39	20,01	100,00
J a m b i	40,39	9,62	11,21	38,78	100,00
Sumatera Selatan	51,23	4,47	18,15	26,15	100,00
Bengkulu	42,75	2,23	9,17	45,86	100,00
Lampung	46,98	3,24	5,02	44,75	100,00
Bangka Belitung	45,36	5,32	11,73	37,59	100,00
Kepulauan Riau	19,53	5,74	24,00	50,73	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	35,93	7,33	23,09	33,65	100,00
Jawa Tengah	32,02	2,79	6,67	58,52	100,00
DI Yogyakarta	19,98	1,00	4,05	74,97	100,00
Jawa Timur	30,33	3,11	5,81	60,75	100,00
Banten	45,80	10,82	14,05	29,33	100,00
B a l i	19,98	0,82	7,72	71,48	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,90	1,36	4,27	73,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	46,63	0,70	0,55	52,12	100,00
Kalimantan Barat	36,94	2,04	7,14	53,88	100,00
Kalimantan Tengah	60,96	5,84	8,36	24,85	100,00
Kalimantan Selatan	29,55	9,46	18,42	42,57	100,00
Kalimantan Timur	41,83	3,45	8,10	46,62	100,00
Sulawesi Utara	88,37	0,43	6,54	4,65	100,00
Sulawesi Tengah	55,95	3,17	10,56	30,32	100,00
Sulawesi Selatan	30,13	4,38	8,39	57,10	100,00
Sulawesi Tenggara	37,29	1,58	7,79	53,34	100,00
Gorontalo	54,23	2,04	31,13	12,60	100,00
Sulawesi Barat	38,73	4,83	4,37	52,07	100,00
Maluku	77,51	0,82	6,82	14,85	100,00
Maluku Utara	52,40	0,86	5,99	40,75	100,00
Irian Jaya Barat	47,27	1,13	8,43	43,17	100,00
Papua	45,58	1,78	-	52,64	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>36,60</b>	<b>4,07</b>	<b>10,86</b>	<b>48,47</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.6**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perdesaan - Laki-laki+Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	28,86	12,16	32,78	26,20	100,00
Sumatera Utara	66,79	2,09	12,99	18,13	100,00
Sumatera Barat	51,42	2,14	31,91	14,54	100,00
R i a u	43,10	4,91	38,29	13,70	100,00
J a m b i	49,92	6,08	17,49	26,51	100,00
Sumatera Selatan	55,90	3,50	23,72	16,88	100,00
Bengkulu	54,46	1,72	11,49	32,32	100,00
Lampung	57,62	2,63	9,77	29,98	100,00
Bangka Belitung	50,27	5,27	19,19	25,26	100,00
Kepulauan Riau	21,94	3,36	35,39	39,31	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	40,84	5,28	30,29	23,60	100,00
Jawa Tengah	40,82	2,51	12,03	44,65	100,00
DI Yogyakarta	32,95	1,47	8,45	57,12	100,00
Jawa Timur	39,13	3,07	11,09	46,71	100,00
Banten	48,00	8,12	22,26	21,62	100,00
B a l i	25,43	0,89	19,23	54,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,37	1,12	10,06	59,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,34	0,56	0,80	40,30	100,00
Kalimantan Barat	49,81	2,72	9,31	38,16	100,00
Kalimantan Tengah	67,60	3,78	12,00	16,62	100,00
Kalimantan Selatan	37,30	6,87	23,78	32,04	100,00
Kalimantan Timur	51,85	2,77	14,59	30,79	100,00
Sulawesi Utara	89,47	0,45	6,79	3,29	100,00
Sulawesi Tengah	62,13	2,60	14,62	20,65	100,00
Sulawesi Selatan	36,31	4,01	12,85	46,82	100,00
Sulawesi Tenggara	48,15	1,37	12,38	38,10	100,00
Gorontalo	61,16	1,50	28,01	9,33	100,00
Sulawesi Barat	45,68	3,44	8,66	42,23	100,00
Maluku	76,16	0,81	12,08	10,95	100,00
Maluku Utara	56,34	1,74	12,55	29,37	100,00
Irian Jaya Barat	56,71	1,77	11,11	30,41	100,00
Papua	53,43	1,13	6,06	39,38	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>44,16</b>	<b>3,40</b>	<b>16,33</b>	<b>36,11</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.7**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan+Perdesaan - Laki-Laki					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	35,53	7,35	43,33	13,79	100,00
Sumatera Utara	73,42	1,24	20,07	5,27	100,00
Sumatera Barat	57,52	1,41	32,96	8,10	100,00
R i a u	45,99	3,23	44,79	5,98	100,00
J a m b i	62,30	2,68	23,35	11,68	100,00
Sumatera Selatan	55,33	2,23	35,72	6,72	100,00
Bengkulu	68,05	0,97	15,08	15,90	100,00
Lampung	68,36	1,77	15,91	13,96	100,00
Bangka Belitung	57,70	2,87	29,97	9,46	100,00
Kepulauan Riau	35,87	1,63	43,58	18,91	100,00
DKI Jakarta	56,96	1,24	41,14	0,66	100,00
Jawa Barat	49,78	2,89	38,08	9,24	100,00
Jawa Tengah	54,27	2,06	19,97	23,70	100,00
DI Yogyakarta	51,78	2,10	21,09	25,03	100,00
Jawa Timur	52,92	2,68	20,78	23,63	100,00
Banten	49,89	3,82	32,95	13,34	100,00
B a l i	35,88	0,64	34,89	28,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,82	0,91	16,08	38,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	72,60	0,42	1,26	25,72	100,00
Kalimantan Barat	59,28	4,59	14,05	22,08	100,00
Kalimantan Tengah	72,66	1,94	17,02	8,38	100,00
Kalimantan Selatan	47,66	2,80	36,03	13,51	100,00
Kalimantan Timur	54,05	1,56	31,58	12,81	100,00
Sulawesi Utara	92,29	0,42	6,00	1,30	100,00
Sulawesi Tengah	66,03	2,21	21,56	10,19	100,00
Sulawesi Selatan	47,84	2,82	21,73	27,60	100,00
Sulawesi Tenggara	58,87	1,69	19,98	19,45	100,00
Gorontalo	64,13	0,67	29,84	5,36	100,00
Sulawesi Barat	55,65	1,85	12,89	29,62	100,00
Maluku	76,65	0,62	16,79	5,94	100,00
Maluku Utara	63,20	2,20	19,57	15,03	100,00
Irian Jaya Barat	62,26	1,53	22,90	13,31	100,00
Papua	63,35	0,43	15,94	20,28	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>54,55</b>	<b>2,36</b>	<b>25,77</b>	<b>17,32</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.2.8**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan+Perdesaan - Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	27,50	13,71	27,68	31,11	100,00
Sumatera Utara	65,36	2,36	11,40	20,89	100,00
Sumatera Barat	53,41	2,59	27,72	16,28	100,00
R i a u	43,98	5,35	34,87	15,80	100,00
J a m b i	47,64	8,58	11,34	32,45	100,00
Sumatera Selatan	48,39	4,97	24,91	21,73	100,00
Bengkulu	45,55	1,91	10,51	42,03	100,00
Lampung	47,89	3,01	6,92	42,19	100,00
Bangka Belitung	52,32	4,48	13,75	29,45	100,00
Kepulauan Riau	27,32	4,28	27,96	40,44	100,00
DKI Jakarta	56,76	3,54	27,54	12,16	100,00
Jawa Barat	40,48	6,15	26,47	26,90	100,00
Jawa Tengah	35,00	2,79	8,82	53,39	100,00
DI Yogyakarta	25,63	1,30	7,78	65,29	100,00
Jawa Timur	33,73	3,59	8,65	54,03	100,00
Banten	43,40	8,68	17,12	30,80	100,00
B a l i	22,55	0,92	11,21	65,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,83	1,27	4,10	69,80	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,10	0,83	0,63	49,44	100,00
Kalimantan Barat	38,07	3,06	9,65	49,23	100,00
Kalimantan Tengah	63,59	5,15	8,69	22,58	100,00
Kalimantan Selatan	35,59	7,52	23,17	33,72	100,00
Kalimantan Timur	39,45	4,22	23,43	32,89	100,00
Sulawesi Utara	89,60	0,36	6,13	3,91	100,00
Sulawesi Tengah	53,48	3,36	16,44	26,71	100,00
Sulawesi Selatan	36,12	4,07	9,44	50,37	100,00
Sulawesi Tenggara	36,67	1,91	11,82	49,60	100,00
Gorontalo	54,09	1,70	34,30	9,91	100,00
Sulawesi Barat	42,43	4,27	4,72	48,58	100,00
Maluku	80,10	0,63	6,40	12,86	100,00
Maluku Utara	55,88	0,67	6,59	36,86	100,00
Irian Jaya Barat	50,56	0,74	13,65	35,04	100,00
Papua	56,32	1,09	5,54	37,06	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>39,89</b>	<b>3,93</b>	<b>14,12</b>	<b>42,07</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007



**Tabel 4.2.9**  
**Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan**  
**Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007**

Perkotaan+Perdesaan - Laki-laki+Perempuan					
Provinsi	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya	Tidak Dapat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	31,21	10,77	34,91	23,12	100,00
Sumatera Utara	68,89	1,87	15,20	14,04	100,00
Sumatera Barat	55,19	2,08	30,00	12,73	100,00
R i a u	45,00	4,28	39,89	10,84	100,00
J a m b i	55,18	5,54	17,52	21,75	100,00
Sumatera Selatan	51,72	3,66	30,09	14,53	100,00
Bengkulu	56,98	1,44	12,83	28,75	100,00
Lampung	58,03	2,39	11,37	28,21	100,00
Bangka Belitung	54,91	3,71	21,55	19,83	100,00
Kepulauan Riau	31,87	2,87	36,27	29,00	100,00
DKI Jakarta	56,86	2,36	34,53	6,26	100,00
Jawa Barat	45,02	4,56	32,14	18,28	100,00
Jawa Tengah	43,84	2,46	13,94	39,77	100,00
DI Yogyakarta	37,27	1,66	13,71	47,36	100,00
Jawa Timur	41,99	3,20	13,87	40,94	100,00
Banten	46,40	6,43	24,43	22,73	100,00
B a l i	28,73	0,79	22,19	48,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,54	1,11	9,32	56,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,41	0,63	0,94	38,02	100,00
Kalimantan Barat	48,73	3,83	11,86	35,58	100,00
Kalimantan Tengah	68,54	3,40	13,24	14,82	100,00
Kalimantan Selatan	40,78	5,49	28,70	25,03	100,00
Kalimantan Timur	47,00	2,84	27,65	22,51	100,00
Sulawesi Utara	90,84	0,39	6,07	2,70	100,00
Sulawesi Tengah	59,63	2,80	18,95	18,61	100,00
Sulawesi Selatan	41,24	3,52	14,80	40,43	100,00
Sulawesi Tenggara	47,21	1,81	15,69	35,29	100,00
Gorontalo	58,96	1,20	32,14	7,70	100,00
Sulawesi Barat	48,64	3,13	8,56	39,67	100,00
Maluku	78,36	0,63	11,65	9,36	100,00
Maluku Utara	59,67	1,46	13,31	25,56	100,00
Irian Jaya Barat	56,83	1,17	18,61	23,40	100,00
Papua	60,31	0,71	11,44	27,53	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>46,67</b>	<b>3,20</b>	<b>19,51</b>	<b>30,62</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 4.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf Menurut Provinsi,**  
**Tipe Daerah dan Golongan Ekonomi Rumah Tangga Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	11,90	9,72	5,98	31,72	29,68	20,48	26,72	25,79	18,55
Sumatera Utara	14,53	8,40	0,10	35,42	24,20	1,38	24,48	18,35	0,93
Sumatera Barat	18,17	5,78	-	31,44	18,84	0,14	27,31	15,04	0,11
R i a u	19,25	0,69	-	30,63	21,83	4,73	24,47	13,95	3,81
J a m b i	21,74	1,36	1,75	39,00	33,32	8,53	32,49	24,97	7,39
Sumatera Selatan	16,67	5,41	-	32,84	16,54	1,09	26,47	13,34	0,88
Bengkulu	19,40	15,51	-	44,58	31,28	1,08	39,15	28,10	0,87
Lampung	29,91	13,32	3,46	50,43	19,49	0,51	46,43	18,32	0,82
Bangka Belitung	37,73	15,54	1,02	53,82	47,72	10,87	41,81	29,19	7,88
Kepulauan Riau	21,15	29,24	17,50	60,53	45,71	31,53	32,41	33,57	23,43
DKI Jakarta	17,60	17,48	1,03	-	-	-	17,60	17,48	1,03
Jawa Barat	27,19	3,83	-	32,85	29,45	0,35	29,93	18,67	0,20
Jawa Tengah	45,26	9,10	-	59,93	38,47	0,56	53,54	29,65	0,41
DI Yogyakarta	54,87	28,70	8,54	69,74	56,48	28,84	62,33	44,18	19,01
Jawa Timur	46,37	8,77	0,06	65,06	35,34	0,47	57,73	26,96	0,34
Banten	51,33	18,87	-	50,83	12,18	1,23	51,06	15,33	0,64
B a l i	66,59	36,43	8,26	76,48	66,19	41,00	69,02	51,31	34,28
Nusa Tenggara Barat	62,60	27,78	5,67	71,45	60,18	28,29	67,66	51,46	24,86
Nusa Tenggara Timur	27,66	7,69	-	51,43	21,27	1,00	49,40	19,61	0,83
Kalimantan Barat	45,26	24,39	3,09	66,64	38,68	0,24	59,90	34,54	0,77
Kalimantan Tengah	22,59	5,99	-	41,41	22,69	0,65	33,99	18,23	0,56
Kalimantan Selatan	33,36	4,94	-	49,61	34,18	18,38	42,20	23,33	13,52
Kalimantan Timur	32,95	18,85	1,21	48,38	43,80	17,15	39,56	28,62	10,24
Sulawesi Utara	3,97	0,43	0,39	9,39	3,00	0,33	7,21	2,13	0,34
Sulawesi Tengah	18,50	3,12	-	39,31	11,27	-	35,93	9,89	-
Sulawesi Selatan	41,97	7,06	-	65,21	45,77	0,30	59,05	35,78	0,24
Sulawesi Tenggara	34,62	14,70	8,71	55,06	33,18	-	52,66	29,82	1,52
Gorontalo	6,97	-	-	19,24	-	-	15,74	-	-
Sulawesi Barat	37,26	4,81	-	56,01	41,86	0,42	52,47	36,84	0,40
Maluku	11,48	-	-	16,38	9,94	1,44	15,43	7,83	0,99
Maluku Utara	44,59	10,73	-	50,52	33,95	0,40	49,68	27,38	0,30
Irian Jaya Barat	5,82	13,50	6,03	39,49	30,01	26,10	31,00	23,26	19,93
Papua	18,69	8,66	-	56,31	44,35	26,49	46,42	26,92	17,92
<b>INDONESIA</b>	<b>39,85</b>	<b>10,58</b>	<b>1,05</b>	<b>55,05</b>	<b>32,75</b>	<b>5,58</b>	<b>48,88</b>	<b>25,02</b>	<b>3,88</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.1**  
**Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan**  
**Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	64,86	68,88	66,97	68,76	75,97	72,66	68,03	74,71	71,63
Sumatera Utara	45,15	44,68	44,90	61,92	56,24	58,67	54,97	51,78	53,18
Sumatera Barat	52,84	57,09	55,30	62,47	63,27	62,92	60,06	61,64	60,95
Riau	49,70	57,33	53,64	56,99	61,12	58,99	54,79	59,87	57,30
Jambi	36,15	47,35	41,42	49,72	50,47	50,09	46,05	49,67	47,81
Sumatera Selatan	58,51	59,06	58,81	54,73	57,50	56,14	55,79	57,99	56,94
Bengkulu	56,60	57,05	56,82	59,78	55,08	57,46	59,11	55,48	57,33
Lampung	56,12	63,69	60,08	59,32	59,07	59,20	58,76	59,94	59,36
Bangka Belitung	58,23	57,11	57,64	60,26	67,49	63,96	59,35	62,67	61,07
Kepulauan Riau	48,40	44,18	46,38	54,68	64,75	59,22	50,57	50,83	50,69
DKI Jakarta	51,20	55,42	53,25	-	-	-	51,20	55,42	53,25
Jawa Barat	51,43	51,62	51,53	57,98	58,98	58,49	54,99	55,56	55,28
Jawa Tengah	49,56	50,38	50,02	48,08	47,52	47,78	48,61	48,61	48,61
DI Yogyakarta	59,30	59,17	59,23	62,13	53,69	57,51	60,82	56,32	58,32
Jawa Timur	48,67	49,60	49,20	51,52	47,72	49,35	50,50	48,39	49,29
Banten	53,61	63,20	58,76	62,99	61,41	62,14	58,58	62,25	60,55
Bali	60,64	59,71	60,14	66,79	68,49	67,71	64,06	64,67	64,39
Nusa Tenggara Barat	66,48	63,13	64,62	68,85	66,49	67,50	68,04	65,38	66,54
Nusa Tenggara Timur	68,51	69,02	68,77	70,41	68,80	69,58	70,22	68,83	69,49
Kalimantan Barat	54,95	52,19	53,51	63,81	66,92	65,33	61,47	62,66	62,06
Kalimantan Tengah	47,16	50,01	48,45	52,09	56,33	54,01	50,88	54,78	52,65
Kalimantan Selatan	68,00	64,11	65,81	58,43	62,49	60,76	61,94	63,06	62,58
Kalimantan Timur	46,09	45,75	45,91	53,09	53,36	53,20	49,74	48,95	49,36
Sulawesi Utara	46,51	41,89	43,94	58,68	55,59	57,05	55,00	51,13	52,92
Sulawesi Tengah	58,27	66,63	63,01	65,72	63,44	64,58	64,61	64,04	64,32
Sulawesi Selatan	53,80	58,59	56,52	57,25	55,81	56,44	56,39	56,52	56,46
Sulawesi Tenggara	64,60	58,28	61,16	57,96	59,39	58,71	58,94	59,21	59,08
Gorontalo	54,81	50,98	52,86	73,88	77,03	75,50	68,51	69,85	69,20
Sulawesi Barat	34,73	41,52	38,82	60,54	63,38	62,01	57,23	59,62	58,49
Maluku	60,77	59,14	59,96	54,15	52,07	53,13	55,64	53,68	54,67
Maluku Utara	49,11	59,57	54,00	61,16	64,44	62,76	58,27	63,34	60,71
Irian Jaya Barat	50,20	58,73	54,19	52,19	63,90	57,61	51,51	62,13	56,44
Papua	55,94	72,07	63,35	54,41	52,69	53,69	54,94	60,24	57,23
<b>INDONESIA</b>	<b>51,59</b>	<b>52,85</b>	<b>52,27</b>	<b>56,08</b>	<b>54,91</b>	<b>55,45</b>	<b>54,39</b>	<b>54,13</b>	<b>54,25</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.2**  
**Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	43,84	43,48	43,65	46,71	51,76	49,44	46,17	50,30	48,40
Sumatera Utara	24,78	25,73	25,30	42,67	39,00	40,57	35,26	33,88	34,48
Sumatera Barat	26,00	24,88	25,35	36,12	32,33	33,99	33,59	30,37	31,76
Riau	26,07	31,81	29,03	41,29	42,31	41,78	36,69	38,85	37,76
Jambi	21,73	27,94	24,65	31,09	34,11	32,58	28,56	32,54	30,49
Sumatera Selatan	25,50	22,43	23,82	30,44	32,98	31,73	29,05	29,67	29,37
Bengkulu	39,35	38,89	39,12	43,35	39,81	41,60	42,51	39,62	41,09
Lampung	24,84	29,65	27,36	32,82	29,54	31,18	31,43	29,56	30,48
Bangka Belitung	32,14	28,24	30,08	36,10	39,42	37,80	34,32	34,23	34,27
Kepulauan Riau	30,64	25,21	28,05	32,34	45,51	38,28	31,23	31,77	31,48
DKI Jakarta	22,26	26,09	24,12	-	-	-	22,26	26,09	24,12
Jawa Barat	28,96	27,32	28,11	33,63	32,97	33,30	31,49	30,35	30,91
Jawa Tengah	25,74	24,67	25,14	26,22	25,48	25,82	26,04	25,17	25,57
DI Yogyakarta	22,40	17,84	19,83	28,17	20,16	23,79	25,50	19,05	21,92
Jawa Timur	27,59	26,45	26,94	32,11	28,40	29,99	30,49	27,71	28,91
Banten	30,48	38,82	34,96	38,56	34,61	36,43	34,76	36,58	35,74
Bali	35,51	32,16	33,73	42,22	41,91	42,05	39,24	37,67	38,40
Nusa Tenggara Barat	39,36	40,20	39,83	46,76	41,72	43,89	44,24	41,22	42,53
Nusa Tenggara Timur	35,38	37,38	36,41	48,06	47,19	47,61	46,76	46,20	46,47
Kalimantan Barat	32,41	22,06	27,03	40,01	45,94	42,91	38,00	39,03	38,51
Kalimantan Tengah	27,38	31,33	29,17	36,84	39,94	38,25	34,52	37,83	36,02
Kalimantan Selatan	30,27	30,42	30,35	34,65	38,72	36,99	33,04	35,77	34,60
Kalimantan Timur	25,92	27,08	26,54	36,52	36,27	36,42	31,44	30,95	31,20
Sulawesi Utara	31,76	29,27	30,37	41,52	39,49	40,44	38,57	36,16	37,27
Sulawesi Tengah	35,46	38,11	36,96	51,31	47,68	49,50	48,96	45,89	47,39
Sulawesi Selatan	29,23	31,69	30,63	38,51	33,83	35,88	36,19	33,29	34,56
Sulawesi Tenggara	38,56	33,34	35,71	44,11	42,63	43,33	43,28	41,14	42,16
Gorontalo	37,07	31,40	34,18	53,24	52,10	52,65	48,69	46,40	47,51
Sulawesi Barat	26,95	27,47	27,26	46,29	46,46	46,38	43,81	43,20	43,48
Maluku	33,71	34,88	34,29	35,69	38,15	36,90	35,24	37,41	36,31
Maluku Utara	31,20	39,92	35,27	47,46	51,59	49,47	43,55	48,96	46,16
Irian Jaya Barat	34,53	40,51	37,33	39,26	48,83	43,69	37,65	45,97	41,52
Papua	26,11	37,52	31,35	40,13	38,87	39,61	35,24	38,34	36,58
<b>INDONESIA</b>	<b>27,62</b>	<b>27,24</b>	<b>27,42</b>	<b>34,33</b>	<b>32,50</b>	<b>33,35</b>	<b>31,81</b>	<b>30,51</b>	<b>31,11</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.3.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Lamanya Sakit (hari) Tahun 2007**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perkotaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	24,91	46,41	8,04	5,14	15,50	100,00
Sumatera Utara	26,71	35,43	6,73	5,64	25,49	100,00
Sumatera Barat	32,88	23,24	10,64	8,26	24,98	100,00
R i a u	33,54	33,11	2,08	3,04	28,23	100,00
J a m b i	33,79	39,82	8,62	3,05	14,72	100,00
Sumatera Selatan	38,91	23,39	5,59	4,02	28,09	100,00
Bengkulu	25,24	37,29	8,59	6,47	22,41	100,00
Lampung	39,51	24,64	6,59	5,93	23,34	100,00
Bangka Belitung	37,13	36,42	6,21	1,53	18,70	100,00
Kepulauan Riau	34,60	32,87	7,97	2,06	22,50	100,00
DKI Jakarta	41,91	35,78	8,34	2,15	11,82	100,00
Jawa Barat	31,03	33,34	9,38	5,66	20,59	100,00
Jawa Tengah	33,85	33,01	9,69	5,97	17,47	100,00
DI Yogyakarta	38,63	24,06	9,00	5,44	22,87	100,00
Jawa Timur	33,22	28,76	10,36	6,22	21,45	100,00
Banten	32,89	28,50	11,56	6,37	20,67	100,00
B a l i	48,92	24,70	7,78	3,28	15,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,03	35,68	13,30	10,34	19,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,38	31,07	6,60	1,84	27,11	100,00
Kalimantan Barat	38,50	22,45	11,31	1,51	26,24	100,00
Kalimantan Tengah	40,82	23,94	10,05	4,81	20,38	100,00
Kalimantan Selatan	33,99	34,10	4,76	7,29	19,87	100,00
Kalimantan Timur	35,72	27,50	5,40	6,63	24,75	100,00
Sulawesi Utara	31,32	34,99	14,34	1,04	18,30	100,00
Sulawesi Tengah	23,76	33,49	6,60	6,51	29,64	100,00
Sulawesi Selatan	37,54	26,71	11,24	4,91	19,61	100,00
Sulawesi Tenggara	31,55	33,98	7,22	6,08	21,16	100,00
Gorontalo	20,27	39,37	11,82	8,36	20,18	100,00
Sulawesi Barat	16,81	36,86	18,82	9,17	18,34	100,00
Maluku	28,79	21,37	16,90	3,01	29,94	100,00
Maluku Utara	37,31	29,93	10,84	3,50	18,42	100,00
Irian Jaya Barat	50,75	31,45	6,64	1,02	10,14	100,00
Papua	29,78	41,15	9,81		19,26	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>33,63</b>	<b>31,39</b>	<b>9,39</b>	<b>5,47</b>	<b>20,12</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.3.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Lamanya Sakit (hari) Tahun 2007**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	32,12	39,52	9,70	6,38	12,28	100,00
Sumatera Utara	24,61	34,37	10,23	5,05	25,75	100,00
Sumatera Barat	27,10	29,78	6,86	9,92	26,34	100,00
R i a u	33,95	35,30	7,02	6,13	17,60	100,00
J a m b i	31,27	36,83	4,76	4,55	22,59	100,00
Sumatera Selatan	34,80	35,41	8,64	5,96	15,18	100,00
Bengkulu	26,76	39,49	9,70	8,51	15,54	100,00
Lampung	29,52	39,48	7,33	6,33	17,33	100,00
Bangka Belitung	39,10	33,55	6,17	5,11	16,07	100,00
Kepulauan Riau	25,61	42,62	7,15	9,96	14,66	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	26,11	33,66	10,54	7,45	22,24	100,00
Jawa Tengah	34,44	33,84	8,08	6,56	17,08	100,00
DI Yogyakarta	35,37	32,75	7,44	4,66	19,78	100,00
Jawa Timur	28,42	36,45	8,96	6,51	19,66	100,00
Banten	25,30	42,22	8,23	5,66	18,59	100,00
B a l i	46,81	24,04	7,37	5,06	16,72	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,88	37,58	12,48	6,52	22,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,02	41,26	14,36	4,23	20,13	100,00
Kalimantan Barat	35,05	34,72	7,68	3,85	18,70	100,00
Kalimantan Tengah	35,90	35,82	7,38	6,06	14,84	100,00
Kalimantan Selatan	31,21	32,06	7,51	8,48	20,74	100,00
Kalimantan Timur	27,55	40,37	8,82	6,00	17,26	100,00
Sulawesi Utara	28,63	39,20	11,61	4,27	16,29	100,00
Sulawesi Tengah	26,26	35,83	12,40	8,53	16,99	100,00
Sulawesi Selatan	25,49	33,78	11,21	6,33	23,19	100,00
Sulawesi Tenggara	26,23	40,88	12,17	6,19	14,54	100,00
Gorontalo	24,45	40,08	16,26	6,62	12,59	100,00
Sulawesi Barat	25,94	36,65	12,81	5,77	18,82	100,00
Maluku	17,79	47,90	12,67	8,19	13,45	100,00
Maluku Utara	17,73	42,74	13,91	6,77	18,85	100,00
Irian Jaya Barat	30,90	47,90	4,86	7,20	9,15	100,00
Papua	29,27	43,99	15,64	4,60	6,49	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>29,05</b>	<b>35,59</b>	<b>9,45</b>	<b>6,43</b>	<b>19,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.3.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Lamanya Sakit (hari) Tahun 2007**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					
						Perkotaan + Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	30,94	40,64	9,43	6,18	12,80	100,00
Sumatera Utara	25,22	34,68	9,20	5,22	25,67	100,00
Sumatera Barat	28,29	28,43	7,64	9,57	26,06	100,00
R i a u	33,85	34,77	5,82	5,38	20,18	100,00
J a m b i	31,81	37,46	5,58	4,23	20,91	100,00
Sumatera Selatan	35,79	32,50	7,90	5,49	18,31	100,00
Bengkulu	26,46	39,06	9,48	8,11	16,89	100,00
Lampung	31,15	37,06	7,21	6,27	18,31	100,00
Bangka Belitung	38,31	34,70	6,19	3,67	17,13	100,00
Kepulauan Riau	30,93	36,85	7,64	5,29	19,30	100,00
DKI Jakarta	41,91	35,78	8,34	2,15	11,82	100,00
Jawa Barat	28,17	33,52	10,05	6,70	21,55	100,00
Jawa Tengah	34,23	33,54	8,67	6,34	17,22	100,00
DI Yogyakarta	36,76	29,03	8,11	4,99	21,10	100,00
Jawa Timur	30,01	33,90	9,42	6,41	20,25	100,00
Banten	28,79	35,92	9,76	5,99	19,55	100,00
B a l i	47,62	24,29	7,53	4,38	16,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,93	36,99	12,74	7,72	21,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,08	40,45	13,75	4,04	20,69	100,00
Kalimantan Barat	35,72	32,34	8,38	3,40	20,16	100,00
Kalimantan Tengah	36,88	33,46	7,91	5,82	15,94	100,00
Kalimantan Selatan	32,09	32,70	6,64	8,10	20,47	100,00
Kalimantan Timur	31,22	34,60	7,28	6,29	20,62	100,00
Sulawesi Utara	29,32	38,12	12,31	3,45	16,80	100,00
Sulawesi Tengah	25,93	35,52	11,64	8,26	18,65	100,00
Sulawesi Selatan	28,18	32,20	11,21	6,01	22,39	100,00
Sulawesi Tenggara	26,92	39,98	11,52	6,17	15,40	100,00
Gorontalo	23,61	39,94	15,37	6,97	14,11	100,00
Sulawesi Barat	25,07	36,67	13,38	6,09	18,77	100,00
Maluku	20,13	42,24	13,57	7,08	16,97	100,00
Maluku Utara	21,22	40,46	13,36	6,19	18,78	100,00
Irian Jaya Barat	36,99	42,85	5,40	5,30	9,45	100,00
Papua	29,43	43,10	13,81	3,16	10,50	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>30,57</b>	<b>34,19</b>	<b>9,43</b>	<b>6,11</b>	<b>19,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.4**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi,**  
**Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	58,14	61,44	59,92	69,94	64,39	66,80	67,84	63,91	65,63
Sumatera Utara	64,67	66,21	65,50	66,76	64,72	65,64	66,05	65,22	65,60
Sumatera Barat	63,15	53,38	57,31	59,59	53,61	56,21	60,38	53,55	56,47
R i a u	61,56	63,13	62,42	67,33	65,67	66,50	65,75	64,87	65,29
J a m b i	54,33	50,47	52,25	75,12	70,60	72,89	70,71	65,71	68,19
Sumatera Selatan	60,87	59,24	59,97	70,69	71,06	70,88	67,79	67,27	67,51
Bengkulu	66,65	63,37	65,06	69,95	68,16	69,10	69,28	67,16	68,27
Lampung	56,68	58,18	57,51	69,56	69,81	69,68	67,41	67,49	67,45
Bangka Belitung	71,12	72,67	71,93	76,45	70,78	73,38	74,10	71,58	72,75
Kepulauan Riau	69,33	65,02	67,37	70,08	68,43	69,26	69,61	66,42	68,11
DKI Jakarta	56,83	61,20	59,04	-	-	-	56,83	61,20	59,04
Jawa Barat	66,49	62,56	64,46	68,41	64,84	66,58	67,59	63,86	65,67
Jawa Tengah	64,40	59,92	61,89	59,78	60,04	59,92	61,47	59,99	60,67
DI Yogyakarta	62,23	65,97	64,33	52,40	45,63	48,94	56,84	55,87	56,32
Jawa Timur	60,51	63,55	62,25	62,96	63,15	63,06	62,12	63,29	62,77
Banten	63,31	59,07	60,86	75,32	69,07	71,99	70,15	64,31	66,92
B a l i	53,84	55,12	54,52	53,89	56,53	55,33	53,87	55,97	55,00
Nusa Tenggara Barat	58,36	60,47	59,50	58,47	52,19	54,95	58,43	54,82	56,43
Nusa Tenggara Timur	63,54	62,67	63,09	52,84	49,49	51,12	53,91	50,83	52,33
Kalimantan Barat	64,98	61,81	63,37	73,28	70,83	72,05	71,31	68,66	69,98
Kalimantan Tengah	65,50	57,58	61,80	79,65	74,07	77,01	76,43	70,39	73,58
Kalimantan Selatan	77,70	70,57	73,80	72,62	68,32	70,08	74,66	69,14	71,49
Kalimantan Timur	67,23	59,67	63,23	59,55	58,08	58,92	62,96	58,94	61,04
Sulawesi Utara	56,22	50,85	53,38	64,49	60,88	62,63	62,38	58,21	60,21
Sulawesi Tengah	76,41	66,14	70,26	76,19	69,98	73,15	76,22	69,23	72,68
Sulawesi Selatan	56,73	53,48	54,82	66,93	62,53	64,48	64,50	60,15	62,05
Sulawesi Tenggara	67,81	62,06	64,82	72,92	72,69	72,80	72,09	71,01	71,52
Gorontalo	57,70	44,86	51,39	75,78	78,50	77,21	71,71	71,74	71,72
Sulawesi Barat	46,36	49,04	48,09	68,54	63,05	65,63	66,81	61,37	63,87
Maluku	55,98	50,75	53,42	71,32	74,38	72,80	67,55	68,47	68,00
Maluku Utara	77,34	70,75	73,95	78,19	81,41	79,80	78,02	79,15	78,59
Irian Jaya Barat	74,32	46,21	60,08	48,24	54,88	51,65	56,87	52,06	54,41
Papua	59,02	69,96	64,73	53,66	64,49	58,08	55,56	67,04	60,78
<b>INDONESIA</b>	<b>62,72</b>	<b>61,44</b>	<b>62,02</b>	<b>64,85</b>	<b>62,82</b>	<b>63,77</b>	<b>64,09</b>	<b>62,31</b>	<b>63,13</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007



**Tabel 5.5.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi,**  
**dan Jenis Obat yang Digunakan Tahun 2007**

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perkotaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	6,77	65,86	0,46	26,91	100,00
Sumatera Utara	8,22	64,22	0,99	26,56	100,00
Sumatera Barat	15,01	58,19	0,34	26,45	100,00
R i a u	11,65	53,77	0,43	34,15	100,00
J a m b i	15,67	49,48	-	34,85	100,00
Sumatera Selatan	7,16	69,89	1,00	21,95	100,00
Bengkulu	10,52	65,60	-	23,88	100,00
Lampung	11,83	60,56	3,85	23,75	100,00
Bangka Belitung	9,09	63,00	2,57	25,34	100,00
Kepulauan Riau	10,33	54,48	4,20	30,98	100,00
DKI Jakarta	12,68	63,48	1,35	22,49	100,00
Jawa Barat	7,51	64,32	1,58	26,59	100,00
Jawa Tengah	11,48	57,52	1,36	29,64	100,00
DI Yogyakarta	14,59	51,90	2,64	30,87	100,00
Jawa Timur	15,21	49,78	0,77	34,24	100,00
Banten	18,90	56,75	4,45	19,91	100,00
B a l i	24,06	40,52	0,84	34,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,74	70,44	0,74	20,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,69	75,05	2,16	7,11	100,00
Kalimantan Barat	13,04	59,44	0,24	27,28	100,00
Kalimantan Tengah	16,16	53,96	0,97	28,91	100,00
Kalimantan Selatan	3,17	74,75	0,62	21,47	100,00
Kalimantan Timur	11,99	57,71	1,11	29,19	100,00
Sulawesi Utara	5,30	75,35	7,82	11,53	100,00
Sulawesi Tengah	3,89	70,46	1,74	23,92	100,00
Sulawesi Selatan	10,18	59,72	0,74	29,36	100,00
Sulawesi Tenggara	3,51	69,84	0,92	25,73	100,00
Gorontalo	3,17	80,28	-	16,55	100,00
Sulawesi Barat	21,34	60,70	-	17,96	100,00
Maluku	6,75	89,44	-	3,80	100,00
Maluku Utara	5,79	66,60	5,04	22,57	100,00
Irian Jaya Barat	26,16	46,52	5,23	22,09	100,00
Papua	9,07	64,50	-	26,43	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>11,62</b>	<b>58,99</b>	<b>1,42</b>	<b>27,96</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.5.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi,**  
**dan Jenis Obat yang Digunakan Tahun 2007**

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	9,74	44,19	1,06	45,01	100,00
Sumatera Utara	10,53	56,56	0,65	32,26	100,00
Sumatera Barat	26,58	40,05	1,11	32,25	100,00
R i a u	14,15	47,31	0,79	37,75	100,00
J a m b i	11,79	53,25	1,37	33,59	100,00
Sumatera Selatan	10,73	53,14	1,01	35,12	100,00
Bengkulu	13,41	44,22	1,30	41,07	100,00
Lampung	11,70	54,69	1,07	32,54	100,00
Bangka Belitung	4,23	60,36	2,28	33,14	100,00
Kepulauan Riau	10,21	54,21	-	35,58	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,35	63,66	1,13	28,86	100,00
Jawa Tengah	10,81	57,52	1,03	30,65	100,00
DI Yogyakarta	17,13	58,81	1,00	23,06	100,00
Jawa Timur	17,34	43,31	1,35	38,00	100,00
Banten	8,56	54,26	1,43	35,75	100,00
B a l i	29,43	29,08	0,48	41,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,64	57,44	1,35	24,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,39	49,60	1,79	25,21	100,00
Kalimantan Barat	8,71	53,16	0,73	37,40	100,00
Kalimantan Tengah	6,73	63,05	1,49	28,73	100,00
Kalimantan Selatan	5,75	59,53	1,05	33,67	100,00
Kalimantan Timur	15,18	47,56	1,47	35,78	100,00
Sulawesi Utara	7,74	68,01	1,17	23,07	100,00
Sulawesi Tengah	7,61	59,18	2,81	30,40	100,00
Sulawesi Selatan	14,54	47,53	0,88	37,04	100,00
Sulawesi Tenggara	12,38	57,05	0,61	29,97	100,00
Gorontalo	4,77	59,99	-	35,25	100,00
Sulawesi Barat	20,81	51,34	0,21	27,64	100,00
Maluku	9,96	55,58	0,97	33,49	100,00
Maluku Utara	14,01	39,10	0,31	46,59	100,00
Irian Jaya Barat	9,93	37,70	-	52,38	100,00
Papua	24,05	40,04	1,02	34,89	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>12,71</b>	<b>52,91</b>	<b>1,13</b>	<b>33,25</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.5.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri Menurut Provinsi,**  
**dan Jenis Obat yang Digunakan Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan				
	Jenis Obat yang Digunakan				Jumlah
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	9,28	47,54	0,97	42,21	100,00
Sumatera Utara	9,76	59,13	0,76	30,35	100,00
Sumatera Barat	23,83	44,36	0,93	30,88	100,00
R i a u	13,44	49,14	0,69	36,74	100,00
J a m b i	12,46	52,60	1,13	33,81	100,00
Sumatera Selatan	9,75	57,73	1,00	31,51	100,00
Bengkulu	12,84	48,40	1,05	37,71	100,00
Lampung	11,72	55,60	1,51	31,17	100,00
Bangka Belitung	6,30	61,48	2,40	29,81	100,00
Kepulauan Riau	10,28	54,38	2,52	32,82	100,00
DKI Jakarta	12,68	63,48	1,35	22,49	100,00
Jawa Barat	6,84	63,94	1,32	27,90	100,00
Jawa Tengah	11,07	57,52	1,16	30,26	100,00
DI Yogyakarta	15,74	55,02	1,90	27,34	100,00
Jawa Timur	16,59	45,59	1,14	36,68	100,00
Banten	12,84	55,29	2,68	29,19	100,00
B a l i	27,25	33,73	0,63	38,39	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,94	61,89	1,14	23,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,46	52,69	1,84	23,02	100,00
Kalimantan Barat	9,64	54,52	0,62	35,22	100,00
Kalimantan Tengah	8,52	61,33	1,39	28,76	100,00
Kalimantan Selatan	4,74	65,49	0,88	28,89	100,00
Kalimantan Timur	13,56	52,72	1,29	32,43	100,00
Sulawesi Utara	7,18	69,71	2,71	20,40	100,00
Sulawesi Tengah	7,02	60,98	2,64	29,37	100,00
Sulawesi Selatan	13,57	50,24	0,85	35,33	100,00
Sulawesi Tenggara	11,09	58,90	0,65	29,35	100,00
Gorontalo	4,52	63,08	0,00	32,40	100,00
Sulawesi Barat	20,85	52,05	0,19	26,91	100,00
Maluku	9,34	62,17	0,78	27,71	100,00
Maluku Utara	12,41	44,47	1,23	41,90	100,00
Irian Jaya Barat	15,80	40,89	1,89	41,42	100,00
Papua	17,58	50,60	0,58	31,23	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>12,32</b>	<b>55,08</b>	<b>1,23</b>	<b>31,36</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.6**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi,**  
**Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	63,22	51,27	56,77	60,70	59,02	59,74	61,15	57,75	59,24
Sumatera Utara	47,37	47,78	47,59	49,96	48,76	49,30	49,08	48,44	48,73
Sumatera Barat	46,01	49,76	48,25	51,96	48,28	49,88	50,65	48,64	49,50
Riau	51,70	54,21	53,09	42,74	42,60	42,67	45,19	46,27	45,75
Jambi	46,54	51,13	49,01	45,70	41,13	43,44	45,88	43,56	44,71
Sumatera Selatan	47,55	47,03	47,26	34,74	39,77	37,36	38,53	42,09	40,42
Bengkulu	43,09	54,85	48,81	39,80	33,28	36,71	40,46	37,80	39,19
Lampung	55,64	53,31	54,34	44,99	42,38	43,68	46,76	44,56	45,64
Bangka Belitung	53,04	49,57	51,23	39,20	34,06	36,42	45,30	40,62	42,81
Kepulauan Riau	40,98	52,13	46,05	50,22	44,94	47,62	44,44	49,17	46,66
DKI Jakarta	53,94	53,18	53,55	-	-	-	53,94	53,18	53,55
Jawa Barat	53,75	54,61	54,19	45,97	44,02	44,97	49,29	48,58	48,93
Jawa Tengah	44,45	44,89	44,70	44,27	46,78	45,60	44,34	46,04	45,26
DI Yogyakarta	44,60	47,53	46,25	51,01	50,61	50,81	48,12	49,06	48,62
Jawa Timur	49,66	46,54	47,88	46,82	43,66	45,08	47,80	44,71	46,07
Banten	47,89	45,08	46,26	39,31	35,08	37,06	43,01	39,84	41,25
Bali	61,07	59,02	59,99	63,65	62,15	62,83	62,57	60,89	61,66
Nusa Tenggara Barat	54,45	49,58	51,81	59,95	50,73	54,79	58,12	50,37	53,82
Nusa Tenggara Timur	34,36	50,48	42,72	46,59	47,15	46,87	45,37	47,49	46,46
Kalimantan Barat	51,76	52,88	52,33	38,25	39,93	39,09	41,45	43,05	42,25
Kalimantan Tengah	36,99	45,43	40,93	31,38	40,08	35,50	32,66	41,27	36,72
Kalimantan Selatan	38,98	42,35	40,82	45,15	42,52	43,60	42,66	42,46	42,55
Kalimantan Timur	46,12	51,53	48,98	46,20	44,71	45,56	46,17	48,40	47,24
Sulawesi Utara	43,07	46,81	45,05	57,01	54,50	55,71	53,44	52,45	52,93
Sulawesi Tengah	48,03	39,15	42,70	47,48	42,02	44,81	47,56	41,46	44,46
Sulawesi Selatan	44,91	41,09	42,66	37,77	35,87	36,71	39,48	37,24	38,21
Sulawesi Tenggara	37,45	40,51	39,04	33,66	27,44	30,38	34,28	29,50	31,76
Gorontalo	59,56	51,17	55,44	46,06	46,67	46,38	49,10	47,57	48,31
Sulawesi Barat	65,32	50,63	55,86	32,32	29,41	30,78	34,89	31,95	33,30
Maluku	33,40	51,95	42,49	29,23	23,17	26,29	30,25	30,37	30,31
Maluku Utara	42,48	52,98	47,89	39,44	33,13	36,28	40,05	37,34	38,69
Irian Jaya Barat	53,16	33,79	43,35	48,24	53,62	51,01	49,87	47,19	48,50
Papua	29,92	30,60	30,28	48,46	45,68	47,32	41,87	38,65	40,41
<b>INDONESIA</b>	<b>49,58</b>	<b>48,94</b>	<b>49,23</b>	<b>45,91</b>	<b>44,67</b>	<b>45,25</b>	<b>47,22</b>	<b>46,25</b>	<b>46,70</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.7.1**  
**Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Tempat Berobat Jalan Tahun 2007**

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Perkotaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nangroe Aceh Darussalam	24,16	7,36	33,33	45,33	10,35	2,92	3,89
Sumatera Utara	12,04	10,37	35,61	22,39	25,23	3,08	6,23
Sumatera Barat	18,84	2,28	23,35	35,45	26,79	2,98	3,39
R i a u	17,39	8,80	38,97	32,64	10,53	-	-
J a m b i	23,53	1,95	38,24	34,88	16,58	6,73	1,95
Sumatera Selatan	13,43	9,69	44,49	22,49	10,81	0,00	3,52
Bengkulu	14,62	-	36,02	48,91	12,91	3,40	2,88
Lampung	9,90	11,34	36,84	14,51	32,89	0,76	3,03
Bangka Belitung	12,41	30,22	24,21	36,61	10,95	0,49	1,67
Kepulauan Riau	20,92	15,45	39,25	25,24	8,47	1,20	8,98
DKI Jakarta	13,94	21,31	42,88	22,63	2,62	0,97	1,94
Jawa Barat	12,59	7,98	40,75	32,81	16,24	0,79	3,23
Jawa Tengah	10,62	4,51	37,94	29,69	23,33	1,07	4,46
DI Yogyakarta	13,58	14,27	39,68	25,84	13,05	-	2,56
Jawa Timur	9,61	5,12	38,53	25,89	27,63	1,19	1,68
Banten	9,04	9,66	51,94	21,88	17,17	2,15	6,26
B a l i	8,60	1,44	41,16	35,20	26,17	0,24	2,05
Nusa Tenggara Barat	6,88	-	36,15	32,42	25,45	1,63	2,48
Nusa Tenggara Timur	38,87	8,12	22,49	30,35	8,76	-	2,31
Kalimantan Barat	16,69	4,91	29,47	41,47	15,75	2,21	4,94
Kalimantan Tengah	17,47	0,69	36,93	30,13	29,82	0,26	8,07
Kalimantan Selatan	15,24	-	32,03	41,12	21,17	-	3,52
Kalimantan Timur	16,95	6,24	41,51	38,70	5,36	-	1,43
Sulawesi Utara	20,00	7,03	40,23	24,09	15,84	1,00	2,49
Sulawesi Tengah	14,64	1,06	46,53	37,48	13,25	1,29	2,47
Sulawesi Selatan	16,12	2,27	31,82	32,90	19,27	0,33	2,21
Sulawesi Tenggara	25,79	9,31	32,37	28,26	11,91	-	-
Gorontalo	-	1,63	62,08	31,92	10,16	-	4,00
Sulawesi Barat	24,14	-	31,90	20,81	32,14	1,42	-
Maluku	34,06	8,37	54,75	38,37	4,19	-	-
Maluku Utara	6,82	3,60	54,31	48,91	11,85	-	-
Irian Jaya Barat	17,63	-	23,60	64,75	-	-	-
Papua	25,95	6,02	31,87	55,63	6,02	-	-
<b>INDONESIA</b>	<b>12,26</b>	<b>7,40</b>	<b>39,15</b>	<b>29,40</b>	<b>19,52</b>	<b>1,10</b>	<b>3,15</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.7.2**  
**Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Tempat Berobat Jalan Tahun 2007**

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Perdesaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	14,04	2,05	15,97	50,19	29,20	1,27	7,76
Sumatera Utara	6,83	5,38	21,82	25,41	44,53	1,13	4,85
Sumatera Barat	9,44	2,41	18,81	39,73	32,48	5,57	3,56
R i a u	11,44	4,41	27,38	40,10	22,21	2,97	4,73
J a m b i	8,40	1,29	33,24	37,56	23,29	2,30	4,66
Sumatera Selatan	8,02	4,11	13,85	33,82	42,68	0,46	4,90
Bengkulu	12,46	0,27	21,15	41,08	29,52	1,79	2,98
Lampung	3,61	0,79	24,36	26,39	52,61	1,61	3,88
Bangka Belitung	4,20	15,27	18,20	59,36	14,62	1,51	3,01
Kepulauan Riau	13,63	6,85	16,58	79,30	15,48	7,00	8,26
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	4,54	2,31	35,07	33,70	38,66	0,67	3,02
Jawa Tengah	5,43	2,35	29,09	30,67	41,07	0,71	3,12
DI Yogyakarta	9,87	7,06	45,73	32,87	25,35	1,20	0,67
Jawa Timur	2,56	1,93	21,53	25,13	53,32	1,02	2,59
Banten	5,56	2,09	22,52	42,22	36,06	1,69	2,60
B a l i	3,44	0,42	38,45	29,47	40,93	2,22	0,48
Nusa Tenggara Barat	3,20	0,31	19,96	41,84	45,81	1,89	0,76
Nusa Tenggara Timur	4,50	2,79	8,60	65,91	18,56	0,08	8,02
Kalimantan Barat	5,32	2,73	10,12	47,98	41,59	1,34	3,66
Kalimantan Tengah	7,52	0,28	12,14	59,69	25,87	-	4,89
Kalimantan Selatan	6,40	0,44	12,38	44,42	49,54	0,44	9,72
Kalimantan Timur	15,48	4,13	18,97	56,31	19,76	0,58	1,11
Sulawesi Utara	7,28	3,78	31,64	40,05	28,80	0,46	2,79
Sulawesi Tengah	5,07	0,71	13,55	51,36	30,65	1,84	3,50
Sulawesi Selatan	10,73	2,01	20,20	50,81	26,34	0,88	3,72
Sulawesi Tenggara	6,80	2,50	8,61	73,33	14,90	0,37	1,36
Gorontalo	5,20	-	31,37	40,21	37,15	0,98	2,27
Sulawesi Barat	10,10	0,44	5,27	73,30	17,20	0,83	1,93
Maluku	12,04	-	10,67	65,98	18,20	0,86	4,21
Maluku Utara	12,13	1,01	5,77	52,76	30,90	-	2,11
Irian Jaya Barat	20,61	-	-	79,39	-	-	0,80
Papua	10,45	3,43	9,97	76,27	1,55	1,00	6,15
<b>INDONESIA</b>	<b>5,74</b>	<b>2,37</b>	<b>24,51</b>	<b>35,84</b>	<b>39,79</b>	<b>1,15</b>	<b>3,44</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 5.7.3**  
**Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Provinsi dan**  
**Tempat Berobat Jalan Tahun 2007**

Provinsi	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas	Praktek Nakes	Perkotaan + Perdesaan	
						Praktek Batra/ Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	15,74	2,94	18,90	49,37	26,02	1,55	7,11
Sumatera Utara	8,35	6,84	25,83	24,53	38,92	1,69	5,25
Sumatera Barat	11,27	2,38	19,70	38,90	31,37	5,07	3,53
R i a u	13,19	5,70	30,78	37,91	18,79	2,10	3,35
J a m b i	11,53	1,43	34,27	37,01	21,91	3,21	4,10
Sumatera Selatan	9,44	5,58	21,90	30,85	34,31	0,34	4,54
Bengkulu	12,97	0,21	24,65	42,92	25,61	2,17	2,96
Lampung	4,73	2,67	26,58	24,28	49,11	1,46	3,73
Bangka Belitung	8,20	22,55	21,13	48,28	12,83	1,01	2,36
Kepulauan Riau	18,18	12,22	30,74	45,52	11,10	3,38	8,71
DKI Jakarta	13,94	21,31	42,88	22,63	2,62	0,97	1,94
Jawa Barat	8,14	4,84	37,61	33,30	28,63	0,72	3,12
Jawa Tengah	7,30	3,13	32,29	30,31	34,66	0,84	3,60
DI Yogyakarta	11,34	9,91	43,34	30,09	20,49	0,73	1,42
Jawa Timur	5,00	3,03	27,41	25,39	44,44	1,07	2,28
Banten	7,23	5,73	36,66	32,44	26,98	1,91	4,36
B a l i	5,35	0,80	39,45	31,59	35,47	1,49	1,06
Nusa Tenggara Barat	4,31	0,22	24,85	38,99	39,66	1,81	1,28
Nusa Tenggara Timur	7,24	3,22	9,71	63,07	17,78	0,08	7,56
Kalimantan Barat	8,21	3,28	15,04	46,33	35,02	1,56	3,99
Kalimantan Tengah	9,73	0,37	17,65	53,12	26,75	0,06	5,60
Kalimantan Selatan	9,53	0,29	19,33	43,26	39,51	0,29	7,53
Kalimantan Timur	16,15	5,10	29,31	48,23	13,15	0,31	1,26
Sulawesi Utara	10,04	4,48	33,50	36,59	25,99	0,58	2,72
Sulawesi Tengah	6,43	0,76	18,22	49,40	28,19	1,76	3,35
Sulawesi Selatan	12,14	2,08	23,23	46,13	24,50	0,73	3,32
Sulawesi Tenggara	9,92	3,63	12,52	65,91	14,41	0,31	1,14
Gorontalo	3,92	0,40	38,90	38,17	30,53	0,74	2,69
Sulawesi Barat	12,36	0,37	9,55	64,86	19,60	0,92	1,62
Maluku	18,82	2,58	24,25	57,48	13,88	0,59	2,91
Maluku Utara	10,95	1,59	16,61	51,90	26,64	-	1,64
Irian Jaya Barat	19,74	-	6,85	75,14	-	-	0,57
Papua	14,71	4,14	15,99	70,60	2,77	0,73	4,46
<b>INDONESIA</b>	<b>8,03</b>	<b>4,14</b>	<b>29,65</b>	<b>33,58</b>	<b>32,67</b>	<b>1,13</b>	<b>3,34</b>

Sumber : BPS - Susenas 2007

**Tabel 6.1**  
**TPAK Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah**  
**Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	53,76	50,40	51,22
Sumatera Utara	39,59	59,42	51,45
Sumatera Barat	31,47	42,01	39,34
R i a u	31,41	55,88	45,74
J a m b i	32,79	52,05	47,11
Sumatera Selatan	31,85	62,04	52,13
Bengkulu	37,78	58,84	53,74
Lampung	39,11	55,44	51,79
Bangka Belitung	29,63	46,73	37,99
Kepulauan Riau	36,23	35,97	36,15
DKI Jakarta	31,67	-	31,67
Jawa Barat	33,93	53,97	45,27
Jawa Tengah	42,10	57,23	51,52
DI Yogyakarta	50,69	46,62	48,63
Jawa Timur	40,33	56,82	50,97
Banten	33,89	47,87	40,78
B a l i	51,12	59,55	56,45
Nusa Tenggara Barat	51,20	55,89	54,10
Nusa Tenggara Timur	30,42	62,26	59,06
Kalimantan Barat	27,83	47,17	41,20
Kalimantan Tengah	38,35	64,15	58,19
Kalimantan Selatan	33,51	55,76	46,63
Kalimantan Timur	26,02	41,33	35,21
Sulawesi Utara	33,89	43,01	39,68
Sulawesi Tengah	39,63	60,56	56,73
Sulawesi Selatan	30,19	43,42	40,27
Sulawesi Tenggara	35,66	60,84	57,31
Gorontalo	22,11	49,08	40,70
Sulawesi Barat	43,56	53,39	50,11
Maluku	34,43	57,17	51,78
Maluku Utara	27,78	60,00	50,45
Irian Jaya Barat	27,95	68,09	58,56
Papua	36,11	65,57	59,09
<b>INDONESIA</b>	<b>38,09</b>	<b>54,88</b>	<b>48,51</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007



**Tabel 6.2.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Lapangan Usaha Tahun 2007**

				Perkotaan
Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	32,09	15,13	52,77	100,00
Sumatera Utara	26,64	11,81	61,55	100,00
Sumatera Barat	34,76	11,36	53,88	100,00
R i a u	19,74	9,86	70,40	100,00
J a m b i	25,05	16,03	58,92	100,00
Sumatera Selatan	23,10	8,61	68,29	100,00
Bengkulu	41,12	6,89	51,99	100,00
Lampung	31,31	8,99	59,70	100,00
Bangka Belitung	23,35	23,69	52,96	100,00
Kepulauan Riau	22,80	15,75	61,45	100,00
DKI Jakarta	2,05	8,94	89,01	100,00
Jawa Barat	33,35	10,71	55,93	100,00
Jawa Tengah	39,47	16,96	43,57	100,00
DI Yogyakarta	50,90	11,52	37,57	100,00
Jawa Timur	38,84	9,38	51,79	100,00
Banten	24,65	9,09	66,26	100,00
B a l i	46,80	16,91	36,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,59	21,89	35,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,46	10,99	58,54	100,00
Kalimantan Barat	32,93	11,25	55,82	100,00
Kalimantan Tengah	38,82	14,63	46,55	100,00
Kalimantan Selatan	17,90	10,95	71,15	100,00
Kalimantan Timur	31,90	13,64	54,46	100,00
Sulawesi Utara	40,17	11,70	48,13	100,00
Sulawesi Tengah	35,20	9,64	55,16	100,00
Sulawesi Selatan	21,43	5,80	72,77	100,00
Sulawesi Tenggara	29,35	7,01	63,64	100,00
Gorontalo	37,44	22,37	40,20	100,00
Sulawesi Barat	52,38	7,00	40,62	100,00
Maluku	35,40	11,80	52,80	100,00
Maluku Utara	45,91	19,17	34,92	100,00
Irian Jaya Barat	17,26	10,41	72,33	100,00
Papua	27,33	12,75	59,92	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>34,34</b>	<b>12,15</b>	<b>53,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Catatan :**

**Industri \*)** : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian  
 Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**Jasa-Jasa \*)** : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi  
 Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

**Tabel 6.2.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Lapangan Usaha Tahun 2007**

				Perdesaan
Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	80,06	6,95	12,99	100,00
Sumatera Utara	87,16	2,85	10,00	100,00
Sumatera Barat	75,72	5,89	18,38	100,00
R i a u	85,36	1,85	12,79	100,00
J a m b i	82,79	2,82	14,39	100,00
Sumatera Selatan	87,27	1,98	10,75	100,00
Bengkulu	87,11	5,00	7,89	100,00
Lampung	83,62	4,27	12,11	100,00
Bangka Belitung	66,35	13,94	19,72	100,00
Kepulauan Riau	60,35	21,13	18,52	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	75,55	7,05	17,41	100,00
Jawa Tengah	79,44	8,05	12,51	100,00
DI Yogyakarta	81,89	6,18	11,93	100,00
Jawa Timur	79,83	5,77	14,40	100,00
Banten	79,91	6,15	13,95	100,00
B a l i	78,37	8,92	12,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	68,29	11,97	19,75	100,00
Nusa Tenggara Timur	88,05	8,22	3,73	100,00
Kalimantan Barat	84,97	3,89	11,14	100,00
Kalimantan Tengah	87,53	4,57	7,91	100,00
Kalimantan Selatan	79,01	9,11	11,89	100,00
Kalimantan Timur	84,68	6,26	9,06	100,00
Sulawesi Utara	76,68	6,42	16,90	100,00
Sulawesi Tengah	84,41	4,94	10,65	100,00
Sulawesi Selatan	83,38	3,79	12,83	100,00
Sulawesi Tenggara	82,94	6,93	10,12	100,00
Gorontalo	77,32	5,84	16,84	100,00
Sulawesi Barat	82,30	6,51	11,19	100,00
Maluku	87,67	4,55	7,79	100,00
Maluku Utara	85,25	5,68	9,07	100,00
Irian Jaya Barat	82,14	3,16	14,70	100,00
Papua	88,62	3,94	7,43	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>80,27</b>	<b>6,31</b>	<b>13,43</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Catatan :**

**Industri \*)** : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalan  
 Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**Jasa-Jasa \*)** : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi  
 Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

**Tabel 6.2.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Lapangan Usaha Tahun 2007**

Perkotaan + Perdesaan				
Provinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	70,38	8,60	21,02	100,00
Sumatera Utara	68,57	5,60	25,83	100,00
Sumatera Barat	67,44	7,00	25,56	100,00
R i a u	67,03	4,09	28,88	100,00
J a m b i	72,45	5,19	22,36	100,00
Sumatera Selatan	74,42	3,30	22,27	100,00
Bengkulu	79,34	5,32	15,34	100,00
Lampung	74,79	5,07	20,14	100,00
Bangka Belitung	49,25	17,81	32,93	100,00
Kepulauan Riau	34,89	17,48	47,64	100,00
DKI Jakarta	2,05	8,94	89,01	100,00
Jawa Barat	62,11	8,22	29,67	100,00
Jawa Tengah	67,17	10,78	22,05	100,00
DI Yogyakarta	65,91	8,94	25,16	100,00
Jawa Timur	68,37	6,78	24,85	100,00
Banten	57,04	7,36	35,60	100,00
B a l i	67,86	11,58	20,55	100,00
Nusa Tenggara Barat	59,08	15,52	25,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	85,07	8,36	6,57	100,00
Kalimantan Barat	74,15	5,42	20,43	100,00
Kalimantan Tengah	80,05	6,11	13,84	100,00
Kalimantan Selatan	61,11	9,65	29,25	100,00
Kalimantan Timur	69,57	8,37	22,06	100,00
Sulawesi Utara	65,35	8,06	26,60	100,00
Sulawesi Tengah	78,18	5,53	16,28	100,00
Sulawesi Selatan	72,31	4,15	23,55	100,00
Sulawesi Tenggara	78,31	6,94	14,75	100,00
Gorontalo	70,50	8,66	20,83	100,00
Sulawesi Barat	73,99	6,64	19,37	100,00
Maluku	79,43	5,69	14,88	100,00
Maluku Utara	78,87	7,87	13,27	100,00
Irian Jaya Barat	74,79	3,98	21,22	100,00
Papua	80,38	5,13	14,49	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>66,75</b>	<b>8,03</b>	<b>25,22</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Catatan :**

**Industri \*)** : Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalan  
 Listrik, Gas, Air minum, dan Konstruksi

**Jasa-Jasa \*)** : Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi  
 Keuangan, Jasa-jasa, lainnya

**Tabel 6.3.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Status Pekerjaan Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan					
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	57,04	20,56	12,24	9,37	0,79	100,00
Sumatera Utara	34,99	34,77	19,46	3,62	7,16	100,00
Sumatera Barat	38,31	32,13	10,63	6,06	12,86	100,00
R i a u	46,27	34,50	11,43	3,08	4,72	100,00
J a m b i	32,84	33,03	16,27	10,20	7,66	100,00
Sumatera Selatan	42,74	29,93	11,95	5,85	9,53	100,00
Bengkulu	24,99	50,32	9,45	6,19	9,05	100,00
Lampung	39,44	37,74	9,79	3,47	9,56	100,00
Bangka Belitung	40,89	23,21	22,91	3,54	9,45	100,00
Kepulauan Riau	44,17	19,13	28,52	5,72	2,46	100,00
DKI Jakarta	37,37	29,14	25,10	3,19	5,19	100,00
Jawa Barat	36,54	33,02	10,61	11,42	8,41	100,00
Jawa Tengah	30,70	37,32	9,35	11,26	11,36	100,00
DI Yogyakarta	27,25	41,01	11,07	5,95	14,73	100,00
Jawa Timur	30,62	36,84	11,05	10,14	11,35	100,00
Banten	41,23	32,90	16,35	2,77	6,75	100,00
B a l i	27,86	39,07	8,82	7,15	17,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,42	49,05	8,24	7,90	10,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,16	49,43	13,97	1,05	4,39	100,00
Kalimantan Barat	34,31	40,82	21,65	1,42	1,79	100,00
Kalimantan Tengah	40,16	27,35	21,80	1,92	8,78	100,00
Kalimantan Selatan	38,49	31,99	16,52	4,65	8,35	100,00
Kalimantan Timur	36,41	38,27	18,33	3,04	3,95	100,00
Sulawesi Utara	41,74	30,61	12,91	6,78	7,96	100,00
Sulawesi Tengah	44,20	33,23	11,35	2,75	8,46	100,00
Sulawesi Selatan	30,84	42,68	16,18	2,11	8,19	100,00
Sulawesi Tenggara	34,31	40,67	11,10	3,28	10,65	100,00
Gorontalo	58,66	21,07	20,27	-	-	100,00
Sulawesi Barat	42,84	45,39	1,45	4,10	6,23	100,00
Maluku	27,69	34,86	21,14	3,65	12,65	100,00
Maluku Utara	41,12	31,47	16,50	-	10,91	100,00
Irian Jaya Barat	13,52	47,58	12,69	25,39	0,82	100,00
Papua	35,78	30,84	33,38	-	-	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>33,56</b>	<b>35,80</b>	<b>12,36</b>	<b>8,42</b>	<b>9,86</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Tabel 6.3.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Status Pekerjaan Tahun 2007**

Provinsi						Perdesaan
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	33,85	44,96	6,23	6,68	8,28	100,00
Sumatera Utara	20,70	53,14	4,07	5,01	17,08	100,00
Sumatera Barat	23,76	48,17	4,50	5,96	17,60	100,00
R i a u	42,63	40,20	2,21	6,35	8,60	100,00
J a m b i	26,82	48,09	6,18	7,16	11,76	100,00
Sumatera Selatan	16,17	56,20	3,81	4,93	18,88	100,00
Bengkulu	19,41	53,66	3,72	4,03	19,19	100,00
Lampung	16,11	60,04	2,14	4,60	17,10	100,00
Bangka Belitung	39,79	37,64	9,86	3,63	9,09	100,00
Kepulauan Riau	61,69	19,31	4,68	6,86	7,47	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,53	49,93	3,19	17,01	12,34	100,00
Jawa Tengah	13,86	56,33	3,11	9,07	17,62	100,00
DI Yogyakarta	11,16	67,98	2,91	4,94	13,01	100,00
Jawa Timur	17,42	50,83	2,97	11,70	17,07	100,00
Banten	18,75	54,15	3,57	11,30	12,23	100,00
B a l i	21,60	47,92	1,72	2,95	25,81	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,67	56,99	2,01	8,78	10,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,87	63,51	1,25	0,82	21,55	100,00
Kalimantan Barat	20,34	69,96	3,38	2,72	3,60	100,00
Kalimantan Tengah	24,03	51,55	5,23	3,32	15,88	100,00
Kalimantan Selatan	22,47	57,57	3,24	2,56	14,17	100,00
Kalimantan Timur	26,55	49,84	9,21	7,68	6,72	100,00
Sulawesi Utara	40,23	37,41	5,23	5,43	11,70	100,00
Sulawesi Tengah	19,58	61,09	3,01	2,70	13,62	100,00
Sulawesi Selatan	18,10	62,07	3,28	3,59	12,96	100,00
Sulawesi Tenggara	22,26	59,25	2,69	1,34	14,46	100,00
Gorontalo	27,15	50,74	5,56	5,50	11,05	100,00
Sulawesi Barat	21,23	61,84	3,49	2,17	11,27	100,00
Maluku	24,33	48,73	2,67	3,80	20,47	100,00
Maluku Utara	23,74	55,88	3,53	3,49	13,37	100,00
Irian Jaya Barat	11,49	68,48	7,08	1,00	11,94	100,00
Papua	24,43	55,56	7,83	2,13	10,04	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>18,15</b>	<b>53,78</b>	<b>3,23</b>	<b>9,11</b>	<b>15,73</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Tabel 6.3.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi dan**  
**Status Pekerjaan Tahun 2007**

Perkotaan + Perdesaan						
Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	38,53	40,03	7,44	7,22	6,77	100,00
Sumatera Utara	25,09	47,50	8,79	4,59	14,04	100,00
Sumatera Barat	26,70	44,93	5,74	5,98	16,64	100,00
R i a u	43,64	38,61	4,79	5,44	7,52	100,00
J a m b i	27,89	45,39	7,99	7,70	11,02	100,00
Sumatera Selatan	21,49	50,94	5,44	5,11	17,01	100,00
Bengkulu	20,35	53,10	4,68	4,39	17,48	100,00
Lampung	20,05	56,28	3,43	4,41	15,83	100,00
Bangka Belitung	40,23	31,90	15,05	3,59	9,23	100,00
Kepulauan Riau	49,80	19,19	20,85	6,09	4,07	100,00
DKI Jakarta	37,37	29,14	25,10	3,19	5,19	100,00
Jawa Barat	23,59	44,54	5,55	15,23	11,09	100,00
Jawa Tengah	19,03	50,50	5,03	9,74	15,70	100,00
DI Yogyakarta	19,46	54,06	7,12	5,46	13,90	100,00
Jawa Timur	21,11	46,92	5,23	11,26	15,47	100,00
Banten	28,05	45,35	8,86	7,77	9,96	100,00
B a l i	23,68	44,97	4,08	4,35	22,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,66	54,15	4,24	8,47	10,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,82	62,78	1,91	0,83	20,66	100,00
Kalimantan Barat	23,24	63,91	7,18	2,45	3,23	100,00
Kalimantan Tengah	26,50	47,83	7,78	3,10	14,79	100,00
Kalimantan Selatan	27,16	50,07	7,13	3,17	12,46	100,00
Kalimantan Timur	29,38	46,53	11,82	6,35	5,93	100,00
Sulawesi Utara	40,70	35,30	7,61	5,85	10,54	100,00
Sulawesi Tengah	22,70	57,56	4,06	2,71	12,97	100,00
Sulawesi Selatan	20,38	58,61	5,58	3,33	12,10	100,00
Sulawesi Tenggara	23,31	57,64	3,42	1,50	14,13	100,00
Gorontalo	32,53	45,67	8,08	4,56	9,16	100,00
Sulawesi Barat	27,23	57,27	2,92	2,70	9,87	100,00
Maluku	24,86	46,55	5,58	3,78	19,24	100,00
Maluku Utara	26,56	51,92	5,63	2,92	12,97	100,00
Irian Jaya Barat	11,72	66,12	7,72	3,76	10,68	100,00
Papua	25,96	52,24	11,26	1,85	8,69	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>22,69</b>	<b>48,49</b>	<b>5,91</b>	<b>8,91</b>	<b>14,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Tabel 6.4.1**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin**  
**dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,16	1,19	14,09	84,56	0,48	7,20	48,08	44,24	0,21	2,24	20,00	77,55
Sumatera Utara	2,23	4,77	21,30	71,71	4,37	5,20	35,33	55,10	2,91	4,91	25,78	66,41
Sumatera Barat	4,57	10,36	22,59	62,47	6,83	15,76	23,42	53,99	5,40	12,34	22,89	59,37
R i a u	4,91	9,35	27,95	57,78	5,89	11,25	36,34	46,52	5,15	9,83	30,04	54,98
J a m b i	1,30	4,26	29,96	64,47	1,67	13,18	21,96	63,19	1,41	6,89	27,60	64,10
Sumatera Selatan	2,54	4,86	27,08	65,52	1,53	9,55	35,69	53,22	2,14	6,74	30,53	60,60
Bengkulu	6,75	2,12	20,52	70,61	-	19,93	23,67	56,40	4,68	7,58	21,49	66,25
Lampung	5,38	9,91	27,39	57,32	7,98	15,90	22,91	53,20	6,18	11,74	26,02	56,06
Bangka Belitung	1,80	13,23	24,70	60,27	8,36	11,59	53,01	27,04	3,85	12,72	33,51	49,92
Kepulauan Riau	3,82	6,87	18,32	70,99	-	10,26	43,59	46,15	3,21	7,41	22,37	67,01
DKI Jakarta	4,29	8,27	16,67	70,77	10,37	11,40	19,04	59,19	5,74	9,02	17,24	67,99
Jawa Barat	3,44	8,05	25,44	63,07	6,48	15,89	26,20	51,43	4,21	10,04	25,63	60,11
Jawa Tengah	5,37	7,74	30,04	56,86	3,29	9,41	36,30	51,00	4,51	8,42	32,61	54,45
DI Yogyakarta	2,83	4,64	33,58	58,95	2,70	12,64	27,68	56,98	2,77	8,14	31,00	58,09
Jawa Timur	4,63	8,68	29,04	57,64	2,99	12,67	34,08	50,26	3,95	10,35	31,15	54,56
Banten	1,38	15,50	20,85	62,27	1,86	17,95	24,27	55,92	1,49	16,05	21,61	60,85
B a l i	2,59	7,97	25,28	64,16	0,51	13,68	44,28	41,53	1,77	10,21	32,74	55,27
Nusa Tenggara Barat	2,90	8,31	31,15	57,64	9,59	7,34	31,75	51,32	5,75	7,90	31,41	54,95
Nusa Tenggara Timur	3,74	5,24	42,86	48,15	8,28	9,75	39,13	42,83	5,44	6,93	41,47	46,17
Kalimantan Barat	2,73	6,70	35,66	54,91	1,00	4,49	39,81	54,70	2,30	6,14	36,70	54,86
Kalimantan Tengah	2,12	2,87	20,40	74,60	5,08	15,27	33,11	46,55	3,05	6,77	24,40	65,77
Kalimantan Selatan	2,04	11,61	19,97	66,38	6,94	11,84	34,40	46,82	3,94	11,70	25,59	58,77
Kalimantan Timur	-	7,04	17,84	75,12	-	11,59	35,35	53,06	-	7,54	19,76	72,71
Sulawesi Utara	6,52	4,28	37,85	51,35	4,51	14,99	33,78	46,72	5,95	7,31	36,69	50,04
Sulawesi Tengah	14,54	4,49	28,15	52,81	3,60	13,53	25,13	57,74	11,18	7,26	27,23	54,32
Sulawesi Selatan	2,99	8,29	26,61	62,11	2,42	9,09	18,94	69,55	2,80	8,56	24,03	64,61
Sulawesi Tenggara	7,81	8,56	24,63	58,99	0,88	10,31	16,50	72,30	5,69	9,10	22,14	63,06
Gorontalo	8,18	10,72	36,61	44,49	12,85	12,85	30,94	43,35	9,58	11,36	34,92	44,15
Sulawesi Barat	8,00	-	46,00	46,00	4,35	8,70	21,74	65,22	7,00	2,39	39,33	51,28
Maluku	2,18	10,70	40,71	46,40	-	11,33	36,75	51,92	1,40	10,93	39,29	48,39
Maluku Utara	10,92	4,94	18,74	65,39	-	32,14	44,95	22,91	8,12	11,91	25,46	54,51
Irian Jaya Barat	-	0,28	39,11	60,61	-	-	9,09	90,91	-	0,27	38,81	60,91
Papua	4,24	-	17,29	78,47	13,40	15,46	-	71,13	4,81	0,98	16,20	78,01
<b>INDONESIA</b>	<b>4,00</b>	<b>7,98</b>	<b>26,81</b>	<b>61,21</b>	<b>4,04</b>	<b>11,75</b>	<b>32,36</b>	<b>51,85</b>	<b>4,01</b>	<b>9,30</b>	<b>28,76</b>	<b>57,93</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007

**Tabel 6.4.2**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin**  
**dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007**

Provinsi	Perdesaan											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darussalam	3,28	5,98	35,55	55,19	5,33	9,32	51,73	33,61	3,87	6,93	40,16	49,05
Sumatera Utara	4,29	6,94	38,07	50,69	3,50	11,10	40,62	44,77	3,95	8,74	39,17	48,14
Sumatera Barat	2,48	6,43	37,00	54,09	4,33	12,87	46,74	36,06	3,25	9,11	41,07	46,57
R i a u	2,61	11,46	44,02	41,91	2,70	19,10	45,95	32,25	2,63	13,02	44,41	39,94
J a m b i	3,71	6,50	39,56	50,23	2,45	10,48	53,92	33,15	3,34	7,69	43,85	45,12
Sumatera Selatan	4,86	6,25	41,58	47,31	4,74	10,26	48,70	36,29	4,82	7,58	43,95	43,65
Bengkulu	3,22	4,28	32,49	60,01	3,32	12,60	46,26	37,82	3,25	6,97	36,94	52,84
Lampung	7,68	7,65	29,98	54,69	5,69	14,36	36,24	43,71	7,05	9,78	31,96	51,21
Bangka Belitung	5,47	7,17	38,74	48,62	4,70	23,92	43,89	27,48	5,28	11,27	40,00	43,44
Kepulauan Riau	8,08	14,14	46,46	31,31	3,23	16,13	45,16	35,48	6,44	14,81	46,02	32,73
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,85	5,69	40,95	46,50	4,30	16,95	48,75	30,00	6,13	8,89	43,16	41,82
Jawa Tengah	5,42	5,63	39,34	49,61	4,00	16,81	47,92	31,27	4,89	9,83	42,56	42,71
DI Yogyakarta	3,58	8,30	32,60	55,52	3,06	18,44	38,93	39,56	3,47	10,41	33,92	52,20
Jawa Timur	3,84	8,55	35,63	51,98	3,70	21,03	40,01	35,26	3,79	13,36	37,32	45,53
Banten	6,30	2,51	41,46	49,73	11,48	15,74	49,86	22,91	7,86	6,49	43,99	41,66
B a l i	1,65	6,24	33,32	58,79	1,03	13,98	40,43	44,57	1,42	9,18	36,02	53,38
Nusa Tenggara Barat	9,41	9,96	32,96	47,67	9,57	14,59	40,82	35,02	9,46	11,53	35,64	43,37
Nusa Tenggara Timur	5,12	9,24	41,72	43,92	8,80	15,96	52,40	22,84	6,61	11,96	46,03	35,41
Kalimantan Barat	2,31	3,42	33,47	60,80	10,76	7,80	40,50	40,95	4,32	4,46	35,14	56,09
Kalimantan Tengah	1,57	4,04	40,05	54,34	1,45	8,87	43,07	46,61	1,54	5,31	40,85	52,30
Kalimantan Selatan	8,91	6,59	35,97	48,53	10,80	15,10	47,11	26,99	9,66	9,94	40,36	40,04
Kalimantan Timur	-	5,26	32,22	62,51	-	3,71	31,13	65,16	-	5,13	32,13	62,73
Sulawesi Utara	1,68	6,98	41,26	50,07	5,46	11,11	43,28	40,15	2,68	8,07	41,79	47,46
Sulawesi Tengah	7,68	7,40	38,86	46,06	9,19	17,16	52,32	21,33	8,10	10,12	42,60	39,18
Sulawesi Selatan	8,55	9,88	35,77	45,80	6,15	15,92	46,27	31,66	7,72	11,97	39,40	40,91
Sulawesi Tenggara	3,62	7,83	39,10	49,44	3,63	19,82	44,91	31,64	3,63	12,35	41,28	42,74
Gorontalo	9,33	6,27	30,65	53,75	5,75	14,13	39,62	40,51	8,45	8,20	32,85	50,50
Sulawesi Barat	2,78	10,71	45,24	41,27	3,33	25,00	45,00	26,67	2,98	15,84	45,15	36,03
Maluku	0,30	4,55	35,96	59,20	1,41	13,12	45,79	39,67	0,71	7,68	39,56	52,05
Maluku Utara	5,73	3,09	40,83	50,34	8,30	10,70	56,07	24,92	6,47	5,26	45,18	43,10
Irian Jaya Barat	3,65	2,64	38,39	55,33	7,50	11,61	50,74	30,15	4,68	5,04	41,69	48,59
Papua	2,85	5,91	40,42	50,81	-	8,17	52,34	39,49	2,14	6,47	43,39	48,00
<b>INDONESIA</b>	<b>5,09</b>	<b>6,91</b>	<b>37,77</b>	<b>50,23</b>	<b>4,56</b>	<b>16,80</b>	<b>44,74</b>	<b>33,90</b>	<b>4,91</b>	<b>10,35</b>	<b>40,19</b>	<b>44,55</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007



**Tabel 6.4.3**  
**Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin**  
**dan Jumlah Jam Kerja (Jam) Selama Seminggu Terakhir Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+	0	1-14	15-34	35+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,58	4,89	30,70	61,83	4,68	9,04	51,24	35,03	3,13	5,98	36,09	54,80
Sumatera Utara	3,58	6,19	32,25	57,98	3,72	9,64	39,32	47,32	3,63	7,56	35,06	53,75
Sumatera Barat	2,93	7,28	33,89	55,90	4,79	13,39	42,50	39,32	3,69	9,77	37,39	49,15
R i a u	3,22	10,90	39,72	46,16	3,72	16,58	42,86	36,83	3,33	12,13	40,40	44,14
J a m b i	3,28	6,09	37,83	52,79	2,31	10,96	48,27	38,46	2,99	7,55	40,95	48,52
Sumatera Selatan	4,43	6,00	38,92	50,65	4,00	10,10	45,68	40,22	4,28	7,41	41,26	47,04
Bengkulu	3,83	3,91	30,42	61,84	2,79	13,78	42,61	40,82	3,50	7,07	34,33	55,10
Lampung	7,29	8,04	29,53	55,14	6,07	14,61	34,07	45,26	6,90	10,11	30,96	52,03
Bangka Belitung	4,09	9,45	33,47	52,99	6,37	18,30	48,05	27,28	4,71	11,85	37,42	46,02
Kepulauan Riau	4,98	8,85	25,98	60,20	1,62	13,20	44,38	40,81	4,25	9,79	29,98	55,98
DKI Jakarta	4,29	8,27	16,67	70,77	10,37	11,40	19,04	59,19	5,74	9,02	17,24	67,99
Jawa Barat	5,74	6,47	35,87	51,93	4,94	16,64	42,11	36,31	5,52	9,26	37,58	47,64
Jawa Tengah	5,41	6,25	36,59	51,75	3,77	14,40	44,13	37,70	4,77	9,40	39,51	46,32
DI Yogyakarta	3,26	6,72	33,02	57,00	2,81	14,43	31,15	51,60	3,11	9,24	32,41	55,24
Jawa Timur	4,05	8,58	33,86	53,50	3,49	18,56	38,25	39,70	3,83	12,52	35,59	48,06
Banten	4,14	8,22	32,40	55,24	8,17	16,50	41,04	34,29	5,22	10,45	34,73	49,61
B a l i	1,96	6,81	30,68	60,55	0,85	13,87	41,74	43,53	1,53	9,52	34,93	54,01
Nusa Tenggara Barat	7,28	9,42	32,37	50,93	9,58	11,61	37,09	41,72	8,13	10,23	34,12	47,51
Nusa Tenggara Timur	5,05	9,03	41,78	44,15	8,78	15,66	51,76	23,80	6,55	11,69	45,79	35,96
Kalimantan Barat	2,40	4,09	33,92	59,59	8,64	7,08	40,35	43,93	3,90	4,81	35,46	55,83
Kalimantan Tengah	1,65	3,87	37,21	57,27	2,10	10,01	41,29	46,60	1,77	5,54	38,32	54,37
Kalimantan Selatan	6,89	8,07	31,25	53,79	9,68	14,15	43,42	32,75	7,98	10,46	36,03	45,53
Kalimantan Timur	-	5,76	28,19	66,05	-	6,43	32,59	60,97	-	5,82	28,59	65,59
Sulawesi Utara	3,16	6,16	40,22	50,46	5,15	12,37	40,18	42,29	3,69	7,84	40,21	48,26
Sulawesi Tengah	8,52	7,05	37,55	46,88	8,42	16,66	48,58	26,35	8,49	9,75	40,65	41,10
Sulawesi Selatan	7,54	9,59	34,12	48,75	5,50	14,73	41,50	38,27	6,84	11,36	36,66	45,15
Sulawesi Tenggara	4,02	7,90	37,72	50,35	3,44	19,14	42,88	34,54	3,81	12,07	39,63	44,50
Gorontalo	9,15	6,98	31,61	52,26	7,18	13,87	37,87	41,08	8,65	8,74	33,20	49,42
Sulawesi Barat	4,36	7,47	45,47	42,70	3,56	21,29	39,71	35,44	4,09	12,10	43,54	40,27
Maluku	0,60	5,52	36,72	57,17	1,19	12,85	44,39	41,57	0,81	8,20	39,52	51,48
Maluku Utara	6,60	3,40	37,13	52,87	7,07	13,88	54,42	24,63	6,73	6,34	41,98	44,95
Irian Jaya Barat	3,11	2,29	38,49	56,10	7,47	11,55	50,54	30,44	4,15	4,50	41,36	49,99
Papua	3,08	4,95	36,67	55,30	0,51	8,45	50,35	40,69	2,50	5,73	39,73	52,04
<b>INDONESIA</b>	<b>4,77</b>	<b>7,22</b>	<b>34,56</b>	<b>53,45</b>	<b>4,41</b>	<b>15,31</b>	<b>41,07</b>	<b>39,21</b>	<b>4,64</b>	<b>10,04</b>	<b>36,83</b>	<b>48,49</b>

Sumber : BPS - Sakernas 2007